

# Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung Tahun 2018 - 2023



2018

# Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung Tahun 2018 - 2023

© 2018, YOSL/OIC-PILI

Publikasi oleh YOSL/OIC-PILI

ISBN

Editor: Iwan Setiawan

Tim Penyusun: Evi Indraswati, Muchamad Muchtar, Thomas Oni Veriasa, Anwar Muzakkir, Ajeng Miranti Putri

Kontributor: Wiyogo S, A. Edison, Andytia Pratiwi, Rini Susanti, Ayusrina Syaka, Anjar BS, Iin Meylina, Teguh Ismail, Prayitno, Sugeng, Suryanto, Elly L. Rustiati, Muniful Hamid, Danang Wibowo, Sumianto, Bambang Lesmana, Febrilia EW, Sugiyono

~~Penyusun:~~ Konsorsium YOSL/OIC-PILI



Pendukung



## LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kolaboratif (*Collaborative Management Plan*) Taman Nasional Way Kambas Tahun 2018-2023 merupakan acuan bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan kolaboratif termasuk pelaksanaan *Small Grants Programme* (SGP) *ASEAN Center for Biodiversity* (ACB).

Agustus 2018

Menyetujui,  
Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas,

Subakir, S.H, M.H.  
NIP. 196209081986011001

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati,

Drh. Indra Exploitasia, M.Si.  
NIP. 19660618199203200

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,

Ir. Wiratno, M.Sc.  
NIP. 196203281989031003

## SAMBUTAN

Taman Nasional Way Kambas sangat kaya dengan keanekaragaman hayati terutama lima satwa kunci yaitu harimau sumatera, badak sumatera, gajah sumatera, tapir dan beruang madu. Keunikan serta nilai penting dari keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, membuat Taman Nasional ini terpilih menjadi salah satu situs Taman Warisan ASEAN (ASEAN Heritage Park) pada 27 Juli 2016.

Dukungan ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) dengan pendanaan pemerintah Jerman (KfW) atas keanekaragaman hayati Way Kambas dimulai dengan penyusunan dokumen pengelolaan kolaboratif (CMP) hingga lima tahun ke depan. Proses penyusunan yang melibatkan multipihak dari internal pengelola TNWK hingga pemerintah desa penyangga sampai pemerintah provinsi menjadi wujud kepedulian bersama atas kelestarian kawasan konservasi ini.

Konsorsium YOSL-OIC bersama PILI-Green Network telah memulai tahapan kajian dokumen hingga pemetaan pemangku kepentingan sejak April 2018. Hasil kajian ini telah disusun dalam dokumen perencanaan kolaboratif TNWK yang akan digunakan pengelola serta pemangku kepentingan mewujukan visi TNWK ke depan. Proses panjang dalam kajian hingga konsultasi publik dan peran serta pemangku kepentingan dari masyarakat sekitar, LSM, pemerintah desa, kabupaten hingga provinsi, akademisi dan juga peneliti tertuang dalam dokumen ini untuk mendukung TNWK.

Dokumen CMP ini akan digunakan bagi ACB untuk mendukung pengelolaan TNWK melalui skema *Small Grants Programme* yang dapat diakses para mitra TNWK. Besar ungkapan terimakasih dan juga harapan kami sebagai perwakilan pengelola TNWK untuk bisa mengawal proses kolaboratif ini di masa mendatang demi kelestarian keanekaragaman hayati di TNWK.

Semoga dokumen CMP ini bisa menjadi acuan pemangku kepentingan dan membuat pengelolaan TNWK lebih efektif lagi. Akhir kata, Kolaboratif menjadi kunci kesepakatan dan komunikasi pemangku kepentingan dalam mewujudkan kelestarian alam TNWK di masa mendatang. Salam Lestari !

Lampung, Agustus 2018

Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas

Subakir, S.H, M.H.  
NIP. 196209081986011001



## KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Dokumen ini memuat Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Kolaboratif di TNWK, Provinsi Lampung, Tahun 2018 - 2023. Dokumen ini merupakan acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan perlindungan sumber daya alam dan ekosistem serta peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di TNWK. Perwujudan dokumen ini juga sebagai bentuk komitmen bersama pemangku kepentingan untuk "Terwujudnya Taman Nasional Way Kambas sebagai habitat ideal bagi satwa liar Sumatera yang dilindungi dan membawa kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar".

Keseriusan dan komitmen pemangku kepentingan telah dibuktikan dalam proses penyusunan dokumen melalui kegiatan Grup Diskusi Terfokus (FGD) di tingkat tapak hingga nasional dan kegiatan konsultasi publik dengan proses fasilitasi, diskusi, dan konsultasi yang melibatkan partisipasi Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur beserta lingkup UPTD hingga Pemerintahan Desa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, c.q. Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem hingga tingkat Balai TNWK, akademisi serta rekan-rekan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal hingga nasional.

Kami meyakini dokumen ini bermanfaat untuk menjadi rujukan dan pegangan pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi pengelolaan Kawasan TNWK.

Lampung, Agustus 2018

Tim Penyusun

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penyusun menyampaikan terima kasih kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem beserta direktur pada lingkup Ditjen KSDAE, Kepala Balai TNWK dengan seluruh stafnya atas dukungan dan kerjasama terhadap proses penyusunan dokumen CMP di TNWK. Terima kasih disampaikan pula kepada Pemerintah dan lingkup UPTD di tingkat Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah, serta masyarakat di sekitar penyangga Kawasan TNWK atas kerjasama dan partisipasi dalam penyusunan dokumen CMP. Lebih khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada Ratna Kusuma Sari, Ratna Hendratmoko, Sri Ratnaningsih, Agung Nugroho dan anggota *National Working Team*.

Terima kasih disampaikan kepada Kfw (*Kreditanstalt für Wiederaufbau*) kerjasama keuangan Jerman melalui ACB (*ASEAN Centre for Biodiversity*) atas dukungan pendanaan untuk terlaksana kegiatan penyusunan dokumen CMP. Ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh staf dan *associate* PILI-Green Network atas waktu, tenaga dan pemikiran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan,

Atas nama konsorsium YOSL/OIC - PILI menyampaikan penghargaan kepada pemangku kepentingan atas dedikasi personal dan Lembaga yang telah berkontribusi dalam menyiapkan dan menyusun dokumen CMP.

## DAFTAR SINGKATAN

ACB	<i>ASEAN Centre for Biodiversity</i>
ADD	Anggaran Dana Desa
IPB	Institut Pertanian Bogor
AHP	<i>ASEAN Heritage Park</i>
ALeRT	Aliansi Lestari Rimba Terpadu
APL	Areal Penggunaan Lain
ASEAN	<i>Association of South East Asian Nations</i>
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BPDAS	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
CA	Cagar Alam
CBD	<i>Convention on Biological Diversity</i>
CMP	<i>Collaborative Management Plan</i>
DAS	Daerah Aliran Sungai
DED	<i>Detailed Engineering Design</i>
Ditjen	Direktorat Jenderal
ERU	<i>Elephant Response Unit</i>
FGD	<i>Focussed Group Discussion</i>
FRDP	Forum Rembug Desa Penyangga
ha	<i>Hectare</i>
ILEU	<i>Intelligence and Law Enforcement Unit</i>
IMI	Ikatan Motor Indonesia
Inpres	Instruksi Presiden
IPD	Indeks Pembangunan Desa
ITERA	Institut Teknologi Sumatera
IUPJL	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
IUPJWA	Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam
IUPSWA	Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
KAGAMA	Keluarga Alumni UGM
Keppres	Peraturan Presiden
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
KPA	Kawasan Pelestarian Alam
KSA	Kawasan Suaka Alam
KSDAE	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
KTH	Kelompok Tani Hutan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	Mandi Cuci Kakus
MDK	Model Desa Konservasi
METT	Monitoring and Evaluation Tracking Tool
MMP	Masyarakat Mitra Polhut
NWT	<i>National Working Team</i>

PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
Perda	Peraturan Daerah
Permenhut	Peraturan Menteri Kehutanan
Perpres	Peraturan Presiden
PHPA	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
PHVA	<i>Population Habitat Viability Analysis</i>
PILI	Pusat Informasi Lingkungan Indonesia
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PLG	Pusat Latihan Gajah
POKDARWIS	Kelompok Sadar Wisata
POLINELA	Politeknik Negeri Lampung
RPTN	Resor Pengelolaan Taman Nasional
PKHS	Pusat Konservasi Harimau Sumatera
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PRA	<i>Participatory Rural Appraisal</i>
PT PPG	Perseroan Terbatas PT Great Giant Pineapple
RIPPPDA	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
RPU	<i>Rhino Protection Unit</i>
RBM	<i>Resort-Based Management</i>
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMDES	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SAINS	Sajogyo Institute
SDM	Sumber Daya Manusia
SIES	<i>Save Indonesian Endangered Species</i>
SK	Surat Keputusan
SOAR	Strengths, Opportunities, Aspirations, Results
SPTN	Seksi Pengelolaan Taman Nasional
SRS	Sumatran Rhino Sanctuary, sebuah program yang sebelumnya di bawah pengelolaan YMR, sekarang YABI
TAGANA	Taruna Siaga Bencana
Tahura	Taman Hutan Raya
TERMA	<i>Tiger Elephant Rhino Monitoring Area</i>
TFCA	<i>Tropical Forest Conservation Action</i>
TIMA	<i>Tiger Intensive Management Area</i>
TN	Taman Nasional
TNBBS	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
TNGL	Taman Nasional Gunung Leuseur
TWA	Taman Wisata Alam
UKM	Usaha Kelompok Masyarakat
UNILA	Universitas Lampung
UU	Undang-undang
VESSWIC	<i>Veterinary Society for Sumatran Wildlife Community</i>
WCS	<i>Wildlife Conservation Society</i>

YABI Yayasan Badak Indonesia  
YOSL/OIC Yayasan Orangutan Sumatera Lestari/*Orangutan Information Center*  
YMR Yayasan Mitra Rhino  
YAPEKA Yayasan Pendidikan Konservasi Alam



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) secara resmi ditetapkan menjadi *ASEAN Heritage Parks* (AHPs – Taman Nasional Warisan ASEAN) ke-36 pada 27 Juli 2016. Di Indonesia, Taman Nasional Warisan ASEAN lainnya yaitu Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Lorentz, Kepulauan Seribu dan Wakatobi. Program AHPs bertujuan untuk menyelaraskan konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan yang menjadi AHPs. Program ini dilaksanakan oleh *ASEAN Centre for Biodiversity (ACB)*, sebagai sekretariat pelaksanaan AHP, yang meluncurkan Program Dana Hibah Kecil (*Small Grants Programme – SGP*) dengan dukungan dari *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (Kerjasama Keuangan Jerman – KfW).

Pelaksanaan SGP diawali dengan penyusunan Rencana Pengelolaan Kolaboratif (*Collaborative Management Plan – CMP*) di TNWK dan TN Gunung Leuser sebagai acuan bagi mitra lokal untuk mengakses SGP dalam mendukung pencapaian pengelolaan kolaboratif di kedua taman nasional. Konsorsium Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – *Orangutan Information Centre (YOSL/OIC)* dan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI – Green Network) dipilih dan ditunjuk oleh ACB sebagai pelaksana penyusunan dokumen CMP masing-masing di TNGL dan TNWK.

Tujuan umum penyusunan dokumen CMP adalah untuk memperkuat sistem pengelolaan taman nasional yang efektif dan efisien dengan mengembangkan rencana pengelolaan kolaboratif selama lima tahun (2018 – 2023). Dokumen ini mengintegrasikan rencana pengelolaan taman nasional yang ada dengan berbagai perencanaan, aspirasi, dan komitmen dari para pemangku kepentingan terkait.

Proses perencanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang dibangun melalui proses-proses konsultasi bersama pemangku kepentingan, yang dilakukan antara April – Agustus 2018. Dari proses tersebut, beberapa temuan dihasilkan. Dalam tataran perencanaan, TNWK sudah memiliki beberapa dokumen rencana pengelolaan dan pengembangan yang dapat menjadi modal dasar bagi pengelolaan kolaboratif. Dokumen tersebut yaitu Rencana Strategis 2015-2019 dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 2017-2026. Selain rencana umum pengelolaan, TNWK telah menyusun rencana kegiatan tematik di antaranya Rencana Pemulihan Ekosistem, Rencana awal Pengembangan Wisata Alam yang berupa desain tapak di kawasan PLG, Resor Way Kanan, dan daerah gerbang utama Plang Ijo, serta Rencana Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga.

Dalam tataran pelaksanaan, TNWK telah mendapatkan dukungan dari beberapa mitra LSM yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan balai, perlindungan spesies, kawasan dan penegakan hukum, pengawetan flora dan fauna, pemulihan ekosistem, pengembangan wisata alam, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah, dimana TNWK secara administratif terletak, memiliki aspirasi dan telah memberikan dukungan dalam konteks pembangunan wilayah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tataran pelaksanaan, Pemda provinsi dan kabupaten terutama terlibat dalam kegiatan pengembangan wisata alam dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan tersebut berupa peningkatan aksesibilitas ke TNWK, peningkatan kapasitas masyarakat di beberapa desa prioritas, dan promosi. Dalam bidang promosi, agenda tahunan Festival Way Kambas terbukti telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan penerimaan PNBPN yang melebihi target tahunan.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar desa penyangga, Balai TNWK telah meningkatkan jumlah tenaga penyuluh kehutanan, dan membuat Rencana Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Periode 2016 – 2025, yang menetapkan Desa Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II sebagai desa dampingan prioritas. Hal ini menggambarkan perencanaan Balai TNWK yang lebih terbuka ke luar (*outward-looking* dan inklusif). Dari hasil analisis perkembangan wilayah desa penyangga yang digabungkan dengan kriteria penetapan desa-desa prioritas oleh Balai TNWK, ada 7 desa potensial yang dapat dikembangkan selain Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II. Desa-desa itu yaitu Desa Braja Yekti, Braja Kencana, Labuhan Ratu 9, dan Labuhan Ratu 6 di Kabupaten Lampung Timur, dan Desa Rantau Jaya Makmur, Rawa Betik, dan Bina Karya Buana di Kabupaten Lampung Tengah.

Temuan-temuan di atas menjadi dasar masukan bagi penyusunan CMP yang memakai analisis pendekatan *Strategic Map*. Dari proses pemetaan strategi (*strategy mapping*) diperoleh pernyataan VISI yaitu "Terwujudnya Taman Nasional Way Kambas sebagai habitat ideal bagi satwa liar Sumatera yang dilindungi dan membawa kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar".

Untuk mewujudkan visinya, TNWK memiliki lima MISI, yaitu 1) Melindungi kawasan TNWK secara keseluruhan yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan; 2) Mengawetkan keanekaragaman jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya di dalam kawasan TNWK; 3) Menggali dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang ada di dalam kawasan TNWK terutama untuk pemanfaatan wisata alam; 4) Mendayagunakan secara optimal potensi ekonomi kawasan TNWK pada zona pemanfaatan dan zona lainnya di luar zona inti untuk memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar kawasan; dan 5) Mensinergikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi kawasan TNWK dengan kepentingan daerah dan pihak-pihak terkait di dalam dan luar negeri.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, CMP-SGP dari TNWK menetapkan lima SASARAN POKOK yang akan dicapai dalam tahun 2018-2023, yaitu 1) Terbangunnya kapasitas kelembagaan pengelola TNWK yang kuat; 2) Terlindunginya kawasan secara keseluruhan dan keanekaragaman hayati dan ekosistem di dalam kawasan TNWK; 3) Tergali dan dimanfaatkan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terutama untuk jasa lingkungan; 4) Terbangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar untuk mendukung kelestarian kawasan TNWK; dan 5) Sinergisitas manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi kawasan TNWK bagi kepentingan daerah dan pihak-pihak terkait di dalam dan luar negeri.

Rencana pengelolaan kolaborasi TNWK jangka waktu 2018 – 2023 terbagi 7 strategi utama yaitu:

1. Strategi penguatan kelembagaan TNWK di tingkat tapak (resor)
2. Strategi perlindungan kawasan secara keseluruhan dan keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan TNWK
3. Strategi pengawetan flora dan fauna melalui pembaruan data dan informasi serta pengembangannya
4. Strategi pembinaan habitat melalui pemulihan ekosistem
5. Strategi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK
6. Strategi keterpaduan rencana tata ruang desa melalui pengembangan model desa binaan dan pengembangan model ekowisata terpadu
7. Strategi keterpaduan perencanaan dan pengembangan kawasan TNWK dengan pihak lain, melalui pengembangan kemitraan konservasi dalam skema peran dan pembagian manfaat dari perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya.

[Ketujuh strategi ini mencerminkan paradigma 10 cara baru pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia yang tengah dikembangkan Ditjen KSDAE \(lihat catatan kaki 37\)](#)

Sesuai dengan tujuan Rencana Pengelolaan Kolaboratif, kebijakan kolaboratif di KSA dan KPA di Indonesia, serta panduan dari ACB, SASARAN POKOK di atas akan dicapai melalui pelaksanaan 2 program besar, 9 sub-program, dan beberapa rencana kegiatan yang dapat dilakukan secara kolaboratif oleh pemangku kepentingan. Program dan sub-program tersebut adalah:

- A. Program pelestarian sumber daya alam dan ekosistem di TNWK
  - Sub-program 1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Berbasis Resor (*Resort-based Management/RBM*)
  - Sub-program 2. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan
  - Sub-program 3. Pengawetan Flora dan Fauna
  - Sub-program 4. Pemulihan Ekosistem
- B. Program peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
  - Sub-program 5. Penyadartahuan Masyarakat
  - Sub-program 6. Pengembangan masyarakat berfokus pada komoditi pertanian dan kehutanan
  - Sub-program 7. Pengembangan Model Desa Binaan
  - Sub-program 8. Pengembangan Model Ekowisata Terpadu
  - Sub-program 9. Penguatan kolaborasi pemangku kepentingan di kawasan TNWK (Kemitraan Konservasi)

Untuk mengukur pencapaian kedua program tersebut, Rencana Pengelolaan Kolaboratif menambahkan Program C. Pemantauan dan evaluasi.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH .....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Keluaran .....	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Metodologi.....	3
1.4.1. Studi Literatur .....	3
1.4.2. Proses dan tahapan .....	5
1.4.3. Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi.....	6
2. DESKRIPSI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS .....	8
2.1. Sejarah dan Status Penetapan Kawasan .....	8
2.2. Kelembagaan Pengelolaan Kawasan.....	11
2.3. Kegiatan Pengelolaan TN Way Kambas.....	17
2.3.1. Penguatan Kelembagaan Balai TNWK .....	19
2.3.2. Perlindungan Spesies, Kawasan dan Penegakan Hukum .....	21
2.3.3. Pengawetan Flora Dan Fauna.....	23
2.3.4. Pemulihan Ekosistem.....	25
2.3.5. Pengembangan Wisata Alam.....	26
2.3.6. Pemberdayaan Masyarakat .....	28
2.4. TNWK Dalam Kerangka Pembangunan Wilayah .....	53
2.4.1. Pembangunan Provinsi Lampung.....	53
2.4.2. Pembangunan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah .....	54
3. TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KOLABORATIF DI KAWASAN KONSERVASI .....	57
3.1. Konsep Dasar Pengelolaan Kolaboratif .....	57
3.2. Kebijakan Pengelolaan Kolaboratif .....	58
3.3. Kerja Sama Pengembangan Wisata Alam .....	59
3.4. Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat .....	60
3.5. Pengembangan Desa Konservasi.....	61
4. POTENSI DAN PEMBATAS TNWK.....	65
5. STRATEGI DAN RENCANA AKSI.....	70
5.1. Visi dan Misi .....	70
5.1.1. Visi Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas .....	70
5.1.2. Misi Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas.....	70

5.2. Sasaran Pokok .....	71
5.3. Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas .....	73
5.3.1. Strategi Penguatan Kelembagaan TNWK di Tingkat Tapak (Resor) .....	74
5.3.2. Strategi Perlindungan Kawasan Secara Keseluruhan dan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem di Kawasan TNWK.....	75
5.3.3. Strategi Pengawetan Flora dan Fauna Melalui Pembaruan Data dan Informasi serta Pengembangannya.....	76
5.3.4. Strategi Pembinaan Habitat melalui Pemulihan Ekosistem.....	77
5.3.5. Strategi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK.....	78
5.3.6. Strategi Keterpaduan Rencana Tata Ruang Desa Melalui Pengembangan Model Desa Binaan dan Pengembangan Model Ekowisata Terpadu.....	79
5.3.7. Strategi Keterpaduan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan TNWK Melalui Kemitraan Konservasi Dalam Skema Peran dan Pembagian Manfaat Dari Sumber Daya Alam dan Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem.....	81
5.4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK.....	82
5.4.1. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi Penguatan Kelembagaan TNWK di Tingkat Tapak (Resor) .....	83
5.4.2. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi Perlindungan Kawasan Secara Keseluruhan dan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem di Kawasan TNWK.....	84
5.4.3. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi Pengawetan Flora dan Fauna Melalui Pembaruan Data dan Informasi serta Pengembangannya .....	84
5.4.4. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi Pembinaan Habitat melalui Pemulihan Ekosistem.....	85
5.4.5. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK .....	85
5.4.6. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK .....	85
5.4.7. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi Keterpaduan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan TNWK Melalui Kemitraan Konservasi Dalam Skema Peran dan Pembagian Manfaat Dari Sumber Daya Alam dan Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem .....	86
PENUTUP .....	102
Daftar Pustaka.....	103



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Peraturan, Perundangan, Dokumen Perencanaan yang dikaji .....	3
Tabel 2. Pembagian resor, luas, dan cakupan wilayah pengelolaan .....	15
Tabel 3. Penjelasan penilaian METT pada aspek context 100% (2017) .....	19
Tabel 4. Evaluasi parakondisi dan implementasi Resort-based Management di Taman Nasional.....	20
Tabel 5. Capaian Impelementasi Pengelolaan kawasan Berbasis Resor .....	21
Tabel 6. Aktivitas Masyarakat Desa Braja Harjosari di sekitar dan dalam kawasan TNWK .....	31
Tabel 7. Kelembagaan desa dan kelompok masyarakat di desa Braja Harjosari yang sudah bekerja sama dengan TNWK .....	33
Tabel 8. Lembaga mitra TNWK yang pernah bekerja sama di Desa Brajaharjosari .....	39
Tabel 9. Aktivitas Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II di sekitar dan dalam kawasan TNWK.....	41
Tabel 10. Daftar kelembagaan desa dan kelompok masyarakat yang teridentifikasi di Desa Rantau Jaya Udik II .....	43
Tabel 11. Lembaga mitra TNWK yang pernah bekerjasama di Desa Rantau Udik II .....	46
Tabel 12. Analisis Skalogram Perkembangan Wilayah Desa di Sekitar TNWK .....	50
Tabel 13. Peraturan terkait Pelibatan Berbagai Pihak dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi .....	62
Tabel 14. Point METT terkait Pelibatan Berbagai Pihak dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi .....	64
Tabel 15. Program dan Rencana Aksi untuk Penguatan Kelembagaan TNWK di Tingkat Tapak (Resor) .....	75
Tabel 16. Program dan Rencana Aksi untuk Perlindungan Kawasan Secara Keseluruhan dan Keanekaragaman hayati serta Ekosistem di Kawasan TNWK.....	76
Tabel 17. Program dan Rencana Aksi untuk Pengawetan Flora dan Fauna Melalui Pembaruan Data dan Informasi Serta Pengembangannya .....	77
Tabel 18. Program dan Rencana Aksi untuk Pembinaan Habitat Melalui Pemulihan Ekosistem .....	78
Tabel 19. Program dan Rencana Aksi untuk Peningkatan Kesadaran Kritis Masyarakat Terhadap Kelestarian Kawasan TNWK. ....	79
Tabel 20. Program dan Rencana Aksi untuk Keterpaduan Tata Ruang Desa Melalui Pengembangan Model Desa Binaan dan Pengembangan Model Ekowisata Terpadu.....	80
Tabel 21. Program dan Rencana Aksi untuk Keterpaduan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan TNWK Melalui Kemitraan Konservasi Dalam Skema Peran dan Pembagian Manfaat Dari Sumber Daya Alam dan Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem .....	82
Tabel 22. Program Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK .....	83
Tabel 23. Indikator Program dan Rencana Aksi Penguatan Kelembagaan TNWK di Tingkat Tapak (Resor). ....	83
Tabel 24. Indikator Program dan Rencana Aksi Perlindungan Kawasan Secara Keseluruhan dan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem di Kawasan TNWK. ....	84

Tabel 25. Indikator Program dan Rencana Aksi Pengawetan Flora dan Fauna Melalui Pembaruan Data dan Informasi serta Pengembangannya .....	84
Tabel 26. Indikator Program dan Rencana Aksi Pembinaan Habitat melalui Pemulihan Ekosistem. ....	85
Tabel 27. Indikator Program dan Rencana Aksi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK.....	85
Tabel 28. Indikator Program dan Rencana Aksi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK.....	86
Tabel 29. Indikator Program dan Rencana Aksi Keterpaduan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan TNWK Melalui Kemitraan Konservasi Dalam Skema Peran dan Pembagian Manfaat Dari Sumber Daya Alam dan Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem. ....	87
Tabel 30. Matrik LFA, Strategi, Program, kegiatan dan Indikator Pengelolaan Kolaboratif di TNWK, tahun 2018-2023 .....	88
Tabel 31. Rekapitulasi pagi indikatif pelaksanaan program dan sub program rencana pengelolaan kolaboratif TNWK tahun 2018-2023. ....	93
Tabel 32. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan strategi, program dan kegiatan Program Pengelolaan Kolaboratif di TNWK, Tahun 2018-2023.....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ringkasan proses penyusunan dokumen CMP .....	6
Gambar 2. Peta Situasi TNWK .....	9
Gambar 3 Struktur organisasi pengelolaan Balai TNWK .....	11
Gambar 4. Peta sistem zonasi di Taman Nasional Way Kambas dan lokasi desa-desa yang berbatasan langsung .....	13
Gambar 5. Peta kerja resor di TNWK .....	16
Gambar 6 Lahan kritis yang tercipta sehabis kebakaran hutan dan ditumbuhi alang-alang .....	25
Gambar 7 Kantor Desa Braja Harjosari.....	30
Gambar 8 Peta tata guna lahan Desa Braja Harjosari .....	30
Gambar 9. Pemetaan konflik dan potensinya secara partisipatif di Desa Brajahaarjosari dengan TNWK.....	37
Gambar 10 Gerbang Desa Rantau Jaya Udik II .....	40
Gambar 11. Peta tata guna lahan Desa Rantau Jaya Udik II .....	45
Gambar 12. Peta perbandingan Indeks Pembangunan Desa Tahun 2011 (kiri) dan 2014 (kanan) .....	52
Gambar 13 Peta Wilayah Rawan Kebakaran Hutan di TNWK (Amalina et al. 2016) .....	66
Gambar 14 Kerbau milik masyarakat yang digembalakan di dalam kawasan TNWK .....	68
Gambar 15. Peta strategi (Strategy Map) Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK.....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kegiatan survey lapangan Tim CMP Taman Nasional Way Kambas.....	105
Lampiran 2. Kegiatan Diskusi dan Input dokumen penyusunan dokumen CMP Taman Nasional Way Kambas .....	109
Lampiran 3. Konsultasi publik penyusunan dokumen CMP Taman Nasional Way Kambas .....	<u>112</u>
Lampiran 4. Citra Landsat 8 pada Kawasan Taman Nasional Way Kambas .....	<u>115</u>
Lampiran 5. Peta Lokasi Taman Nasional Way Kambas terhadap Status Fungsi Kawasan Hutan .....	<u>116</u>
Lampiran 6. Peta Orthophoto Desa Braja Harjosari .....	<u>117</u>
Lampiran 7. Peta Tata Ruang Desa Braja Harjosari .....	<u>118</u>
Lampiran 8. Peta Orthophoto Desa Rantau Jaya Udik II .....	<u>119</u>
Lampiran 9. Peta tata Ruang Desa Rantau Jaya Udik II.....	<u>120</u>
Lampiran 10. Peta sebaran badak sumatera di TNWK .....	<u>121</u>
Lampiran 11. Peta sebaran harimau sumatera di TNWK .....	<u>122</u>
Lampiran 12. Peta sebaran gajah sumatera di TNWK .....	<u>123</u>
Lampiran 13. Peta sebaran beruang madu di TNWK .....	<u>124</u>
Lampiran 14. Peta sebaran tapir di TNWK .....	<u>125</u>
Lampiran 15. Peta sebaran satwa kunci di TNWK .....	<u>126</u>

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bagi masyarakat umum, Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dikenal sejak lama sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Lampung, yang identik dengan Pusat Latihan Gajah. Selain itu, TNWK memiliki 5 satwa kunci Sumatra yaitu gajah sumatera, nadak sumatera, harimau sumatera, tapir, dan beruang madu serta jenis satwa langka lainnya. Potensi keanekaragaman hayati yang tinggi ini ditunjang dengan berbagai tipe ekosistem hutan dan bentang alam yang menarik dengan sungai-sungai yang mengalir hingga ke pantai.

Di lain pihak, TNWK ini terisolasi dari kawasan hutan lainnya karena berbatasan langsung dengan 37 desa penyangga di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah. Keberadaan desa-desa ini dapat menjadi potensi maupun ancaman bagi keberlangsungan TNWK. Pariwisata dianggap sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat di sekitarnya. Bagi TNWK, pariwisata berhasil meningkatkan jumlah pengunjung dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Karena itu, upaya-upaya kolaborasi lainnya perlu dilakukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan konservasi keanekaragaman hayati di TNWK.

Pada 27 Juli 2016, TNWK secara resmi ditetapkan menjadi *ASEAN Heritage Parks* (AHPs) ke-36. Taman nasional di Indonesia lainnya yaitu Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Lorentz, Kepulauan Seribu dan Wakatobi. Penilaian ini berdasarkan kepada keunikan, keragaman, dan nilai-nilai luar biasa dari keanekaragaman hayati dan ekosistem di dalamnya. Untuk memperkuat pelaksanaan AHPs ini, *ASEAN Centre for Biodiversity* (ACB) sebagai sekretariat pelaksanaan AHP telah menyusun program untuk menghubungkan konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan AHPs. Program ini mendapat dukungan dari *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (Kerjasama Keuangan Jerman – KfW) melalui Program Hibah Kecil (*Small Grants Programme* – SGP), yang akan dilakukan di Myanmar dan Indonesia, sebagai percontohan.

Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) bersama ACB telah menyepakati pelaksanaan program SGP-AHP yang diawali di TNWK dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Pelaksanaan SGP diawali dengan penyusunan Rencana Pengelolaan Kolaboratif (*Collaborative Management Plan* – CMP) 2018 – 2023 sebagai acuan bagi mitra lokal untuk mengakses SGP dalam mendukung pencapaian pengelolaan kolaboratif di kedua taman nasional. ACB telah memilih dan menunjuk konsorsium Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – *Orangutan Information Centre* (YOSL/OIC) dan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI – Green Network) sebagai pelaksana penyusunan dokumen CMP masing-masing di TNGL dan TNWK.

Proses penyusunan CMP ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Balai TNWK dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten, masyarakat

lokal yang tinggal di sekitar kawasan, organisasi non-pemerintah (LSM), dan universitas. Maksud utama penyusunan CMP ini yaitu menyelaraskan kepentingan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap visi bersama yang meliputi konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar TNWK.

## 1.2. Tujuan dan Keluaran

Tujuan umum penyusunan dokumen ini adalah untuk memperkuat sistem manajemen yang efektif dan efisien di TNWK dengan mengembangkan rencana pengelolaan kolaboratif selama lima tahun yang mengintegrasikan rencana pengelolaan taman nasional yang ada dan berbagai komitmen dan kontribusi dari pemangku kepentingan terkait.

Tujuan spesifik penyusunan dokumen ini yaitu untuk:

1. Membangun komitmen para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pengelolaan kolaboratif TNWK yang efektif dan efisien;
2. Mengembangkan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan kolaboratif, dan pembiayaannya di TNWK; dan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat prioritas di TNWK.

Keluaran dari penyusunan dokumen ini mencakup:

1. Terbangunnya pemahaman bersama di antara para pemangku kepentingan proses fasilitasi perencanaan pengelolaan kolaboratif yang efektif dan efisien ditetapkan;
2. Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan dan pembiayaan kolaboratif yang disepakati bersama; dan
3. Terbangunnya kesadaran, pemahaman pentingnya nilai-nilai konservasi keanekaragaman hayati di TNWK dan meningkatnya kelompok-kelompok masyarakat prioritas di desa penyangga TNWK.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu Bab 1. Pendahuluan, yang memuat latar belakang, tujuan, keluaran, ruang lingkup dan metodologi kajian; Bab 2. Deskripsi Taman Nasional Way Kambas, yang memuat sejarah dan status, kelembagaan, kegiatan pengelolaan dan TNWK dalam kerangka wilayah; Bab 3 Tinjauan Teori dan Kebijakan Pengelolaan Kolaboratif di Kawasan Konservasi, yang memuat mengenai konsep dasar, kebijakan pengelolaan kolaboratif, kerjasama pengembangan wisata alam, kerjasama pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa konservasi; Bab 4 Tantangan Pengelolaan TNWK; Bab 5 Strategi dan Rencana Aksi, yang diuraikan melalui visi dan misi, sasaran pokok, strategi dan rencana aksi dan monitoring dan evaluasi (monev).



## 1.4. Metodologi

Dalam konteks membangun pengelolaan kolaborasi di kawasan TNWK, diperlukan upaya perencanaan kolaborasi yang melibatkan pemangku kepentingan yang berkepentingan. Proses perencanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang dibangun melalui proses-proses konsultasi bersama pemangku kepentingan, yang dilakukan antara April – Agustus 2018. Sebelumnya dilakukan studi literatur untuk mengkaji berbagai dokumen perencanaan pemangku kepentingan dan kebijakan-kebijakan terkait. Proses pengungkapan fakta-fakta lapangan dilakukan untuk memverifikasi hasil-hasil studi literatur melalui diskusi kelompok terfokus di desa terpilih, dan wawancara semi terstruktur kepada pemangku kepentingan utama.

### 1.4.1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai perundangan dan peraturan yang memungkinkan mendukung pengembangan skema pengelolaan kolaborasi di kawasan TNWK (**Tabel 1**). Selain itu proses telaah dokumen perencanaan pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan TNWK dilakukan untuk mensinergikan rencana-rencana pemangku kepentingan yang mungkin dapat dikembangkan dalam pengelolaan kolaborasi TNWK.

**Tabel 1.** Daftar Peraturan, Perundangan, Dokumen Perencanaan yang dikaji

No	Peraturan/Perundangan/Dokumen Perencanaan
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan
3	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
5	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
7	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
8	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan
9	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
10	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
11	Instruksi Presiden RI No 11 Tahun 2015, Tanggal 24 Oktober 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
12	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48 Tahun 2010. Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam jo Permenhut P.4-Menhut-II-2012
13	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.29/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan

Formatted Table

No	Peraturan/Perundangan/Dokumen Perencanaan
14	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut-II/2014 Tentang tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
15	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
16	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.76/Menhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
17	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
18	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial
19	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.35/MenLHK/Sekjen/Kum/1/3.2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
20	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
21	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/MENHUT-II/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Tata Caca Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
22	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jensi Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi
23	Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang SK Menhutbun No. 670/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Taman Nasional Way Kambas.
24	Surat Keputusan Gubernur Lampung No.G/459/V.23/2017 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung.
25	Surat Keputusan Gubernur No. G/460/HK/V.23/2017 tanggal 7 September 2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.
26	Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: 522/341/B/2008 tanggal 6 Maret 2008 Tentang Tim Kerja Terpadu Penanggulangan Konflik Gajah Manusia.
27	Peraturan Dirjen KSDAE No. P.7/KSDAE-SET/2015 Tentang Rencana Strategis Ditjen KSDAE tahun 2015-2019
28	Peraturan Dirjen PSKL No. P.23/PSKL/SET/PSL.3/12/2016 Tentang Pedoman peran pelaku Usaha dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
29	Perdirjen KSDAE P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
30	Perda Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2012 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung tahun 2012
31	Perda Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Lampung tahun 2015-2019
32	Perda Kabupaten Lampung Timur No. 15 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur tahun 2016-2021
33	Perda Kabupaten Lampng Tengah No. 9 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016-2021
34	<a href="#">Rencana Strategis KSDAE 2015-2019</a>
35	Rencana Strategis TNWK 2015-2019
36	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNWK 2017-2026
37	Rencana Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Zona Pemanfaatan Pusat Latihan Gajah, Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung (2015)
38	Rencana Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Zona Pemanfaatan RPTN Way Kanan, SPTN 1 Way Kanan Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung (2015)

Formatted Table

No	Peraturan/Perundangan/Dokumen Perencanaan
398	Rencana Desain Tapak Wisata Alam di Plang Ijo (2015): analisis pemangku kepentingan;
4039	Dokumen Penilaian METT TNWK tahun 2017
410	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rantau Jaya Udik II dan Desa Braja Harjosari
424	BPS. Data Potensi Desa di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah.

Formatted Table

Kajian mengenai perkembangan desa-desa di sekitar kawasan TNWK dilakukan dengan metode Skalogram yang menggunakan data potensi desa (PODES) di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah. Kajian ini menggunakan dua titik tahun yaitu 2011 dan 2014 yang menghasilkan Indeks Perkembangan Desa (IPD).

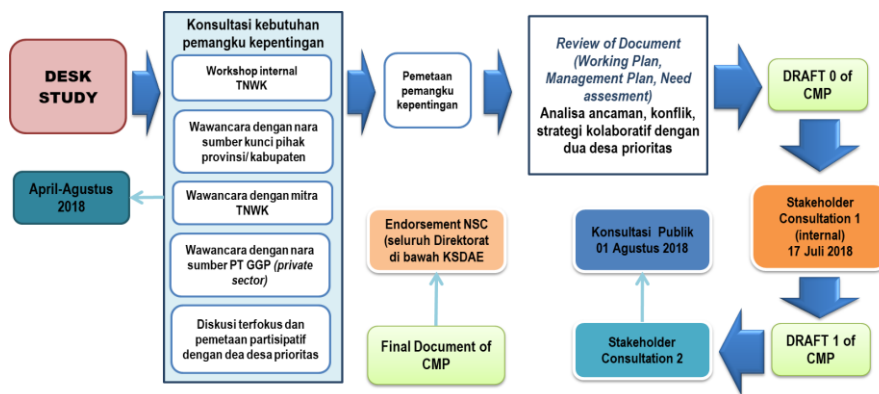
#### 1.4.2. Proses dan tahapan

Proses dan tahapan penyusunan dokumen ini mencakup:

1. Pertemuan koordinasi dan konsultasi melalui interview dan Diskusi Grup Terfokus (FGD) dengan pihak Balai TNWK, Pemprov dan Pemkab Lampung Selatan, perwakilan pemerintah desa dan masyarakat, mitra LSM serta PT Great Giant Pineapple Plantation Group 4 (PT GGP PG4) dari perwakilan swasta;
2. Pengkajian data dan informasi yang meliputi:
  - laporan-laporan kinerja Balai TN, laporan mitra LSM dan artikel-artikel terkait dari media massa dan website;
  - analisis dari dokumen-dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan TNWK untuk mengukur keadaan yang diinginkan di masa mendatang, di antaranya:
    - RENSTRA TNWK 2015-2019, RPJP Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung Periode 2017-2026 dan Rencana Kerja Tahunan TNWK;
    - RPJMD dan RIPPDA dari Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, beberapa desa terkait;
    - Rencana program/kegiatan dari mitra LSM yang berkegiatan di TNWK;
    - Rencana Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Zona Pemanfaatan Pusat Latihan Gajah, Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung (2015)
    - Rencana Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Zona Pemanfaatan RPTN Way Kanan, SPTN 1 Way Kanan Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung (2015)
    - Rencana Desain Tapak Wisata Alam di Plang Ijo (2015) analisis pemangku kepentingan;
  - pemetaan pemangku kepentingan;
  - kajian aspek keanekaragaman hayati;
  - kajian aspek sosio-ekonomi masyarakat setempat
3. Penyusunan dokumen dan analisa untuk mendapatkan konfirmasi dari pemangku kepentingan kunci.
4. Serangkaian pertemuan konsultasi dan konfirmasi dari laporan evaluasi dan materi dengan pemangku kepentingan utama melalui serangkaian FGD, dan wawancara.
5. Pembahasan terhadap draft rencana program/kegiatan diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2018, yang bertempat di Hotel Swiss Bell, Lampung. Proses pembahasan ini melibatkan berbagai pihak dari unsur pemerintah (Ditjen KSDAE, Balai Taman

Nasional, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, BAPPEDA dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, perwakilan desa), akademisi dari Universitas Lampung, perwakilan FRDP, dan mitra LSM.

6. Tinjauan bersama atas draft pertama dengan Tim Kerja Nasional yang terdiri dari tim terbang dan panutan tim Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)-KLHK, dan konfirmasi akhir dengan pemangku kepentingan yang relevan.
7. Konsultasi Publik untuk pembahasan draft final dokumen CMP yang melibatkan pemangku kepentingan
8. Pengesahan dari ketua National Steering Committee (Dirjen KSDAE) terhadap dokumen final CMP.



**Gambar 1.** Ringkasan proses penyusunan dokumen CMP

### 1.4.3. Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi

Proses penyusunan Strategi dan Rencana Aksi dari Rencana Pengelolaan Kolaborasi di TNWK ini dilakukan dengan cara membuat *Peta Strategi*. Proses ini dilakukan tahap demi tahap dengan mengacu pada *Lima Tugas Perencanaan Strategis*, dan dipandu dengan *Tiga Pertanyaan Perencanaan Strategis*.

Kerangka pikir *Peta Strategi* mengajak kita untuk menatap ke depan. Berwacana positif mengenai tempat yang hendak dituju, bukan berfokus pada masalah yang dihadapi. Fokus pada apa yang diinginkan, bukan pada apa yang tidak diinginkan. Namun juga mengetahui di mana posisi kita saat ini. Pertanyaan yang harus dijawab berbunyi “ada di mana kita saat ini?”, “ke mana kita ingin menuju?”, dan “bagaimana mencapai tempat itu?” Pertanyaannya tidak berbunyi “apa masalah yang sedang kita hadapi?” dan “bagaimana mengatasi masalah itu?”

#### Lima Tugas Perencanaan Strategis

- 1) Mengembangkan & menetapkan visi & misi strategis
- 2) Menetapkan sasaran strategis & target kinerja
- 3) Membuat strategi untuk mencapai sasaran
- 4) Menerapkan & melaksanakan rencana strategis
- 5) Mengevaluasi kinerja & merumuskan ulang rencana strategis

**Peta Strategi** mengenal empat ranah atau perspektif, yang memiliki hubungan logika sebab-akibat (*causes-effects*). Untuk membentuk peta tersebut didahului dengan hipotesis mengenai gambaran strategi yang hendak diwujudkan.

- (1) **Shareholders perspective**: merupakan ranah penerima manfaat (*beneficiaries*), dalam hal ini adalah pengelola kawasan dan masyarakat. Ada dua sasaran pokok yang hendak dicapai, yaitu i) pelestarian sumber daya alam dan ekosistem di dalam kawasan TNWK, dan ii) pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kedua sasaran pokok ini menjadi pilar untuk mencapai tujuan besar, yaitu "Terwujudnya Taman Nasional Way Kambas sebagai habitat ideal bagi satwa liar Sumatera yang dilindungi dan membawa kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar".
- (2) **Stakeholders perspective** merupakan ranah objek pengelolaan yang hendak diwujudkan, yaitu (1) nilai dan fungsi ekologi; (2) nilai dan fungsi jasa lingkungan; (3) perilaku dan budaya masyarakat, dan (4) Nilai pendidikan dan aksi konservasi. Ranah *shareholders* akan terwujud apabila ranah *stakeholders* tercapai. Dalam kajian Rencana Pengelolaan Kolaboratif ini, bentuk dan tata cara pengelolaan kolaborasi adalah mengacu pada PermenLHK No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 mengenai tata cara kerjasama penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Khususnya bentuk kerjasama dalam penguatan fungsi kawasan TNWK. Terdapat 8 bentuk dan tata cara yang disarikan menjadi 6 ranah *stakeholder*. Bentuk dan tata cara ini diadopsi dalam istilah yang kongruen dalam Rencana program/ kegiatan/ aksi pada sub 5.3.
- (3) **Operational perspective**: merupakan ranah upaya atau inisiatif yang perlu dilakukan untuk mencapai keadaan-keadaan yang hendak dicapai pada ranah *Stakeholders*. Upaya-upaya atau inisiatif selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk program/kegiatan.
- (4) **People & Resources and Budget perspective**: adalah mengenai sumberdaya manusia, sumberdaya lainnya (bahan dan alat kerja/ pendukung), dan anggaran. Agar mencapai sasaran pokok yang telah ditetapkan diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan, keahlian (*competency*) dan keterampilan (*skills*) yang memadai dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan/ kegiatan, alat dan perlengkapan yang tepat, yang dapat diandalkan untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja, serta anggaran yang tepat (tepat jumlah, tepat waktu).

Tiga Pertanyaan Kunci dalam  
Perencanaan Strategis

Di mana kita saat ini?

- Keadaan saat ini

Ke mana kita akan menuju?

- Keadaan mendatang

Bagaimana kita mencapai tempat  
itu?

- Strategi



## 2. DESKRIPSI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

### 2.1. Sejarah dan Status Penetapan Kawasan

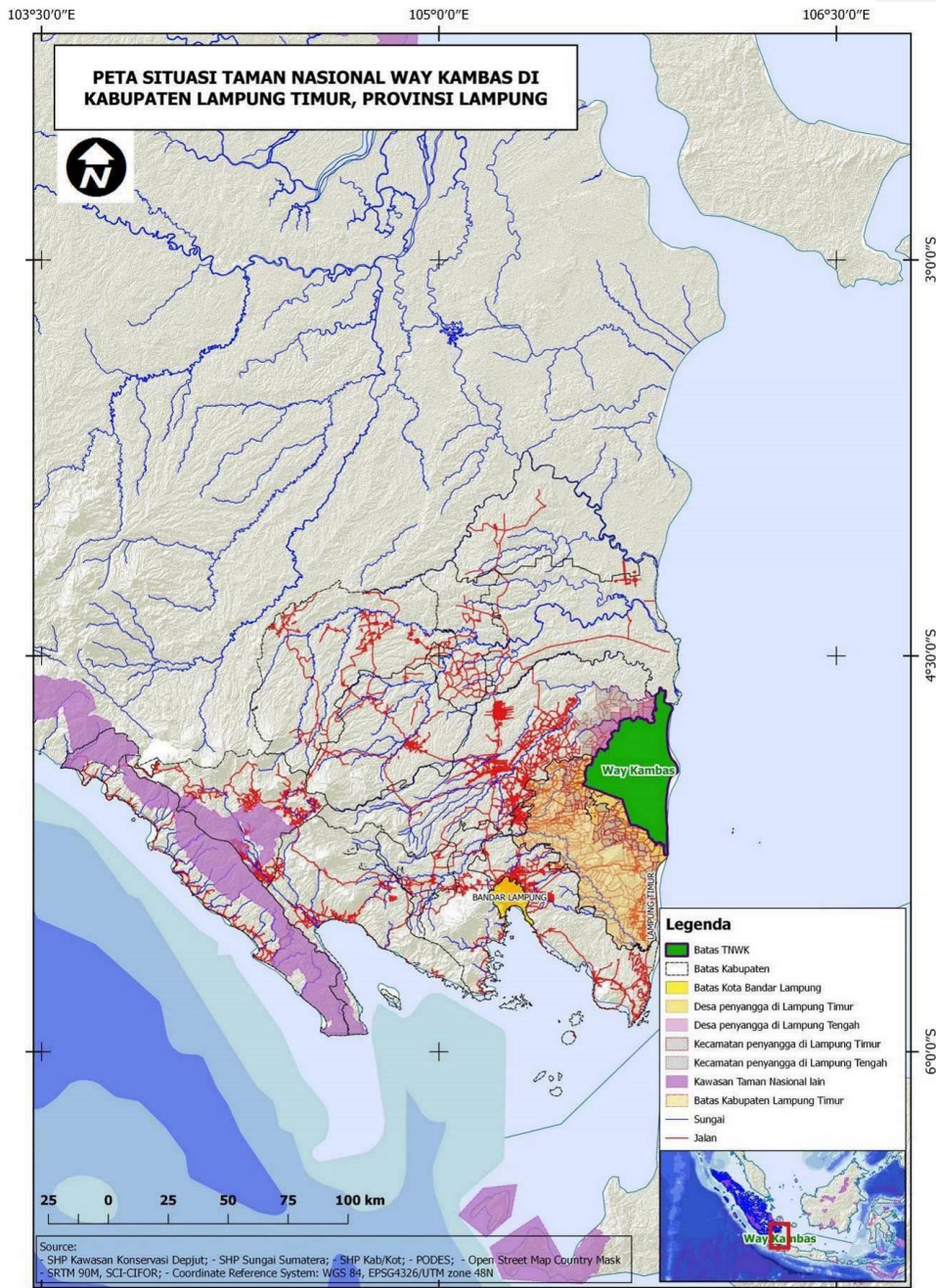
Sejarah penunjukan kawasan TNWK sudah dimulai sejak 1924. Pada saat itu tumbuh kesadaran untuk melindungi wilayah hutan yang memiliki potensi keindahan alam (berstatus *natuurmonumenten*) dan/atau sebagai habitat marga satwa (*wildreservaat*), terutama mamalia besar, burung dan satwa kharismatik lainnya dari perburuan yang berlebihan untuk hobi dan keindahan. Perlindungan suatu kawasan di luar Pulau Jawa bersifat otonom yang dilakukan oleh penguasa setempat yang diwakili oleh gubernur atau raja/sultan, yang berbentuk surat keputusan yang dikenal dengan istilah *Zelfbestuur Besluit* (ZB). Penunjukan ini diketahui oleh pengawas daerah (*controlleur*), Dinas Kehutanan (*Dienst van het Boschwezen*), *assistent resident* dan *resident*, yang kemudian dikukuhkan oleh Gubernur Jenderal.<sup>1</sup>

Sejak awal kawasan Way Kambas ditunjuk sebagai hutan lindung pada 1924, karena sebagai habitat margasatwa yang penting. Status ini ditingkatkan menjadi Suaka Margasatwa (*wildreservaat*), berdasarkan Surat Keputusan *Resident* Lampung Mr. Rook Maker pada 1936. Pada 26 Januari 1937 kawasan ini dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 14 Stbl.1937 N0.38 dengan luas 130.000 ha. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, Suaka Margasatwa Way Kambas diubah menjadi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) oleh Menteri Pertanian pada 1978. Pada 12 Oktober 1985 statusnya diubah kembali menjadi Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan dikelola oleh Sub-Balai KSDA berdasarkan SK No. 429/Kpts-II/1985.

Pada 1 April 1989, Menteri Kehutanan menetapkan Kawasan Suaka Margasatwa Way Kambas sebagai kawasan Taman Nasional berdasarkan SK Menhut No. 444/Menhut-11/1989. Pada 13 Maret 1991, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Sub-BKSDA yang bertanggung jawab langsung kepada Balai KSDA II Tanjung Karang berdasarkan SK Menhut No.144/kpts-II/1991. Pada 31 Maret 1997, Sub-BKSDA Way Kambas dinyatakan menjadi Balai Taman Nasional Way Kambas setelah terbitnya SK Menhut No. 185/Kpts-II/1997. Akhirnya, pada 26 Agustus 1999, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menetapkan kawasan ini sebagai Taman Nasional dengan luas 125.621,30 ha berdasarkan SK Menhut No. 670/Kpts-II/1999.

***Keanekaragaman Hayati & Ekosistem.*** Berdasarkan daerah persebaran satwa (zoogeografis), TNWK termasuk ke dalam wilayah pembagian "oriental region" dan "sundaic subregion" yang kaya akan jenis satwa liar. Kawasan TNWK memiliki tipe ekosistem yang beragam dengan perbedaan tipe jelas pada tiap tipenya. Terdapat lima tipe ekosistem utama penyusun struktur kawasan, yaitu ekosistem mangrove, pantai, riparian, hutan rawa air tawar dan hutan dipterokarpa dataran rendah. Beragamnya tipe ekosistem telah menjadikan kawasan TNWK sebagai habitat bagi berbagai macam species satwa.

<sup>1</sup> Yudistira, Pandji. 2014. Sang Pelopor. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam



**Gambar 2.** Peta Situasi TNWK

Di kawasan ini terdapat 50 spesies dari kelompok mamalia. Lima spesies kunci dan terancam punah di Pulau Sumatera dari kelompok mamalia, ditemukan di TNWK. Spesies itu adalah badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis sumatrensis*), gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), tapir (*Tapirus indicus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), dan siamang (*Hylobates syndactylus syndactylus*).

Daftar avifauna terangkum dari Parrot & Andrew (1996)<sup>2</sup>, yang mencatat 314 spesies (315 dengan tambahan baza jerdon (*Aviceda jerdoni*), lihat Holmes (1996)<sup>3</sup>. Beberapa spesies terancam punah di antaranya mentok rimba (*Cairina scutulata*), bangau sandang lawe (*Ciconia episcopus stormi*), bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), sempidan biru (*Lophura ignita*), kuau (*Argusianus argus argus*), pecuk ular (*Anhinga melanogaster*).

Karena kemudahan akses menuju TNWK, maka sejak tahun 70-an, TNWK sudah banyak dikunjungi oleh para ahli burung (ornitologist). Survei yang lebih sistematis terhadap spesies burung di TNWK dimulai antara tahun 1988-1989 oleh University of Southampton. Karena popularitasnya, maka avifauna TNWK dapat dikatakan sudah lebih dikenal dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya di Sumatera. Kawasan TNWK dikenal sebagai tempat yang mudah untuk dikunjungi bila ingin melihat bangau storm (*Ciconia stormi*) dan mentok rimba (*Cairina scutulata*), serta juga dikenal akan populasi berbiak dari bangau, dan relatif masih lengkap fauna hutan dataran rendahnya. Koloni berbiak bangau terdapat pada hutan rawa dekat pantai di bagian ujung selatan kawasan ini.

Pada kelompok amfibia tercatat 17 spesies dan reptil sebanyak 13 spesies. Pada kelompok ikan air tawar teridentifikasi 48 spesies. Pada kelompok kupu-kupu tercatat 77 spesies.

**Lokasi Kawasan.** Secara geografis, TNWK terletak pada 105°33'-105°54' Bujur Timur dan 4°37'- 5°16' Lintang Selatan. Secara administratif, kawasan TNWK terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Timur (Kecamatan Labuhan Maringgai, Braja Selehah, Way Jepara, Labuhan Ratu, dan Purbolinggo) dan Kabupaten Lampung Tengah (Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Seputih Surabaya). Penyangga kawasan TNWK terdapat 37 desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan TNWK.

Kawasan TNWK berjarak ± 30 km ke arah Timur dari ibukota Kabupaten Lampung, Sukadana, dari ibukota Lampung Tengah, Gunung Sugih, berjarak ± 60 km ke arah Timur. Sedangkan dari ibukota Provinsi, Bandar Lampung berjarak ± 110 km ke arah Timur Laut. Lokasi TNWK mudah dicapai dari segala arah dengan fasilitas jalan dalam kondisi cukup baik. Dari pelabuhan penyeberangan Bakauheni dapat menempuh jalan nasional lintas timur Sumatera dengan rute Bakauheni-Labuhan Maringgai-Way Jepara-TNWK. Dari Bandar Lampung-Sribawono-Way Jepara-TNWK. Dari Gunung Sugih- Metro-Sukadana-TNWK. Sedangkan dari Manggala (dan Palembang) dapat menempuh rute jalan Nasional Lintas Timur Sumatera yaitu rute Manggala-Sukadana-TNWK.

<sup>2</sup> Parrot, S. and Andrew, P. 1996. An annotated checklist of the birds of Way Kambas National Park, Sumatra. Kukila 8: 57-85.

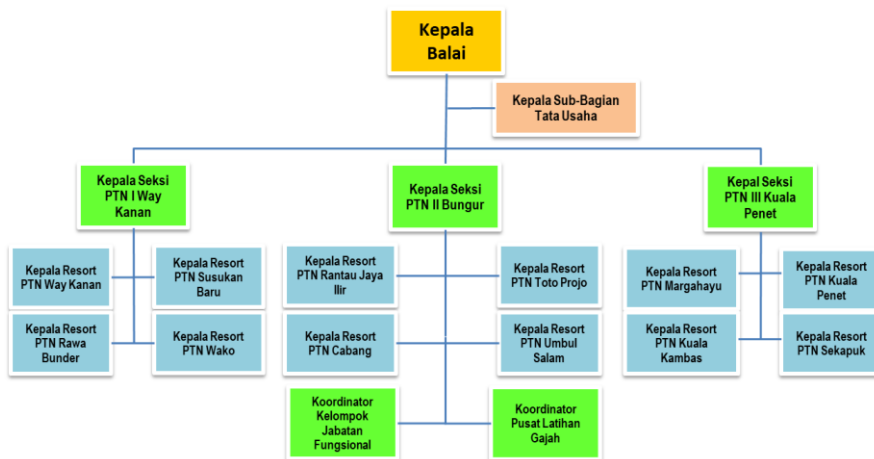
<sup>3</sup> Holmes, D.A. 1996. Sumatra Bird Report. Kukila 8: 9-56.

## 2.2. Kelembagaan Pengelolaan Kawasan

**Struktur.** Secara organisasi dan tata kerja, Balai TNWK dipimpin oleh seorang Kepala Balai, setingkat eselon IIIA, yang membawahi 4 setingkat eselon IV, yang terdiri dari<sup>4</sup>:

1. Sub-Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Way Kanan;
3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional WilayahII Bungur;
4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Kuala Penet;

Secara kewilayahan, kawasan Taman Nasional Way Kambas terbagi menjadi tiga wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) yang dikepalai oleh seorang Kepala Seksi, yaitu SPTN I Way Kanan, SPTN II Bungur, dan SPTN III Kuala Penet. Masing-masing SPTN membawahi beberapa Resor Pengelolaan Taman Nasional (RPTN), yang secara total berjumlah 12 resor (**Gambar 3**).<sup>5</sup>



**Gambar 3** Struktur organisasi pengelolaan Balai TNWK

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi taman nasional, yang meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan di taman nasional. Jabatan-jabatan tersebut yaitu Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan dan fungsional lainnya. Sub-bagian Tata Usaha bertugas memberikan dukungan manajemen yang berperan penting bagi keberhasilan pencapaian upaya konservasi di TNWK. Sub-bagian ini berperan dalam pengelolaan sumber daya manusia, sarpras, data & informasi, perencanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

<sup>5</sup> Surat Keputusan Kepala Balai No: SK.11/BTN.WK-I/2013 tentang Peta Kerja Balai Taman Nasional Way Kambas tanggal 22 Januari 2014

Selain kewilayahan, Balai TNWK memiliki unit pengelolaan fasilitas khusus untuk konservasi gajah, yaitu Pusat Latihan Gajah (PLG). Pusat ini dikepalai oleh seorang Koordinator, yang bertanggung jawab mengelola fungsi pengawetan, penelitian, dan pariwisata. Pada awalnya, PLG Way Kambas ditujukan untuk mengurangi konflik antara gajah dengan manusia. Para gajah yang ditangkap dari alam, dilatih untuk diberdayakan bagi kepentingan manusia, seperti menghalau gajah liar yang masuk ke wilayah aktivitas manusia, membantu pertanian, penelitian, dan pariwisata. Ke depan PLG ini mampu menjadi sebuah pusat usat konservasi gajah sumatera yang menghasilkan anakan yang dapat dilepasliarkan untuk meningkatkan populasi gajah sumatera di alam.

Untuk meningkatkan kinerja, Balai TNWK melakukan pengembangan organisasi dan tata kerja pada 2017 (TNWK 2018)<sup>6</sup>. Pengembangan tersebut, meliputi:<sup>7</sup>

1. Pembentukan Koordinator Urusan Kantor Balai, meliputi : a) Urusan Administrasi Tata Persuratan, b) Urusan Program, Anggaran dan Kerjasama, c) Urusan Kepegawaian, d) Urusan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan, e) Urusan Keuangan, f) Urusan Pengelolaan Data, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Perpustakaan dan Kehumasan, g) Urusan Pelayanan Perizinan, Promosi dan Pemasaran Wisata, h) Polhut Mobil, i) Penyuluh Kehutanan, j) Pengendali Ekosistem Hutan, k) Pusat Latihan Gajah.
2. Pembentukan Urusan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah, meliputi: a) Urusan Pemanfaatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Wilayah, dan b) Pawang
3. Pembentukan Resor Pengelolaan Taman Nasional, meliputi 12 resor pengelolaan taman nasional (RPTN), yaitu: 1) RPTN Way Kanan, 2) RPTN Rawa Bunder, 3) RPTN Susukan Baru, 4) RPTN Wako, 5) RPTN Toto Projo, 6) RPTN Rantau Jaya Iilir, 7) RPTN Umbul Salam, 8) RPTN Cabang, 9) RPTN Margahayu, 10) RPTN Kuala Penet, 11) RPTN Kuala Kambas, dan 12) RPTN Sekapuk.

**Sistem Zonasi.** Taman Nasional Way Kambas telah memiliki sistem zonasi pengelolaan berdasarkan derajat tingkat kepekaan ekologis terhadap intervensi pemanfaatan. Sistem zonasi ini secara berkala dikaji ulang dengan melihat dinamika kawasan dan satwa. Detil pembagian zonasi di TNWK berdasarkan penetapan pada tahun 2011<sup>8</sup>, yaitu:

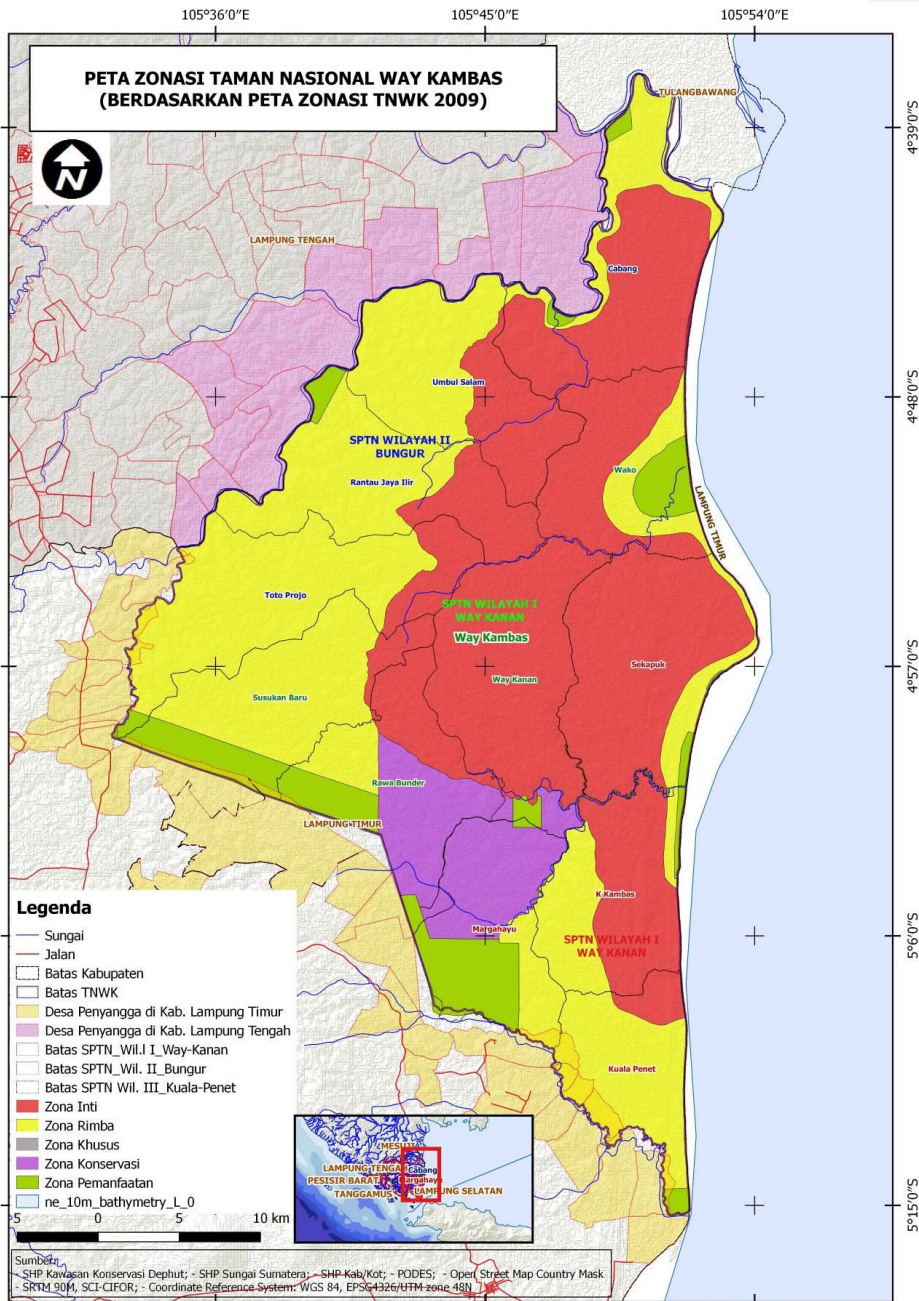
- 1) Zona inti (*core zone*): yaitu kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Zona inti TNWK sebagian besar terletak tengah kawasan seperti Ulung-ulung, Etekewer, Parmin, Sumpah Bincung, Hulu Rasau, Simpang Rajawali, Way Nibung, Camp Meranti, Keramat, Tanjung Tangis, Muara Way Seputih, Pelampung Merah, Ujung Central Wako, Way Batu, Sekopong, Kikuk, Terobosan Satu, Way Bungut, Pedamaran, Tanjung Bohong, Pasir Panjang, K Kerbau, Camp C dan tempuran Kali Batin. Total luas zona inti adalah 56.731,219 Ha (45,1 % dari total kawasan).

<sup>6</sup> Laporan Capaian Rencana Kerja Tahun 2017 Balai Taman Nasional Way Kambas

<sup>7</sup> Surat Keputusan Kepala Balai Nomor: SK.04/BTNWK-1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penempatan Jabatan Non Struktural Pegawai Negeri Sipil Balai TN. Way Kambas

<sup>8</sup> SK Dirjen PHKA No.SK. 121/IV-SET /2011 tgl 27 Juni 2011





**Gambar 4.** Peta sistem zonasi di Taman Nasional Way Kambas dan lokasi desa-desa yang berbatasan langsung

- 2) Zona Rimba (*wilderness zone*): adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Zona rimba TNWK terletak di wilayah Babagan Bambang, Sidodadi, Botol, Pasir Panjang sampai dengan Tanjung Bohong ke arah luar kawasan. Pedamaran, Way Bunut, Kuala Kambas, Sekapuk, Sekopong, Way Batu, Muara Wako, Cabang, Kertosono, Tutung, Hulu Rasau arah keluar, Parmin arah luar sampai dengan batas kawasan di sungai Pegadungan. Total luas area ini adalah 52.501,632 Ha (41,8 % dari total kawasan).
- 3) Zona Konservasi Khusus (*specific conservation zone*): adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya digunakan untuk kepentingan konservasi khusus satwa langka badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*). Zona konservasi khusus terdapat di Plang Ijo, Kali Batin, Way Kanan, sekitar Ulung-Ulung. Total luas area ini adalah 9.254,589 Ha (7.4% dari total kawasan).
- 4) Zona Pemanfaatan Intensif (*intensive use zone*): adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan jasa lingkungan lainnya. Zona pemanfaatan TNWK meliputi Plang Hijau dan sekitarnya sampai dengan Karang Sari (PLG), Resor Way Kanan termasuk dengan sungainya, Resor Kuala Kambas, Sekapuk, Wako Kali, Resor Cabang, Muara Rasau, Resor Penanggungan, Resor Susukan Baru dan Rawa Bunder. Total luas area ini adalah 7.133,293 Ha (5.7 % dari total area).
- 5) Zona Pemanfaatan Khusus (Tempat Pemakaman Umum/TPU): adalah bagian taman nasional yang karena secara turun-temurun telah dipergunakan untuk tempat pemakaman sebelum taman nasional berdiri. Zona khusus terletak di Susukan Baru, yang berbatasan dengan Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Total luas areanya adalah 0.5625 Ha (0.0004 % dari total kawasan).

**Profil Resor.** Berdasarkan Keputusan Kepala Balai No. SK.11/BTN.WK-I/2013, Taman Nasional Way Kambas memiliki tiga wilayah seksi pengelolaan yang dibagi dalam 12 resor. Masing-masing seksi dibagi dalam 4 resor. Kantor seksi wilayah I Way Kanan berkedudukan di Plang Ijo, sementara seksi wilayah II Bungur berkedudukan di Totoprojo, dan Seksi wilayah III Kuala Penet berada di Margahayu. TNWK membagi wilayah resor berdasarkan batas alam (sungai dan rawa). Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan teknis pengelolaan dan memperjelas penandaan di lapangan. SK Kepala Balai TNWK tahun 2013 merupakan perubahan dari SK Kepala Balai TNWK sebelumnya terkait dengan pembagian wilayah resor. Sebelumnya TNWK dibagi dalam sembilan resor dimana batas-batasnya mengikuti garis lintang dan bujur secara imajiner. Sembilan resor tersebut dianggap masih terlalu luas untuk wilayah pengelolaan resor. Keputusan Kepala Balai No. SK.11/BTN.WK-I/2013 juga mencantumkan desa-desa yang berbatasan dengan kawasan taman nasional, lokasi-lokasi yang dikenal umum, dan batas alam (**Tabel 2** dan **Gambar 5**).

**Tabel 2.** Pembagian resor, luas, dan cakupan wilayah pengelolaan

Seksi	Resor	Luas	Nama-nama lokasi yang secara lokal dikenal di wilayah resor
Seksi 1 Way Kanan	Rawa Bunder	9.824,47	PT. GGP PG4, Way Pies, Jembat Ireng, Camp Parmin, Camp 5000, Camp Macan Loncat, Camp etekewer, Ulung-Ulung, Way Kanan, Sekitar SRS, Way Negara Bathin, Labuhan Ratu IX, Rajabasa Lama I, Rajabasa Lama II
	Susukan Baru	10.363,68	Tambah Dadi, Mura Jaya, Rantau Jaya Udik II, Way Pies, Way Tulung Sula, Hulu Way Tidung, Camp Lembat, Camp Mentru, Simpang Andi, Simpang Tarsan, Kali Pasir
	Wako	8.788,98	Laut Jawa, Way Batu, Menara, Central Wako, Way Wako, Babakan Suren, Pinang Merah, Way Binang
	Way Kanan	12.254,2	Way Kanan, Ulung-ulung, Camp Etekeker, Camp Macan Loncat, Camp 5000, Hulu Way Wako, Central Wako, Camp Air Hitam, Simpang Tarsan, Camp Sore, Kali Biru, Post Kali Biru, Camp C, Satkorlak, Rawa Mistirius.
Seksi 2 Bungur	Cabang	12.228,97	Laut Jawa, Way Binang, Pinang Merah, Babakan Suren, Way Nibung, Way pegadungan, Rasau, Cabang, Way Seputih, Kramat, Lampung Meranti
	Rantau Jaya	10.609,4	Ugai, Kertosono, Simpang Rantau Panjang, Way Pegadungan, Rantau Jaya, Way Meranggi, Joharan, Kali Pasir, Camp Opu, Hulu Way Wako, Hulu Way Binang
	Toto Projo	12.984,21	Way Meranggi, Way Pegadungan, Pertigaan Way Sukadana, Bungur, Tanjung Tirta, Toto Projo, Tegal Ombo, Tanjung Kesuma, Tegal Yoso, Taman Fajar, Taman Endah, Tambah Dadi, Kali Pasir, Simpang Sartam, Simpang Andi, Camp Mentru, CampLembat, Camp Parmin, Hulu Way Wako, Camp Opu, Hulu Tidung, Gunung Kerikil
	Umbul Salam	10.460,75	Way Nibung, Way Bincung, Ugai, Way Pegadungan, Penanggungan, Sekuang
Seksi 3 Kuala Penet	Kuala Kambas	9.236,64	Laut Jawa Pedamaran, Jembat seling, Rawa Jambu, Babakan Bambang, Camp C, Pos Kalibiru, Way Kambas, Kuala Kambas.
	Kuala Penet	7.174,46	Kuala Penet, Karang Anyar, Braja Luhur, Braja Kencana, Braja Harjosari, Kedung Sih, Jembat Seling, Way Pedamaran, Margasari, Sukorahayu, Laut Jawa
	Margahayu	8.692,68	Labuhan Ratu VII, Labuhan Ratu VI, Way Negara Bathin, Sekitar SRS, Rawa Mistirius, Way Kanan, Satkorlak, Camp C, Babakan Bambang, Rawa Jambu, Kedung Sih, Braja Yekti, Braja Asri
	Sekapuk	13.002,63	Capangan, Camp D 1, Kali Biru, Tarsan, Camp Sore, Air Hitam, Murai, Camp Bari, Way Wako, Way Batu, Laut Jawa

Sumber: BukuProfil Resor TNWK-WCS, 2018

Formatted Table





Gambar 5. Peta kerja resor di TNWK

### 2.3. Kegiatan Pengelolaan TN Way Kambas

Secara struktur taman nasional merupakan salah satu Unit Pengelolaan Teknis (UPT) yang bertanggung jawab langsung dan berada di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). UPT taman nasional, termasuk TNWK, bertugas melaksanakan Kegiatan 'Pengelolaan Taman Nasional', sebagai bagian dari Program 'Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem' yang menjadi tanggung jawab dari Ditjen KSDAE.<sup>9</sup>

Perencanaan Balai TNWK telah dituangkan ke dalam dokumen:

- 1) Rencana Strategis 2015-2019 BTN Way Kambas (diterbitkan pada 2015), dan
- 2) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung 2017-2026 (diterbitkan pada 2016).

#### 1. Rencana Strategis 2015-2019 BTN Way Kambas

Rencana Strategis 2015-2019 BTN Way Kambas ini mengacu kepada Rencana Strategis KLHK 2015-2019, sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Ditjen KSDAE berperan dalam mewujudkan dua dari tiga sasaran strategis dari Rencana Strategis KLHK 2015-2019. Sasaran strategis itu yakni: (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).<sup>10</sup>

Indikator kinerja program dan kegiatan pencapaian sasaran strategis tersebut masing-masing yaitu: (1) besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam; serta (2) peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (*Management Effectiveness Tracking Tool* - METT) dan peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.

#### 2. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung 2017-2026

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Balai TNWK telah menyusun perencanaan jangka panjang untuk 10 tahun yang dituangkan di dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 2016 – 2026. Perencanaan ini telah mempertimbangkan peranan TNWK dalam kerangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Lampung Timur pada khususnya.

Di dalam visinya, Balai TNWK mempertimbangkan keberadaan tiga satwa kunci yang terancam punah yaitu harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), gajah sumatera

<sup>9</sup> Peraturan Dirjen KSDAE No. P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen KSDAE tahun 2015-2019

<sup>10</sup> Peraturan Dirjen KSDAE No. P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen KSDAE tahun 2015-2019

(*Elephas maximus sumatranus*) dan Pusat Latihan Gajah, badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis sumatrensis*) dan Suaka Rhino Sumatera. Visi yang berbunyi, "**Mewujudkan Kawasan Taman Nasional Way Kambas sebagai Habitat Ideal bagi Satwa Liar Sumatera yang Dilindungi**", mengarahkan pengelolaan TNKW yang berorientasi kepada pelestarian spesies-spesies tersebut beserta habitatnya, sebagai spesies payung (*umbrella species*). Spesies payung yaitu spesies yang membutuhkan kawasan yang sangat luas, sehingga perlindungan spesies tersebut menawarkan perlindungan terhadap spesies lain yang berbagi habitat yang sama.<sup>11</sup>

Pencapaian visi, dan misi dari Balai TNWK ini akan dicapai dengan beberapa program sebagai berikut, yang dikelompokkan ke dalam 3 prinsip konservasi, yaitu:

A. Program perlindungan:

- 1) Program perlindungan dan pengamanan kawasan TNWK
- 2) Program pengendalian kebakaran hutan dalam kawasan TNWK
- 3) Program sosialisasi/promosi konservasi
- 4) Program penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan kawasan TNWK

B. Program pengawetan:

- 5) Program Pembinaan Konservasi Kenakeragaman dan Ekosistemnya di TNWK
- 6) Program Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa asli (khususnya *flagship spesies*) TNWK

C. Program pemanfaatan:

- 7) Program penggalan potensi ekosistem kawasan TNWK untuk wisata alam/rekreasi lain dan jasa lingkungan
- 8) Program penggalan potensi jenis tumbuhan dan satwa untuk pemanfaatan ekonomi
- 9) Program pengelolaan yang professional Pusat Latihan Gajah (PLG) TNWK sebagai obyek wisata unggulan
- 10) Program pengembangan Suaka Rhino Sumatera (SRS) TNWK sebagai obyek wisata khusus unggulan
- 11) Program pengembangan paket-paket baru wisata alam dan jasa lingkungan
- 12) Pengembangan usaha ekonomi pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan
- 13) Program koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan TNWK dengan kebijakan pembangunan daerah
- 14) Program kolaborasi dengan masyarakat desa-desa di sekitar TNWK yang sinergis dan berkelanjutan
- 15) Program pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak menuju kemandirian TNWK

---

<sup>11</sup> Ozaki, Kenichi; Isono, Masahiro; Kawahara, Takayuki; Iida, Shigeo; Kudo, Takuma; Fukuyama, Kenji (2006). "A Mechanistic Approach to Evaluation of Umbrella Species as Conservation Surrogates". *Conservation Biology*. 20 (5): 1507–1515. doi:10.1111/j.1523-1739.2006.00444.x

Berdasarkan perencanaan di atas, di bawah ini beberapa program/kegiatan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas yang telah dan sedang dikerjakan oleh Balai TNWK baik secara mandiri maupun dengan melakukan kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

### 2.3.1. Penguatan Kelembagaan Balai TNWK

**METT.** Peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (*Management Effectiveness Tracking Tool* - METT) menjadi 70% merupakan salah satu Indeks Kinerja Kegiatan pengelolaan taman nasional. Sejak dilakukan penilaian METT pada tahun 2015, nilai METT dari TNWK mengalami peningkatan, walaupun masih di bawah target minimal 70% sebagai capaian IKK Ditjen KSDAE. Pada 2015, penilaian mandiri dilakukan oleh perwakilan staff TNWK mendapatkan nilai 65%. Pada penilaian kedua yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi Kawasan, Balai TNWK mendapat nilai 75%, sedangkan penilaian *multi-stakeholder* yang dilakukan pada 2017 mendapat nilai 69%.

Berdasarkan proporsi penilaian efektifitas kawasan pada 2017, aspek penilaian tentang *context* dari Balai TNWK memiliki nilai tertinggi, sedangkan aspek *process* mendapatkan nilai terendah. Secara lengkap nilai penilaian setiap aspek adalah sbb.: Context (100%), Planning (71%), Input (72%), Process (66%), Output (67%), dan Outcome (67%). Nilai aspek *context* 100% dalam penilaian pada 2017 tersebut didapatkan dari beberapa faktor seperti dijelaskan pada **Tabel 3**.

**Tabel 3.** Penjelasan penilaian METT pada aspek context 100% (2017)

Tanggapan	Langkah Perbaikan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah terjalin hubungan dengan PT Great Giant Pineapple Plantations Group 4 (PT GGP PG4) terkait penanggulangan konflik dgn memelihara kanal.</li> <li>- Menyambungkan antara objek wisata dalam kawasan dengan objek di PT GGP PG4 dengan melibatkan masyarakat.</li> <li>- Pembersihan jalur wisata dalam kawasan TN oleh PT GGP PG4.</li> <li>- Kanal dibangun oleh Pemkab untuk mengendalikan konflik satwa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat mekanisme kerjasama dengan PT GGP PG4 melalui penyusunan PKS (Perjanjian kerjasama) sesuai peraturan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring gajah dan harimau telah dilakukan. Dua Tahun terakhir telah dijumpai anakan harimau, gajah, dan badak. Gajah liar lahir di Tegalombo dan Braja Asri (2015). Data kematian satwa kunci (gajah: 4 tahun 2016/ 2017)</li> <li>- Belum melakukan penelitian tutupan lahan dari 1990 sampai sekarang, belum dilakukan estimasi jumlah populasi kunci, tetapi pada beberapa kamera trap dijumpai anakan spesies kunci.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring secara berkala spesies kunci pada site yang ditentukan.</li> <li>- Mengumpulkan data tutupan lahan secara series mulai tahun 1990.</li> </ul>

Formatted Table

**Pengelolaan Berbasis Resor (*Resort-Based Management – RBM*).** Prinsip ‘pemangkuan’ merupakan salah satu upaya baru pengelolaan kawasan konservasi, di mana UPT Balai taman nasional harus hadir dan bekerja di tingkat resor atau lapangan, dan mengenali kawasan dengan baik.<sup>12</sup> Paradigma pengelolaan ini menjadi kunci pengelolaan

<sup>12</sup> Wiratno (2018) Sepuluh cara baru kelola kawasan konservasi di Indonesia: Membangun ‘Organisasi Pembelajar’. Ditjen KSDAE, KLHK

di tingkat tapak atau dikenal Pengelolaan Berbasis Resor (RBM) yang dimulai sejak adanya Surat Edaran Dirjen PHKA No. 279/KKBHL/Juni /2011 di 50 taman nasional.

Seiring dengan waktu, kebijakan RBM mengalami perubahan karena tidak lagi masuk ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Renstra Ditjen KSDAE 2014-2019, yang sebelumnya masuk di dalam IKK dan Renstra KSDAE 2008-2013. RBM sebagai salah satu paradigma pengelolaan diganti dengan penilaian METT sebagai perangkat untuk penilaian efektifitas 260 KK di Indonesia. Pada 2013 dilakukan penilaian untuk evaluasi prakondisi dan implementasi *Resort-based Management* di Taman Nasional di Yogyakarta. Hasil dari pertemuan tersebut ditunjukkan pada **Tabel 4**.

**Tabel 4** Evaluasi prakondisi dan implementasi Resort-based Management di Taman Nasional

I. PRAKONDISI	II. IMPLEMENTASI
<b>A. Pembentukan Tim Kerja RBM UPT</b>	<b>A. Penetapan Wilayah Kerja Resor dilampiri Peta Kerja Bidang/Seksi Wilayah dan Resor</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala balai ttg Tim Kerja RBM</li> <li>2. Representasi unsur dalam tim kerja RBM (Resor, Bidang Wilayah/Seksi Wilayah, Bagian Tata Usaha (anggaran dan perlengkapan), Fungsional)</li> <li>3. Pembagian Tugas Tim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Penetapan Wilayah Kerja Resor</li> <li>2. Peta Kerja Wilayah Resor yang telah dicetak dengan ukuran skala yang memadai</li> <li>3. Penetapan Wilayah Kerja Resor didasarkan kajian tertulis tipologi (Kerawasan/tekanan kawasan, potensi, aksesibilitas, administrasi, topografi dsb) masing2 Resor</li> <li>4. Informasi (jalan, sungai, bangunan, permasalahan, potensi, landuse) dalam Peta Resor tertuang dalam legenda peta</li> </ol>
<b>B. Penyusunan Rencana Pengelolaan Berbasis Resor</b>	<b>B. Pembangunan Kelembagaan Resor</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Perencanaan RBM</li> <li>2. Proses Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Berbasis Resor</li> <li>3. SK Kepala Balai ttg Penempatan personil</li> <li>4. Ketersediaan Kantor Resor atau Pondok kerja yang difungsikan sebagai kantor Resor</li> <li>5. Ketersediaan dan Distribusi Sarana Alat Transportasi</li> <li>6. Ketersediaan dan distribusi Alat Kerja minimal Resor (<i>GPS, Peta Kerja dan Kamera Digital</i>)</li> <li>7. Perencanaan Anggaran Implementasi RBM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Tugas Minimal Resor</li> <li>2. Peningkatan kualitas (pengetahuan dan ketrampilan) petugas Resor (diadakan Balai maupun pengiriman)</li> <li>3. Jumlah rata-rata personil masing2 Resor</li> <li>4. Dukungan (distribusi) anggaran kegiatan di tingkat Resor per tahun (2011)</li> <li>5. Terimplementasinya distribusi sarpras kerja minimal Resor</li> </ol>
<b>C. Pengelolaan Informasi</b>	<b>C. Pengelolaan Informasi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya aplikasi SIM RBM UPT</li> <li>2. SK Kepala balai tentang pengelola SIM RBM UPT</li> <li>3. Adanya protokol data dari Resor ke Balai</li> <li>4. Tersedianya <i>tally sheet</i> yang digunakan untuk kebutuhan <i>collecting data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan Data</li> <li>2. Keakuratan data</li> <li>3. Ketepatan waktu dan kontinuitas aliran data</li> <li>4. Analisa data</li> <li>5. Penggunaan data sebagai bahan perencanaan dan kebijakan</li> </ol>
	<b>D. Evaluasi</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan evaluasi secara reguler implementasi RBM</li> <li>2. Penggunaan hasil evaluasi sebagai umpan balik dalam perencanaan ke depan</li> </ol>

Formatted Table

Dari kriteria di atas dilakukan penilaian berdasarkan capaian prakondisi dan implementasi pengelolaan RBM tersaji pada **Tabel 5**.

**Tabel 5** Capaian Implementasi Pengelolaan kawasan Berbasis Resor

Prakondisi	Skor	Implementasi	Skor
Mendukung	> 90	Intensif	> 90
Cukup Mendukung	70-90	Cukup Intensif	70-90
Kurang Mendukung	<70	Kurang Intensif	<70

Formatted Table

Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan hasil Evaluasi Prakondisi dan Implementasi RBM di Taman Nasional. Rumusan tersebut menghasilkan 4 kategori rencana tindak terhadap prakondisi dan implementasi RBM di Taman Nasional yaitu:

- (1) **Pengembangan** ditujukan kepada UPT yang tahap prakondisinya mendukung dan implementasinya intensif
- (2) **Pemantapan** ditujukan kepada UPT yang tahap prakondisinya mendukung/cukup mendukung dan implementasinya intensif/cukup intensif
- (3) **Pendampingan** ditujukan kepada UPT yang tahap prakondisinya cukup mendukung dan implementasinya cukup intensif
- (4) **Pembinaan** ditujukan kepada UPT yang tahap prakondisinya kurang/cukup mendukung dan implementasinya cukup/kurang intensif

Menurut kategori tersebut di atas Balai TNWK termasuk ke dalam klasifikasi prakondisi "Cukup Mendukung", sedangkan klasifikasi implementasinya "Cukup Intensif", sehingga perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut. Bagi TNWK RBM masih belum berkembang. Tetapi penilaian awal yang masuk kategori pendampingan tidak diteruskan lagi oleh tim nasional untuk pendampingan. Pada 2015, dengan dukungan mitra WCS, kegiatan RBM dimulai dengan pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan penulisan seluruh profil resor lewat perangkat SMART.

### 2.3.2. Perlindungan Spesies, Kawasan dan Penegakan Hukum

**SMART Patrol.** Karena letaknya yang berbatasan langsung dengan 37 desa-desa penyangga sehingga akses masuk ke kawasan relatif mudah, TNWK tidak terlepas dari tantangan seperti perburuan dan perdagangan satwa, konflik satwa-manusia, kebakaran hutan, dan penebangan liar. Balai TNWK yang didukung oleh mitra LSM dan Masyarakat Mitra Polhut telah melakukan kegiatan rutin patroli pengamanan kawasan dan penegakan hukum. Mitra LSM yang aktif melakukan kegiatan ini yaitu YABI dengan program Rhino Protection Unit (RPU) dan Intelligence and Law Enforcement Unit (ILEU), WCS-IP dengan program Wildlife Response Unit, PKHS dan Alert. Selain itu Balai TNWK juga membentuk unit pengamanan swakarsa yang bernama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang awalnya diinisiasi untuk pengamanan konflik gajah-manusia. MMP berasal dari 22 desa dengan jumlah sekitar 220 orang, yang mendapat tunjangan kerja sebesar Rp 250,000 per bulan. Anggaran untuk MMP ini berasal dari APBN.

Program perlindungan badak dilaksanakan dengan membentuk dan mengoperasikan unit anti perburuan badak atau *Rhino Protection Unit* (RPU), yang didukung oleh



*Intelligence and Law Enforcement Unit (ILEU)* sebagai unit intelejen untuk mendeteksi potensi perburuan dan tindak pidana kehutanan lainnya. Program ini sekarang di bawah koordinasi Balai TNWK dan YABI yang didukung oleh pendanaan internasional dan nasional untuk perlindungan badak. Dimulai pada 1996 dengan 2 tim RPU, kini menjadi 9 tim sejak 2007. Komposisi tim patroli rata-rata 4-5 orang. Tim dipimpin seorang Polisi Hutan, beranggotakan Polhut, pendamping dari mitra, dan anggota Masyarakat Mitra Polhut. Kegiatan yang dilakukan di TNWK yaitu patroli pengamanan dan membantu penegakan hukum, monitoring populasi, dan edukasi kepada sekolah dan masyarakat di desa-desa penyangga, terutama di daerah sebelah utara.

Walaupun perburuan khusus terhadap badak hampir tidak ada, tetapi kasus dan potensi ancaman dari perburuan masih cukup tinggi. Hal ini diindikasikan terhadap meningkatnya jumlah temuan jerat untuk mamalia besar, seiring meningkatnya frekuensi patroli yang dilakukan. Pada 2017, 11 kasus perburuan satwa dan pemancingan ilegal dilaporkan. Pada 12 Februari 2018, tim RPU di SPTN 3 Margahayu menemukan bangkai gajah, gigi dan caling. Sebelumnya pada 2015 gading gajah sudah ditemukan menjadi cangklong yang siap diedarkan. Dari catatan RPU, peredaran bagian satwa terjadi untuk skala domestik dan internasional.

Untuk penegakan hukum, Polhut Balai TNWK dan RPU melakukan pendampingan terhadap penegak hukum dalam pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan peningkatan pengetahuan tindak pidana satwa. Tingkat koordinasi penanganan kasus tindak pidana di tingkat Polres dan Polda cenderung meningkat setelah ada pendampingan. Kasus perburuan liar menjadi perhatian setelah Kapolda Lampung mengeluarkan himbauan peningkatan penanganan kasus perdagangan satwa liar pada 2017. Selain itu respon Polres Lampung Timur lebih tinggi dibanding Lampung Tengah. Sosialisasi dan peningkatan pengetahuan hukum pidana untuk kasus satwa liar perlu ditingkatkan lagi.

Program Konservasi Harimau Sumatra (PKHS) merupakan program kerja sama Balai TNWK, Ditjen PHPA (waktu itu), The Tiger Foundation (TTF), Canada dan The Sumatran Tiger Trust, UK. Program ini dimulai di TNWK sejak 1995 – 1999. Seperti RPU, PKHS membentuk Tiger Protection Unit (TPU) sejumlah 2 unit yang kemudian bergabung dengan RPU. Kegiatan PKHS meliputi kegiatan perlindungan, riset dan monitoring, dan kampanye pendidikan konservasi kepada publik.

*Wildlife Conservation Society* menginisiasi sebuah *tools* untuk meningkatkan kualitas patroli pengamanan kawasan dan penegakan hukum yang diberi nama *Spatial Monitoring and Reporting Tools* (SMART). SMART pertama kali diujicobakan di Thailand, dan diterapkan di TNWK pada awal 2016. SMART berfungsi untuk membuat perencanaan, mendokumentasikan, mengelola data, menganalisis, hingga melaporkan hasil analisis data yang dikumpulkan di tingkat tapak, sebagai masukan bagi pihak pengelola di tingkat lapangan dan balai. Data yang dikumpulkan yaitu data keanekaragaman hayati, data patroli atau data ancaman, dan tindakan intervensi manajemen di lapangan. Tiga pendekatan utama *tools* ini adalah: *software*, peningkatan kapasitas, dan standar berbasis perlindungan kawasan.

Saat ini di TNWK, pengembangan sistem informasi manajemen (*software*) dan peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan data sedang dilakukan oleh Balai TNWK dan WCS-IP. Sementara itu kebutuhan peningkatan kapasitas untuk analisis seperti pemetaan

kerawanan yang diakibatkan oleh tindak pidana kehutanan masih harus dilakukan. Selain itu, pembuatan SOP untuk membangun mekanisme yang terintegrasi dan efektif di antara para mitra yang bergerak dalam perlindungan kawasan dan penegakan hukum juga perlu dibentuk.

**Camp Elephant Response Unit (ERU).** Konflik gajah dan manusia, yang umumnya terjadi di lahan budidaya khususnya yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, di TNWK cukup tinggi. Untuk memitigasi konflik ini, Balai TNWK dan Veterinary Society for Sumatran Wildlife Community (Vesswic) berinisiatif memberdayakan gajah-gajah dari PLG yang telah dijinakkan (*captive*) dan mahout (pawang gajah) yang dimulai pada 2008. Pada akhir 2010, Camp ERU pertama di Bungur berdiri, disusul Camp ERU di Tegal Yoso (2013), di Margahayu (2014), dan terbaru di Braja Harjosari (2018). LSM Komunitas untuk Hutan Sumatra (KHS) mulai bergabung mendukung ERU pada 2016. Dengan berkembangnya ERU menjadi 4 lokasi, maka aspek kelembagaannya harus mulai dibenahi. Hal ini terkait dengan adanya jumlah gajah yang didayagunakan di Camp ERU, mahout, dan staf terkait lainnya.

Cara kerja ERU bersifat partisipatif dengan masyarakat umum dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) Gajah yang berjumlah masing-masing 10 orang di 22 desa penyangga. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari arus informasi pergerakan gajah dan penggiringan bersama. Secara umum fungsi ERU yaitu untuk patroli untuk pemantauan, dan penggiringan gajah liar, dan penjagaan untuk mencegah gajah liar ke luar kawasan.

### 2.3.3. Pengawetan Flora Dan Fauna

Pengawetan flora dan fauna dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk spesies prioritas, dan pembentukan fasilitas dan/atau kawasan khusus untuk konservasi gajah melalui PLG dan badak melalui SRS.

**TERMA.** Pemerintah melalui pertemuan trilateral antara BAPPENAS, Ditjen PHKA, dan Kementerian Keuangan pada 2015 telah menetapkan 25 spesies terancam punah yang menjadi prioritas untuk peningkatan populasi sebesar 10% pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (RPJM 2015-2019).<sup>13</sup> Balai TNWK, karena pertimbangan kemandapan *baseline* data spesies (2013-2014), menetapkan spesies gajah sumatera, badak sumatera, dan harimau sumatra sebagai spesies prioritas. *Baseline* data populasi untuk masing-masing spesies tersebut adalah 39 individu, 10 individu, dan 9 individu.

Untuk tujuan tersebut, Balai TNWK menerapkan pengelolaan intensif untuk spesies prioritas (*site monitoring*), yang disebut *Tiger, Elephant, Rhino Monitoring Area* (TERMA) seluas 169 km<sup>2</sup> sejak 2015. TERMA ini merupakan pengembangan dari *Tiger Intensive Management Area* (TIMA) yang diinisiasi oleh The Tiger Foundation (TTF) melalui Program Konservasi Harimau Sumatera (PKHS). Luasan *site monitoring* tersebut yaitu spesies gajah sumatera, badak sumatera, dan harimau sumatera. Kegiatan yang meliputi survey dan monitoring spesies, serta pengamanan habitat dilakukan oleh Balai TNWK sebagai upaya pencapaian IKU/IKK dari Direktorat KKH untuk pencapaian peningkatan populasi 10% bagi ketiga spesies prioritas tersebut.

<sup>13</sup> SK Dirjen KSDA No. 180/2015 tentang Dua puluh lima satwa terancam punah prioritas untuk ditingkatkan populasinya sebesar 10% pada tahun 2015-2019.



Kegiatan monitoring spesies ini didukung oleh beberapa mitra LSM terkait yang sekaligus melakukan kegiatan patroli pengamanan kawasan yaitu PKHS, RPU/YABI, WCS, dan Vesswic.<sup>14</sup> Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi monitoring, maka perlu dilakukan koordinasi dan mekanisme kerja sama seperti aspek tema penelitian, metodologi, dan manajemen *data sharing*.

**Pusat Latihan Gajah (PLG).** Pembangunan fasilitas Pusat Latihan Gajah (PLG) yang didirikan pada 1985, ditujukan untuk mengurangi konflik antara gajah dengan manusia. Pembukaan lahan untuk pemukiman dan perkebunan sebagai imbas dari program transmigrasi penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera pada tahun 1980-an telah banyak merusak habitat gajah. Perlindungan dan pelestarian berkaitan erat dengan kegiatan konservasi yang dilakukan terhadap satwa gajah. Sementara aspek pemanfaatan salah satunya ditujukan untuk kegiatan penelitian dan pariwisata.

Sampai Juli 2018, PLG memiliki 42 ekor gajah, dan 25 ekor yang dititipkan di Camp ERU, yang diurus oleh 66 petugas yang terdiri dari dua orang dokter gajah, empat orang paramedis, mahout, dan MMP. Saat ini PLG sudah dilengkapi Rumah Sakit Gajah bernama RS Prof. Dr. Ir. Rubini Atmawidjaja yang diresmikan pada 5 November 2016. Rumah Sakit ini dilengkapi dengan sarana perawatan, pengobatan, pencegahan penyakit, dan rehabilitasi, baik gajah jinak binaan PLG maupun gajah liar. Ke depan, Rumah Sakit ini diproyeksikan untuk menangani satwa liar lainnya, terutama untuk satwa prioritas. Untuk pengembangan pariwisata dapat dilihat di sub-bab 2.3.5 Pengembangan Wisata Alam.

**Suaka Rhino Sumatra atau *Sumatran Rhino Sanctuary (SRS)*.** SRS dibangun pada 1996 sebagai tindak lanjut dari analisis *Population and Habitat Viability Analysis (PHVA)* untuk penyelamatan badak sumatera secara semi-insitu. SRS didirikan oleh Departemen Kehutanan melalui Direktorat Jenderal PHPA, pada waktu itu, bekerja sama dengan Yayasan Mitra Rhino/YMR, yang saat ini berubah menjadi Yayasan Badak Indonesia (YABI). Alokasi lahan SRS mencakup 100 hektar, yang terbagi menjadi 10 petak dikelilingi oleh pagar beraliran listrik untuk mencegah gangguan satwa liar atau untuk mengamankan badak yang ada di dalam kawasan. Fasilitas SRS ini bertujuan untuk perlindungan dan pengawetan (reproduksi), penelitian, dan pendidikan.

Pada 1998, SRS mulai menerima badak pertama. Program reproduksi dianggap berhasil, karena menghasilkan anakan masing-masing satu ekor pada 2012 dan 2016. Saat ini, fasilitas ini menampung 7 badak sumatera, yang terdiri dari 4 betina dan 3 jantan. Ke 7 individu itu diberi nama Bina, Harapan, Ratu, Rosa, Andalas, serta anakan yaitu Andatu dan Delilah. Anakan tersebut diharapkan mampu bertahan hidup dan berkembang biak di alam liar.

Walaupun semi liar, perawatan dilakukan setiap hari oleh beberapa petugas khusus yang memberikan makanan, memandikan dan mengamati. Beberapa dokter hewan bertugas untuk melakukan perawatan medis jika diperlukan, dan penelitian untuk melihat perilaku, kesuburan dan sejenisnya. Pakan badak, saat ini dipasok dari dalam kawasan TNWK, dan dari pembelian dari masyarakat yang mulai menanam sekitar 10 jenis tumbuhan pakan. Pakan tambahan seperti buah-buahan dibeli dari pasar lokal.

<sup>14</sup> SK Kepala Balai TNWK No. SK.13/BTN.WK-1/2015 tentang Penetapan site monitoring populasi Gajah sumatra, Badak Sumatra, dan Harimau Sumatra

SRS berfungsi juga sebagai lokasi wisata terbatas, pusat komunikasi dan pendidikan bagi anak-anak sekolah, penduduk sekitar, dan wisatawan. Fasilitas yang tersedia di SRS Way Kambas yaitu *visitor center*, MCK, dan Wisma tamu. Hasil dari pariwisata digunakan untuk perlindungan badak dan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Karena program reproduksi dianggap berhasil, Balai TNWK dan YABI/SRS dengan didukung the International Rhino Foundation telah membuat perencanaan untuk memperluas alokasi lahan kelola SRS dan sarana pendukungnya sehingga mampu menampung 10 sampai 15 individu atau lebih kurang dua kali dari kapasitas saat ini. Dalam jangka panjang, SRS akan menjadi pusat *sanctuary* yang menerima badak sumatera dari seluruh kawasan Sumatra lainnya. Penambahan alokasi lahan ini juga akan menambah kapasitas wisata terbatas dan kebutuhan pasokan pakan yang dapat dikerjasamakan dengan masyarakat.

#### 2.3.4. Pemulihan Ekosistem

Luas tutupan hutan di TNWK cenderung menurun, yang diindikasikan dengan peningkatan luas padang alang-alang yang mencapai 33% dari luas total TNWK. Hal ini disebabkan oleh berulangnya kejadian kebakaran hutan di dalam kawasan dan bekas perambahan (Amalina et al. 2016). Untuk mengatasi masalah tersebut, Balai TNWK telah menyusun Rencana Pemulihan Ekosistem di TNWK. Namun, saat ini belum ada zona rehabilitasi yang ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan review zonasi untuk menerapkan perencanaan pemulihan ekosistem di TNWK.



**Gambar 6** Lahan kritis yang tercipta sehabis kebakaran hutan dan ditumbuhi alang-alang

Dari hasil identifikasi Balai TNWK dan Alert, setidaknya ada 3 resor yang rawan kebakaran dan area bekas perambahan yang dapat diprioritaskan untuk perencanaan pemulihan ekosistem yaitu di Resor Susukan Baru, Rawa Bunder, Kuala Penet, dan Toto Projo. Dengan dukungan TFCA Konsorsium Alert, Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera

(PKHS), Jurusan Biologi Universitas Lampung, Forum Rembug Desa Penyangga (FRDP), Sajogyo Institute (SAINS), Yayasan Silvagama, Saka Wana Bakti Way Kambas, Save Indonesian Endangered Species (SIES) melakukan pemulihan ekosistem di Resor Susukan Baru dan Bambang.

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Balai TNWK, bekerja sama dengan YABI-RPU dan Jurusan Biologi UNILA, Alert dan masyarakat di wilayah kelola Restorasi Rawa Kijang SPTN Wilayah III Kuala Penet. Dari 200 jenis pohon yang ditanam terdapat 3 jenis pohon yang menjadi pakan badak yaitu medang (*Phoebe hainanensis*), puspa (*Schima wallichii*), dan pulai (*Alstonia scholaris*). Selain untuk merestorasi kawasan kegiatan ini juga untuk menambah koleksi pakan badak sumatera.

### 2.3.5. Pengembangan Wisata Alam

Meningkatnya jumlah penerimaan devisa negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta jumlah pengunjung ke tempat wisata alam merupakan salah satu IKK pencapaian sasaran strategis dari Ditjen KSDAE melalui kegiatan pengelolaan taman nasional.

Realisasi pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Taman Nasional Way Kambas dari kunjungan wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun. Target PNBP Balai TNWK yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada 2016 dan 2017 sebesar Rp250 juta per tahun. Pada 2016, TNWK mencatat PNBP sebesar Rp 811 juta, dan meningkat pada 2017 sebesar Rp900 juta. Peningkatan pendapatan ini didapat melalui promosi yang gencar dilakukan baik oleh pihak Balai TNWK maupun Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Hal ini terutama setelah digelar Festival Way Kambas secara regular sejak 2000. Selain itu pengunjung banyak terjadi pada libur hari-hari besar nasional seperti libur tahun baru dan hari raya keagamaan dengan tujuan utama PLG.

Festival Wisata Way Kambas 2017 digelar selama tiga hari mulai tanggal 11/11 hingga 13/11, dengan 20 rangkaian acara digelar selama pelaksanaan festival wisata di kawasan konservasi tersebut untuk menyemarakkan dan menyedot kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lampung Timur. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Timur mencatat selama pelaksanaan Festival Way Kambas 2017 total kunjungan wisatawan baik lokal dan asing sebanyak 129. 921 orang dari target yang diperkirakan 120 ribu kunjungan. Penyerapan pedagang sebanyak 621 pedagang dan menyerap tenaga kerja masyarakat setempat sebanyak 526 orang.<sup>15</sup>

Selain promosi lewat media sosial, faktor penunjang keberhasilan pencapaian pendapatan itu adalah peningkatan sarana dan prasarana wisata bagi wisatawan di kawasan Pusat Latihan Gajah yang dibangun oleh Pemkab Lampung Timur seperti sarana MCK, kios-kios pedagang, area bermain anak, trek pejalan kaki untuk melindungi pengunjung dari terik matahari dan beberapa gazebo tempat bersantai keluarga. Dukungan juga diberikan oleh Pemprov Lampung yang sedang dan telah melakukan perbaikan infrastruktur jalan menuju ke arah TNWK.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Balai TNWK (2018) dan Antara Lampung (2017) Realisasi Pendapatan Way Kambas Capai 300 Persen. Edisi 17 November 2017

**Pengembangan Wisata Alam.** Untuk mendukung pemanfaatan pariwisata alam di kawasan TNWK, melalui optimalisasi ini, Balai TNWK memperkuat urusan pelayanan perizinan, promosi dan pemasaran wisata. Di samping itu Balai sudah melakukan kajian dan model perencanaan pengembangan kawasan melalui penyusunan desain tapak wisata alam di tiga titik yaitu PLG, resor Way Kanan, dan Plang Ijo di resor Rawa Bunder.

Penyusunan desain tapak merupakan pembagian ruang pengelolaan pariwisata alam di zona/blok pemanfaatan dan zona/blok perlindungan/rimba/bahari yang diperuntukkan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata alam (Perdirjen No. P.5/IV-SET/2015). Pemanfaatan ini dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.<sup>16</sup> Dokumen desain tapak di tiga lokasi sudah dibuat pada 2015, yang akan dilanjutkan dengan penyusunan *Detailed Engineering Design (DED)*, yaitu:

- Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Zona Pemanfaatan Pusat Latihan Gajah, Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung (2015). Dokumen ini merekomendasikan konsep pengembangan wisata 'ekowisata di habitat gajah', dimana pengusahaan wisata di Zona Pemanfaatan di PLG harus mengoptimalkan fungsi habitat untuk rekreasi dan wisata dengan memperhatikan fungsi ekologi, fungsi sosial ekonomi, dan fungsi sosial budaya.

Di PLG, paling tidak terdapat 5 lokasi penting yang dapat menjadi andalan dalam pengembangan ekowisata di PLG yaitu kandang gajah, kolam pemandian gajah, padang savana, hutan dataran rendah dan rawa. Total alokasi lahan untuk desain tapak untuk pariwisata alam mencakup seluruh kawasan pada zona pemanfaatan PLG dengan luas keseluruhan 2.030 Ha. Luasan ini dibagi ke dalam Ruang Publik dengan luas 1.994 Ha dan Ruang Usaha dengan luas 36 Ha. Ruang publik diplotkan pada areal tapak yang memiliki potensi wisata ke lima tema habitat yaitu taman hutan, taman savana, taman rawa, taman kolam dan taman kandang) yang sudah dikonsepsikan pada bab sebelumnya. Pada ruang usaha dapat dibangun berbagai akomodasi, dan fasilitas serta pelayanan untuk usaha wisata.

- Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Zona Pemanfaatan RPTN Way Kanan, SPTN 1 Way Kanan Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung (2015). Zona pemanfaatan di Resor Way Kanan berdampingan dengan Zona Inti dan Zona Konservasi Khusus. Oleh karena itu desain wisata terbatas harus mempertimbangkan kesinambungan fungsi ekologi. Pada desain tapak ini, Zona Pemanfaatan Resor Way Kanan dialokasikan seluas ± 400 ha, yang dibagi menjadi ruang publik yang diplotkan pada areal dengan luas ± 337 ha dan ruang usaha yang diplotkan di sepanjang riparian Sungai Way Kanan seluas ± 63 ha.
- Desain Tapak Wisata Alam di Plang Ijo (2015). Kawasan Plang Ijo, yang terletak di wilayah kerja Resor Rawa Bunder, merupakan pintu gerbang menuju kawasan TNWK baik ke kawasan wisata terbatas di Resor Way Kanan maupun ke Pusat Latihan Gajah. Plang Ijo yang terletak di Desa Labuhan Ratu IX, berdekatan dengan Desa Labuhan Ratu VI dan Desa Labuhan Ratu VII. Desain tapak merekomendasikan alokasi ruang usaha di Plang Ijo – Way Kanan terletak setelah Hutan Pendidikan Lingkungan seluas 12.80 hektar, dan daerah Plang Ijo – Margahayu di daerah ex rehabilitasi JICA terdapat areal yang agak terbuka seluas 1.5 hektar. Aktivitas yang dapat dilakukan di Plang Ijo antara lain berkemah dan

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Balai dan staf terkait (2018)

pendidikan lingkungan luar sekolah, karena berdekatan dengan areal *camping ground* dan Hutan Pendidikan Lingkungan. Kegiatan lainnya yaitu wisata petualangan dan wisata pendidikan melalui melakukan *jungle tracking* untuk mengamati dan mempelajari flora dan fauna di dalam hutan.

### 2.3.6. Pemberdayaan Masyarakat

Secara kelembagaan, Balai TNWK telah meningkatkan jumlah tenaga penyuluh kehutanan dari 2 orang menjadi 7 staf, dan membuat Rencana Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas Periode 2016 – 2025. Penambahan tenaga penyuluh merupakan hasil *impassing* dari tenaga kelompok jabatan lain pada TA 2018 ini. Surat Keputusan sudah ditandatangani oleh Kepala Balai, yang biasanya dilanjutkan dengan mengikuti training di Pusdiklat di Rumpin, Bogor.<sup>17</sup>

Rencana Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga memuat rencana aksi dan penetapan desa prioritas dalam pengembangan daerah penyangga oleh TNWK, dalam periode 2016 – 2025. Rencana Pemberdayaan ini menganalisis beberapa desa dari 38 desa penyangga yang ada, yang akan menjadi desa prioritas berdasarkan beberapa kriteria. Desa yang terpilih menjadi desa prioritas yaitu: a) Rantau Jaya Udik II dimana pada tahun 2015 memiliki angka kebakaran tertinggi dibanding desa-desa yang lain, dan b) Braja Harjosari, yang memiliki potensi ekowisata yang baik, kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan kerbau yang relatif lebih maju dibanding desa lainnya.

Di Rantau Jaya Udik II, Balai TNWK kegiatan inisiasi pembentukan Kelompok Tani Hutan untuk pengembangan lebah madu, sedangkan di Braja Harjosari melakukan pendampingan peningkatan kapasitas dan prasarana pengelolaan wisata desa. Tim CMP melakukan survey dan penilaian singkat di kedua desa prioritas dari Balai TNWK tersebut yang hasilnya disampaikan di sub-bab selanjutnya. Selain itu juga Tim melakukan analisis pengembangan regional berbasis desa untuk menilai potensi desa penyangga lainnya yang layak untuk dikembangkan selanjutnya, setelah kedua desa prioritas tersebut. Desa penyangga yang diliput yaitu 35 (dari 38) desa penyangga di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah berdasarkan keberadaan data pendukung.

Penambahan tenaga penyuluh dan perencanaan pemberdayaan masyarakat ini menggambarkan perencanaan Balai TNWK yang lebih terbuka ke luar (*outward-looking*) untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di desa-desa penyangga. Peningkatan kelembagaan ini diiringi dengan adanya kebutuhan untuk penguatan pengetahuan dan keterampilan tentang metode dan pendekatan pendampingan masyarakat, pelatihan *Participatory Rural Appraisal*, dan mitigasi konflik.

Selain kegiatan Balai TNWK, beberapa mitra LSM juga aktif melakukan pendampingan, di antaranya Konsorsium YABI, WCS dan Yayasan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA), dan Konsorsium Alert dan Universitas Lampung melalui dukungan program USAID – Tropical Forest Conservation Action (TFCA).<sup>18</sup> Konsorsium YABI, WCS dan YAPEKA menjalankan program pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi lingkungan

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> TNWK (2016) Rencana Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas Periode 2016 – 2025

di sekitar desa. Kegiatan yang dilakukan yaitu demplot, budi daya dan pembentukan kelompok wisata, kerajinan, pertanian alami, perikanan, dan pengenalan penerapan teknologi tepat guna untuk pembuatan biogas, pupuk dan pestisida. Desa yang difasilitasi yaitu Desa Labuan Ratu 7 dan Labuan Ratu 9 di Kecamatan Labuhan Ratu dan Desa Braja Yekti, Kecamatan Braja Selehah.

Konsorsium Universitas Lampung dan Alert melakukan pembentukan desa wisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelolanya di Desa Braja Harjosari dan pembangunan rumah konservasi di Dusun Margahayu. Program pengembangan ekowisata dimulai dari pelatihan *guide*, pelayanan, interpretasi, *homestay* dan paket wisata. Rumah konservasi saat ini lebih difungsikan sebagai pusat kegiatan masyarakat, seperti pertemuan rutin Kelompok WAna Tani (KWT) Margahayu Jaya untuk kegiatan pelatihan dan arisan. Sementara itu lahannya di manfaatkan untuk budi daya tanaman hortikultura yang dikelola oleh kelompok.

#### 2.3.6.1 Desa Braja Harjosari

Desa Braja Harjosari merupakan desa pusat pemerintahan Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur. Desa ini berasal dari pembukaan jawatan transmigrasi Lampung pada tahun 1958. Luasan dari desa ini ada 1.075 ha, desa ini dibagi menjadi delapan dusun. Lahan pertanian sawah 439,75 ha pertanian non sawah 296 ha, non pertanian 339,25 ha.

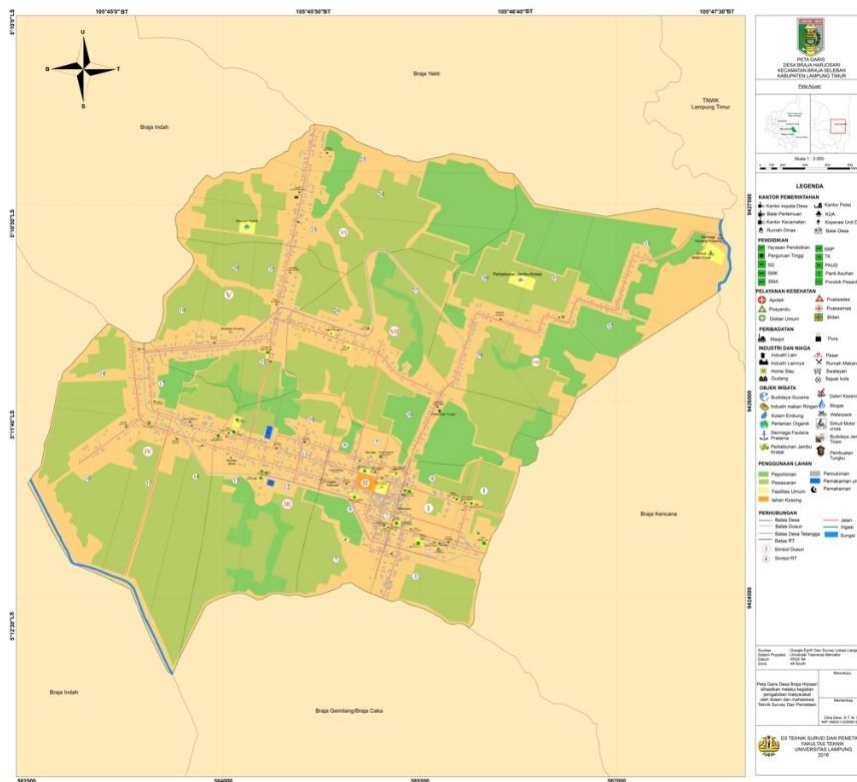
Sebagian besar pendapatan masyarakat desa ini sebagai petani, peternak, dan pedagang. Hasil utama dari sektor pertanian di desa ini adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang kedelai, dan kacang tanah, sedangkan di bidang peternakan yaitu peternak sapi, kambing, dan ayam. Karena letaknya yang berada di ibu kota kecamatan Selehah serta menjadi pusat perdagangan dan perbelanjaan masyarakat kecamatan Selehah, banyak juga masyarakat desa ini yang menjadi pedagang dan usaha rumah tangga (pembuatan kerupuk singkong). Selain dari sektor pertanian, sektor peternakan juga menjadi penopang bagi masyarakat Desa Braja Harjosari terutama ternak ayam dan sapi. Jumlah ternak sapi potong 889, kerbau 55, kambing 972, babi 40, ayam kampung 2100, itik 500 (Kecamatan Braja Selehah dalam angka 2017).

Batas wilayah sebelah utara adalah Desa Braja Yekti dan TNWK, sebelah selatan Desa Braja Gemilang/Braja Caka, sebelah barat adalah Desa Braja Indah, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Braja Kencana. Secara orbitasi Desa Braja Harjosari mempunyai jarak 49 km dari pusat pemerintahan Kabupaten dan 120 km jarak dari pusat pemerintahan Provinsi. Iklim Desa Braja Harjosari, sebagaimana desa-desa di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim penghujan dan kemarau, hal tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap pola tanam di masyarakat. Suhu rata-rata harian di desa ini berkisar 32 °C.





Gambar 7 Kantor Desa Braja Harjosari



Gambar 8 Peta tata guna lahan Desa Braja Harjosari

Desa Braja Harjosari memiliki jumlah penduduk 2016 sebanyak 5.874 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 3.088 orang dan 2.866 orang penduduk perempuan. Kepadatan 191 orang/km<sup>2</sup>. Tingkat pendidikan di desa ini sebagian besar lulusan SMP sederajat dengan jumlah 1.069 orang dan tingkat pendidikan paling kecil adalah lulusan S2 dengan jumlah 5 orang.

Di desa ini terdapat 50 industri pengolahan skala rumah tangga dan 11 industri skala menengah. Jumlah tersebut terbagi dalam 24 industri makanan dan minuman, 21 industri dari berbahan kayu dan sisanya industri lain-lain. Terdapat 127 warung kelontong, 2 restoran dan 25 warung/kedai makan.

Braja Harjosari memiliki potensi yang sangat besar terutama di sektor pariwisata. Sudah banyak wisatawan yang masuk ke desa ini baik wisatawan lokal maupun asing tertarik untuk berwisata ke desa ini. Potensi pariwisata yang dimiliki desa Braja Harjosari saat ini adalah 1) Berkuda di padang savana; 2) Naik perahu menyusuri sungai Way Penet; 3) Berkunjung ke Kampung Bali dengan menikmati budaya dan kesenian Bali; 4) Agrowisata jambu kristal dan buah naga; 5) Sirkuit motor trail. Tingginya keragaman hayati membuat Braja Harjosari terasa istimewa. Keistimewaan inilah yang kemudian dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat sebagai wisata desa. Pada tahun 2016 desa Braja Harjosari ditetapkan sebagai salah satu Desa Wisata dan Desa Mandiri Pangan. Target dari desa wisata dan mandiri pangan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Lokasi desa yang berdekatan dengan TNWK juga menjadi alasan desa ini menarik untuk dikunjungi. Saat ini, di Desa Braja Harjosari juga terdapat sejumlah *homestay* untuk mendukung pengembangan pariwisata desa.

Anggaran pembangunan Desa Braja Harjosari di tahun 2016 yaitu Anggaran Dana Desa (ADD) Rp 851.391.000,- , bagi hasil/bantuan dan hibah tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 68.600.000 dan Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 16.000.000,-. Jumlah ini belum ditambah dengan Dana Desa dari program Pemerintah Pusat.

Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar dan dalam kawasan TNWK di bagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu aktivitas berbasis lahan, aktivitas berbasis sumberdaya hutan, aktivitas berbasis situs budaya dan sosial, aktivitas berbasis sumberdaya air. Penjelasan secara rinci dapat di lihat pada **Tabel 6**.

**Tabel 6.** Aktivitas Masyarakat Desa Braja Harjosari di sekitar dan dalam kawasan TNWK

No	Kategori aktivitas Ekonomis	Sebaran*	Keterangan
1.	Aktivitas Berbasis Lahan		
	<b>Usaha Tani Tanaman Pangan</b>		
	1 Padi	Luar	Jagung dan singkong merupakan tanaman sela dilahan 400 ha
	2 Jagung	Luar	
	3 Singkong/ubi kayu	Luar	
	<b>Usaha Tani Tanaman Kayu</b>		
	4 Albasia	-	5 ha
	5 Sengon		5 ha
	6 Gaharu		3 ha

Formatted Table



No	Kategori aktivitas Ekonomis	Sebaran*	Keterangan
	<b>Usaha Tani Tanaman Perkebunan</b>		
	7 Karet	Luar	100 ha
	8 Sawit	Luar	50 ha
	9 Jeruk		8 ha
	10 Jambu kristal		2,5 ha
	11 Buah naga		1 ha
	<b>Usaha Tani Sayuran</b>		
	12 Cabe		5 ha
	13 Tomat		5 ha
	14 Jamur Tiram		250 m2 dimana 5x10 (3 rak), 10x20 m (hampanan)
	<b>Usaha Peternakan</b>		
	15 Sapi	Luar	
	16 Kambing	Luar	
	17 Ayam		
	18 Babi		
	<b>Usaha Perikanan</b>		
	19 Ikan lele	Luar	
2.	Aktivitas Berbasis Sumberdaya Hutan		
	<b>Pelestarian Hutan</b>		
	20 Tidak ada	-	
	<b>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu</b>		
	21 Tidak ada	-	
	<b>Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu</b>		
	22 Rumput untuk pakan ternak	Dalam	
	23 Mancing Ikan	Dalam	
	24 Penggembalaan kerbau	Dalam	
	25 Wisata desa	Luar	
	26 Budi daya anggrek	Luar	
3.	Aktivitas Berbasis Situs Budaya dan Sosial		
	27 Pemanfaatan bantaran sungai untuk Upacara Ngaben	Dalam	
	28		
	29		
4.	Aktivitas Berbasis Sumberdaya Air		
	30 Sumur bor	Luar	

\* Sebaran aktivitas di dalam ataupun di luar kawasan TNWK  
 Sumber: Hasil *Focus Group Discussion* dan *Depth Interview*

Dari hasil observasi, wawancara dan FGD dengan masyarakat, teridentifikasi beberapa kelompok atau lembaga di Desa Braja Harjosari yang sudah bekerja sama dengan TNWK. Namun demikian, terdapat pula kelompok masyarakat ataupun lembaga desa yang berpotensi dilibatkan dalam pengelolaan kolaboratif TNWK. Adapun kelompok masyarakat dan lembaga desa tersebut seperti yang tercantum pada **Tabel 7**.

Formatted Table

**Tabel 7.** Kelembagaan desa dan kelompok masyarakat di desa Braja Harjosari yang sudah bekerja sama dengan TNWK

No	Nama Lembaga	Tahun Dibentuk	Kegiatan <i>Existing</i>	Kendala Organisasi	Harapan Ke Depan
1	Pemerintah Desa	1958	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk KTH</li> <li>• Membuat Forum Wisata Way Kambas</li> <li>• Penggalangan kader konservasi</li> <li>• Pelatihan-Pelatihan ;</li> <li>• Guide wisata</li> <li>• Pemuda konservasi</li> <li>• Desa binaan Menteri Kehutanan (2015-2021)</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat untuk sektor perikanan (sudah ada 12 kolam bulat dan akan ditambah 6 kolam lagi tahun ini)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya program/rencana kerja</li> <li>• kurangnya pengetahuan</li> <li>• Kurangnya kemampuan berkomunikasi terutama bahasa asing</li> <li>• Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan perikanan yang baik</li> </ul>	Adanya MOU dengan TNWK
2	Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan pelatihan-pelatihan:</li> <li>• Pelatihan pengelolaan <i>homestay</i></li> <li>• Pelatihan pengolahan produk pangan</li> <li>• Pelatihan pengelolaan <i>website</i></li> <li>• Pelatihan bahasa asing dan <i>Hospitality</i> (dengan DISPORA)</li> <li>• Pelatihan pengelolaan lingkungan (pengelolaan pekarangan dan kebersihan)</li> <li>• Pelatihan pemasaran <i>home industry</i> (dengan PT Aska Jaya)</li> <li>• Pelatihan pengelolaan wisata desa</li> <li>• Pengelolaan <i>homestay</i></li> <li>• Pengelolaan souvenir (tas rajut, gantungan kunci, dan piring lidi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemah di kelembagaan</li> <li>• Belum adanya SK dari Dinas terkait untuk Kelompok Sadar Wisata</li> <li>• Masih kurangnya pengelolaan manajemen administrasi dan keuangan dalam kelompok</li> <li>• Kurangnya pemasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata terus berkembang</li> <li>• Adanya pelatihan-pelatihan khusus dari TNWK terkait tentang informasi flora dan fauna yang ada di TNWK</li> <li>• Terjalannya hubungan kerjasama dengan TNWK</li> </ul>

Formatted Table

No	Nama Lembaga	Tahun Dibentuk	Kegiatan <i>Exsisting</i>	Kendala Organisasi	Harapan Ke Depan
3	Karang Taruna	Februari 2018	<p>Kegiatan sejauh ini belum ada, karena menunggu rencana kerja dari masing-masing divisi di kepengurusan karang taruna. Adapun divisi-divisi tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi pengembangan organisasi dan SDM</li> <li>• Divisi kesejahteraan dan pengembangan ekonomi koperasi dan UKM</li> <li>• Divisi kesehatan, olahraga, seni dan budaya</li> <li>• Divisi kerohanian dan pengembangan mental</li> <li>• Divisi humas, publikasi dan komunikasi</li> <li>• Divisi lingkungan hidup dan pariwisata</li> <li>• Divisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>• Divisi hukum, advokasi, dan HAM</li> <li>• Divisi pengembangan hubungan kerjasama dan kemitraan</li> </ul>	Belum ada rencana kerja dari masing-masing divisi	<p>Menjalin kerjasama lingkungan dan pariwisata dengan pihak luar. Dengan melibatkan divisi :</p> <p>Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konservasi anggrek dengan cara budi daya tanaman anggrek lokal dengan kultur jaringan kemudian hasil dari itu dikembalikan lagi ke kawasan TNWK</li> <li>• Penangkaran mentok rimba</li> <li>• Wisata :</li> <li>• Pengelolaan dan promosi wisata bekerjasama dengan POKDARWIS</li> </ul>
4	Purba Kusuma (Seni Budaya)	1963	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melestarikan seni dan budaya Bali (tari Bali dan Lampung)</li> <li>• Pertunjukan Gamelan</li> <li>• Festival Ogoh-Ogoh</li> <li>• Festival Way Kambas (Pawe Budaya)</li> <li>• Ada 2 sanggar tari dan satu tempat pementasan. Anggota dari kelompok ini berjumlah 95 orang</li> <li>• Kegiatan musik (angklung) beranggotakan 25 orang.</li> <li>• Kegiatan pementasan diberbagai tempat yang dinilai strategis setiap satu bulan sekali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pelatih untuk pengembangan tari Lampung</li> <li>• Peralatan pendukung masih kurang</li> <li>• Kostum untuk pertunjukan belum ada</li> <li>• Panggung seni sudah tidak memadai</li> <li>• Kurangnya promosi</li> <li>• Tidak lengkapnya peralatan musik</li> <li>• Tidak adanya pelatih</li> <li>• Belum adanya vokais dan penari latar yang baik</li> <li>• Panggung pentas kurang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerjasama dengan pihak TNWK dalam mempromosikan program-program wisata</li> <li>• Dapat menjalain kerjasama dengan Pemerintah Daerah</li> <li>• Adanya pelatih tari Lampung</li> <li>• Adanya peralatan, kostum dan sanggar yang lebih baik</li> <li>• Adanya divisi baru yang fokus dalam kegiatan pementasan</li> <li>• Adanya kegiatan pementasan yang berkelanjutan</li> </ul>

No	Nama Lembaga	Tahun Dibentuk	Kegiatan <i>Exsisting</i>	Kendala Organisasi	Harapan Ke Depan
5	Forgoten Family	2017			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mensupport pengembangan wisata di desa</li> <li>• Menambah personel dari dusun-dusun yang lain.</li> </ul>
6	KTH Wanakaryatirta	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budi daya ikan menggunakan kolam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum bisa dalam memasarkan hasil budi daya</li> <li>• Belum bisa dalam penanganan hama dan penyakit</li> <li>• Belum bisa menghasilkan pakan sendiri</li> <li>• Belum ada peralatan untuk membuat pakan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pelatihan dalam pengelolaan ikan asap</li> <li>• Adanya bantuan promosi dari Pemerintah daerah</li> <li>• Perbaiki akses jalan dari desa ke Camp ERU</li> </ul>
7	KTH Bina Warga	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budi daya ikan menggunakan kerambah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum bisa dalam memasarkan hasil budi daya</li> <li>• Belum bisa dalam penanganan hama dan penyakit</li> <li>• Belum bisa menghasilkan pakan sendiri</li> <li>• Belum ada peralatan untuk membuat pakan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pelatihan dalam pengelolaan ikan asap</li> <li>• Adanya bantuan promosi dari Pemerintah daerah</li> <li>• Perbaiki akses jalan dari desa ke Camp ERU</li> </ul>
8	Kelompok Tani Braja		Pertanian organik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melon</li> <li>• Cabe</li> <li>• Tomat</li> <li>• Padi (1 ha sawah= 5-6 ton, 1 ha rawa= 6-7 ton)</li> <li>• Holtikultura</li> </ul> Mayoritas pertanian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padi, Singkong, jagung</li> <li>• Pengelolaan lahan pertanian untuk : Sawah : 400 Ha &amp; Rawa : 80 Ha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan perlengkapan pertanian</li> <li>• Penyuluh pertanian tidak maksimal</li> <li>• Kurangnya pemasarn</li> <li>• Belum bisa mengatasi hama dan tikus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisa mengembangkan pertanian organik</li> <li>• Adanya pelatihan organik</li> <li>• Adanya motivator pertanian organik</li> <li>• Adanya pendampingan dalam hal pertanian</li> <li>• Petani lahan sawah lebih memproduktifkan pertanian padi</li> <li>• Fasilitas dari PU untuk sodetan</li> </ul>
9	MPP Gajah	2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghalauan gajah liar</li> <li>• Fasilitas antara masyarakat dengan TNWK</li> <li>• Membantu POLHUT dalam pemantauan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peralatan mitigasi masih kurang</li> <li>• Insentif masih kurang</li> <li>• Cuaca yang tidak mendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan insentif dan peralatan destinasi</li> </ul>

No	Nama Lembaga	Tahun Dibentuk	Kegiatan <i>Exsisting</i>	Kendala Organisasi	Harapan Ke Depan
10	BUMDES Mapan Sejahtera	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit usaha peternakan pengembangan sapi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permodalan</li> <li>Lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan kelembagaan</li> <li>Penambahan modal</li> <li>Penambahan unit usaha</li> <li>Pelatihan-pelatihan manajemen usaha ekonomi</li> <li>Penguatan dari pihak luar</li> <li>Pengelolaan unit usaha perikanan dilahan 5 ha</li> </ul>
11	Sirkuit Sepontan	2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Event Motor Cross</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuaca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bisa menjadi sirkuit nasional</li> <li>Perbaikan akses jalan</li> <li>Penerangan jalan</li> <li>Adanya link ke Pemerintah Daerah</li> </ul>
12	Kelompok ibu-ibu dusun satu		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan marning</li> <li>Pembuatan tiwul</li> <li>Pembuatan sale pisang</li> <li>Pembuatan kerupuk ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya peralatan dan modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan <i>Home Industry</i></li> </ul>

Formatted Table



**Gambar 9.** Pemetaan konflik dan potensinya secara partisipatif di Desa Brajajharjosari dengan TNWK

Konflik atau permasalahan utama yang terjadi di desa ini terkait dengan kawasan TNWK adalah kebakaran hutan, perburuan satwa, konflik gajah, pengambilan rumput dan kayu bakar. Kebakaran sering kali terjadi. sebaran konflik di desa dapat di lihat di **Gambar 9**.

### **Kemitraan di Desa Braja Harjosari**

Potensi untuk pengembangan model desa konservasi di desa Braja Harjosari sangat besar. Beberapa rintisan kegiatan yang terkait dengan upaya konservasi kawasan sudah ada dan dikembangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Namun, secara umum program dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan TNWK belum terintegrasi dan secara sistematis menyelesaikan masalah kawasan dalam kerangka pembangunan desa. Saat ini, program-program yang berjalan di tingkat desa dikelola oleh mitra-mitra, TNWK dan Dinas terkait lebih banyak mengarah pada bantuan teknis. Legalitas kegiatan di tingkat desa (MoU/PKS

dengan pemerintah desa) masih dirasa belum jelas sehingga pembagian peran antara pemerintah desa dan TNWK belum terjadi.

Sebenarnya, dukungan pemerintah desa dalam upaya pengelolaan kawasan TNWK sudah ada dalam bentuk penyediaan lahan untuk pengembangan wisata desa. Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan TNWK. Kegiatan tersebut, saat ini dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Braja Harjosari. Kegiatan wisata di Desa Braja Harjosari sudah dapat dikatakan cukup berkembang dan terintegrasi dengan beberapa paket atraksi yang dikembangkan kelompok-kelompok masyarakat seperti kesenian Bali dan Lampung, wisata agro (buah naga, jambu kristal dan budidaya anggrek), wisata kuda, wisata susur sungai dan *Homestay*). Dukungan lain terlihat dalam RPJMDes 2018-2023, dimana pemerintah desa Braja Harjosari memasukkan rencana pengembangan pondok wisata, pengembangan Ruang Terbuka Hijau, pengadaan jaringan internet desa, perbaikan infrastruktur jalan desa, pelatihan masyarakat untuk pembentukan dan pengembangan ekonomi masyarakat dan pelatihan teknologi tepat guna.

Modal sosial dan hubungan internal dalam kelompok masyarakat dibangun baik dengan interaksi komunikasi dan koordinasi pada rutinitas kegiatan pertemuan sebulan sekali yang diadakan oleh kelompok-kelompok seperti Pokdarwis, Kelompok Tani Hutan, Forgotten Family, Kelompok Seni Purba Kesuma. Hubungan eksternal dengan pihak lain juga dibangun baik oleh kelompok. Hubungan yang intensif Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat dengan TNWK, Dinas terkait, penyuluh, BPDAS, DPD RI, Universitas (UNILA, Polinela, IPB) dan mitra TNWK (KHS, Alert, WCS) merupakan modal kelompok di dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain.

Catatan penting terkait potensi pengembangan kelembagaan kolaborasi di tingkat desa adalah kemampuan pemerintah desa mengkoordinasi masyarakat yang tercermin dalam realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100% dari target pencapaian sebesar Rp 24.933.167,- (Kecamatan Braja Slebah Dalam Angka 2017). Adanya dukungan dan komitmen pemerintah desa di dalam mengembangkan kolaborasi program juga menjadi catatan penting. Sehingga, hal ini sedikit banyak dapat memberikan jaminan keberhasilan pengembangan model desa konservasi di desa tersebut.

Perencanaan dan pengembangan kelembagaan kolaborasi di Desa Braja Harjosari diharapkan mengintegrasikan semua rencana pemangku kepentingan yang mengarah pada pengembangan model desa konservasi. Kemitraan dan kerjasama yang pernah terjalin antara kelompok dan pemerintah desa, setidaknya menjadi modal awal untuk merintis upaya tersebut.

**Tabel 8.** Lembaga mitra TNWK yang pernah bekerja sama di Desa Brajaharjosari

Nama Lembaga	Jenis Kegiatan	Pola Kerjasama	Periode Kegiatan
Dinas Pariwisata	1 Pelatihan di Pokdarwis 2 Pembangunan sarana dan prasarana wisata (gazebo, mushola, MCK, dan panggung pentas) 3 Rencana kedepan pemasangan listrik ke lokasi wisata. Pembuatan dermaga speed boat	SK dengan Dinas Pariwisata Desa menghibahkan tanah seluas 3 Ha kepada Dinas Pariwisata	2017-Sekarang
DISPORA	4 Sosialisasi 5 Pelatihan menjahit	Kecamatan Braja dengan DISPORA	Maret 2018-sekarang
UNILA BIOLOGI	6 Pendampingan pokdarwis 7 Pengembangan anggrek TNWK 8 Pengelolaan <i>website</i>	UNILA dengan Kelompok	2015-sekarang
POLINELA	9 Pembuatan tiwul 10 <i>Packaging</i> 11 Analisa laboratorium untuk makanan (komposisi)	POLINELA dengan Kelompok	2016-sekarang
ALERT	12 Pendampingan wisata 13 Restorasi di luar kawasan (DAS) 14 Alat mitigasi	Pendampingan Kelompok	2015-2017
WCS	15 Pendampingan konflik 16 Fasilitas kegiatan 17 Pembangunan gardu jaga 18 Alat mitigasi	Pendampingan Kelompok	1991-sekarang
Dinas Kehutanan	Pemberian bibit buah dan kayu (nangka, pala)	Dinas dengan Desa	2016 akhir
KAGAMA (Keluarga Alumni UGM)	19 Pembuatan pakan silase 20 Teknologi branding kambing	KAGAMA dengan Masyarakat	2014
IPB	Penanaman kedelai jenuh air	IPB dengan Masyarakat	2017
TAGANA	Sempat meminjamkan <i>speed boat</i>	TAGANA dengan Masyarakat	2017
BAPEDAS WAYSEPUTIH	Akan melakukan latihan TAGANA Pemberian bibit cengkeh dan pala	BPDAS dengan Masyarakat	2017
IMI (Ikatan Motor Indonsia)	Partisipasi event	IMI dengan Sepontan	2014-Sekarang
TNWK	21 Pelatihan kader konservasi 22 Kemah konservasi 23 Perbaruan bantuan karambah 24 Perbaruan kolam bulat (bioflok) 25 Sosialisasi LH dan Konservasi 26 Pelibatan HKN	TN dengan Masyarakat	1978-sekarang
DPD RI	27 Inisiator festival kudalumping 28 Motivator pertanian 29 Pembuatan Toilet sebanyak 30 unit	DPD RI dengan Masyarakat DPD RI dengan Kelompok Tani DPD RI dengan Masyarakat	2016
KHS	Pelibatan masyarakat untuk anggota Tim Masyarakat sebagai penyuplai pakan gajah	KHS dengan Masyarakat	2018

Formatted Table



### 2.3.6.2 Desa Rantau Jaya Udik II

Desa Rantau Jaya Udik II merupakan salah satu dari 20 desa yang ada di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Desa Rantau Jaya Udik II memiliki luas sekitar 30 km<sup>2</sup> atau 2549,69 ha. Dengan luas lahan pertanian sawah 38 ha, pertanian non sawah 65,38 dan non pertanian 2446,31 ha. Secara topografi, luas kemiringan lahan rata-rata di desa ini adalah datar dengan luasan 30 ha, ketinggian di atas permukaan laut rata-rata 26 mdpl, suhu rata-rata di kawasan ini antara 26 °C sampai 31 °C dengan kelembaban udara 120 ppm dan curah hujan 2.000-3.000 mm.

Desa ini terbagi menjadi 5 dusun dengan bagian utara berbatasan dengan TNWK, bagian selatan berbatasan dengan Desa Surabaya Udik, bagian barat berbatasan dengan Desa Muara Jaya dan bagian timur berbatasan dengan PT GGP PG4. Desa Rantau Jaya Udik II adalah desa hasil pemekaran dari Desa Rantau Jaya Udik pada tahun 1996 karena wilayah desanya terlalu luas dan jumlah penduduk di desa tersebut yang semakin bertambah dengan cepat. Selama berstatus sebagai Desa Persiapan, desa ini terus berbenah baik dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana maupun bidang administrasi dan sistem pelayanan publik. Hingga pada tahun 1997 desa ini resmi menjadi desa Definitif Rantau Jaya Udik II.



Gambar 10 Gerbang Desa Rantau Jaya Udik II

Jumlah penduduk desa ini tahun 2015 adalah 4366 jiwa dengan kepadatan penduduk 146 jiwa/km<sup>2</sup>. Laki-laki 2264 perempuan 2102. Sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat di desa ini adalah tamatan SD dengan jumlah 2.154 jiwa dilanjutkan lulusan SMP 656, SMA 232, dan Diploma/Sarjana 22 jiwa. Karena sebagian wilayah desa ini adalah lahan pertanian, maka mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah menjadi petani baik bertani di lahannya sendiri ataupun menjadi buruh tani. Selain potensi dari sektor pertanian, sektor peternakan juga memiliki potensi yang tinggi baik peternakan sapi maupun kambing. Jumlah ternak sapi potong 1122, kambing 1172, domba 211 (Kecamatan Sukadana dalam

angka 2017). Jenis budidaya lain yang berpotensi berkembang adalah ternak lebah madu. Terdapat sekitar 25 kotak untuk budidaya ternak lebah madu yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan.

Anggaran pembangunan desa Rantau Jaya Udik II di tahun 2016 yaitu Anggaran Dana Desa (ADD) Rp 436.150.000,-, bagi hasil/bantuan dan hibah tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 68.600.000 dan Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp 6.000.000,-. Jumlah ini belum ditambah dengan Dana Desa dari program Pemerintah Pusat.

Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar dan dalam kawasan TNWK di bagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu aktivitas berbasis lahan, aktivitas berbasis sumberdaya hutan, aktivitas berbasis situs budaya dan sosial, aktivitas berbasis sumberdaya air. Penjelasan secara rinci dapat di lihat pada **Tabel 9**.

**Tabel 9.** Aktivitas Masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II di sekitar dan dalam kawasan TNWK

No	Kategori aktivitas Ekonomi	Sebaran*	Keterangan
1.	<b>Aktivitas Berbasis Lahan</b>		
	<b>Usaha Tani Tanaman Pangan</b>		
	30 Padi	Luar	Luas lahan pertanian sawah 38 ha. Luas lahan ini digunakan untuk tanaman selingan.
	31 Jagung	Luar	
	32 Singkong/ubi kayu	Luar	
	33 Palawija	Luar	
	34 Sayuran	Luar	
	<b>Usaha Tani Tanaman Kayu</b>		Luas lahan pertanian non sawah 65,38 ha.
	35 Albasia	Luar	
	<b>Usaha Tani Tanaman Perkebunan</b>		
	36 Karet	Luar	
	37 Sawit	Luar	
	<b>Usaha Peternakan</b>		Luas lahan non pertanian 2446,31 ha digunakan untuk pemukiman, jalan umum. peternakan, perikanan.
	38 Sapi	Luar	
39 Kambing	Luar		
<b>Usaha Perikanan</b>			
40 Ikan lele	Luar		
2.	<b>Aktivitas Berbasis Sumberdaya Hutan</b>		
	<b>Pelestarian Hutan</b>		
	41 Restorasi	Dalam	dilakukan oleh Kompag di RPTN Susukan Baru dengan luas 50 ha.
	<b>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu</b>		
	42 Kayu bakar	Dalam	di RPTN Susukan Baru
	<b>Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu</b>		
	43 Rumput untuk pakan ternak	Dalam	di RPTN Susukan Baru
	44 Mancing Ikan	Dalam	di RPTN Susukan Baru
	45 Berburu satwa (rusa, babi hutan, burung)	Dalam	Masyarakat dari Dusun I
	46 Budi daya lebah	Luar	oleh KTH
47 Pendidikan lingkungan	Luar	oleh Kompag	
48 Wisata desa	Luar	oleh Kompag	

Formatted Table

No	Kategori aktivitas Ekonomi	Sebaran*	Keterangan
3.	Aktivitas Berbasis Situs Budaya dan Sosial		
	49 Pemanfaatan untuk lahan perkuburan	Dalam	Dijadwalkan
4.	Aktivitas Berbasis Sumberdaya Air		
	50 Pemanfaatan air untuk persawahan	Dalam	Sumber mata air dari dalam kawasan TNWK
	51 Sumur bor	Luar	

Formatted Table

\* Sebaran aktivitas di dalam ataupun di luar kawasan TNWK

**Sumber:** Hasil *Focus Group Discussion* dan *Depth Interview*

Dari hasil observasi, wawancara dan FGD dengan masyarakat, teridentifikasi beberapa kelompok atau lembaga di Desa Rantau Jaya Udik II ini yang sudah bekerja sama dengan TNWK. Namun demikian, terdapat pula kelompok masyarakat ataupun lembaga desa yang berpotensi dilibatkan dalam pengelolaan kolaboratif TNWK. Adapun kelompok masyarakat dan lembaga desa tersebut seperti yang tercantum pada **Tabel 10**.

**Tabel 10.** Daftar kelembagaan desa dan kelompok masyarakat yang teridentifikasi di Desa Rantau Jaya Udik II

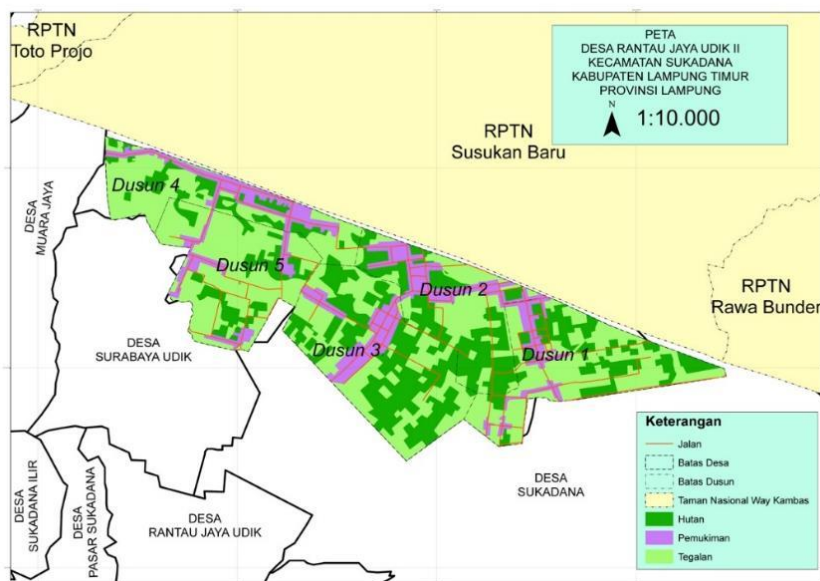
No	Nama Lembaga	Tahun Dibentuk	Kegiatan Existing	Kendala	Harapan
1	Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1995-1996 (Desa Definitif)</li> <li>• 2002 (Memilih Kepala Desa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan</li> <li>• Pembinaan</li> <li>• Penyelenggaraan Pemerintah</li> <li>• Pembangunan infrastruktur desa</li> </ul>	Belum ada MOU dengan TNWK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera</li> <li>• Mensosialisasikan Surat Keputusan Gubernur Lampung No.G/459/V.23/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung</li> </ul>
2	BUMDES	Agustus 2017	Unit usaha penyewaan tarub	Peralatan penyewaan masih kurang	Penambahan unit usaha BUMDES
3	KTH Wanasari	April 2016	Pengembangan ternak lebah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuaca</li> <li>• Serangan predator</li> <li>• Ketersediaan pakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan bibit kaliandra</li> <li>• Penambahan produksi</li> <li>• Adanya pelatihan teknik penanganan hama ternak lebah</li> <li>• Adanya pelatihan teknik penanganan cuaca pada ternak lebah</li> <li>• Pelatihan budi daya ternak lebah</li> <li>• Adanya suport untuk budi daya peternakan</li> </ul>
4	KTH Mekarsari	April 2016	Pengembangan ternak lebah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuaca</li> <li>• Serangan predator</li> <li>• Ketersediaan pakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan bibit kaliandra</li> <li>• Penambahan produksi</li> <li>• Adanya pelatihan teknik penanganan Hama ternak lebah</li> <li>• Adanya pelatihan teknik penanganan cuaca pada ternak lebah</li> <li>• Pelatihan budi daya ternak lebah</li> <li>• Adanya <i>support</i> untuk budi daya peternakan</li> </ul>
5	Masyarakat Mitra POLHUT (MPP) Gajah	2009 (terdiri dari 14 anggota)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patroli</li> <li>• Penjagaan titik-titik rawan konflik</li> </ul>	• Kurangnya peralatan mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan personil</li> <li>• Perbaikan talud di 10 titik rawan gajah</li> <li>• Penambahan peralatan mitigasi</li> <li>• Diadakanya perbaikan kanal gajah</li> <li>• Pembuatan siklus perjalanan gajah</li> </ul>

Formatted Table

No	Nama Lembaga	Tahun Dibentuk	Kegiatan Exsisting	Kendala	Harapan
6	KOMPAG (Komunitas Pelajar Gambas)	November 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restorasi TNWK</li> <li>Jumlah anggota 60 orang, sebagian besar masih pelajar</li> <li>Merawat kegiatan Restorasi ALERT seluas 1 Ha. dengan tanaman; pusa, salam, ketapang,</li> <li>Membentuk KTH Pengurip</li> <li>Pengembangan Wisata Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya permodalan</li> <li>Kurangnya peralatan untuk pemotong rumput.</li> <li>Kurangnya peralatan pencegahan kebakaran</li> <li>Tidak adanya peralatan mitigasi</li> <li>Kurangnya dukungan dari orangtua anggota kelompok</li> <li>Kurangnya pengetahuan dari masing-masing anggota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pelatihan managerial/lembaga</li> <li>Kegiatan wisata dapat memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat luas</li> <li>Pengembangan program</li> <li>Permodalan</li> <li>Legalitas perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa dengan TNWK tentang restorasi</li> </ul>
7	Kelompok Tani		Bidang Kegiatan; <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanian</li> <li>Peternakan (sapi/kambing)</li> <li>Perikanan</li> </ul> Terdapat 33 Kelompok Tani dengan anggota masing-masing anggota 25 orang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat/peternak belum mengetahui teknologi untuk pemanfaatan kotoran ternak</li> <li>Kurangnya ketersediaan pakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya teknologi tepat guna di sektor peternakan salah satunya pemanfaatan limbah kotoran sapi (BIOGAS)</li> <li>Pengadaan peralatan pembuatan pakan ternak</li> <li>Adanya dukungan dari pemerintah</li> </ul>
8	Kelompok Seni		Kegiatan seni Jaranan dan Silat.	Kurangnya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kesenian	Integrasi Program
9	Kelompok Pemberdayaan Wanita		Pembuatan produk <i>home industry</i> (Snack dan Kue)	Masih menggunakan peralatan sederhana dan pengemasan seadanya	Diadakannya pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil produk

Formatted Table

Konflik atau permasalahan utama yang terjadi di desa ini terkait dengan kawasan TNWK adalah kebakaran hutan, perburuan satwa, konflik gajah, pengambilan rumput dan kayu bakar. Kebakaran sering kali terjadi. sebaran konflik di desa tersaji pada **Gambar 11**.



**Gambar 11.** Peta tata guna lahan Desa Rantau Jaya Udik II

### Kemitraan di Desa Rantau Jaya Udik II

Potensi untuk pengembangan model desa konservasi di Desa Rantau Jaya Udik II sangat besar. Beberapa rintisan kegiatan yang terkait dengan upaya konservasi kawasan sudah ada dan dikembangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Namun, secara umum program dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan TNWK belum terintegrasi dan secara sistematis menyelesaikan masalah kawasan dalam kerangka pembangunan desa. Saat ini, program-program yang berjalan ditingkat desa dikelola oleh mitra-mitra, TNWK dan Dinas terkait lebih banyak mengarah pada bantuan teknis. Legalitas kegiatan di tingkat desa (MoU/PKS dengan pemerintah desa) masih dirasa belum jelas sehingga pembagian peran antara pemerintah desa dan TNWK belum terjadi.

Sebenarnya, dukungan pemerintah desa dalam upaya pengelolaan kawasan sudah ada dalam bentuk penyediaan lahan untuk fasilitas pendidikan lingkungan dan wisata. Letaknya berdekatan dengan kantor RPTN Susukan Baru. Kegiatan tersebut, saat ini dikelola oleh Komunitas Pelajar Gambah (Kompag). Dukungan lain terlihat dalam RPJMDes 2014, dimana Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II memasukkan rencana pengembangan taman rekreasi Way Kambas, penguatan seni budaya kuda lumping dan pelatihan industri panganan skala rumah tangga sebagai pendukung wisata desa.

Modal sosial dan hubungan internal dalam kelompok masyarakat dibangun baik dengan interaksi komunikasi dan koordinasi pada rutinitas kegiatan pertemuan sebulan sekali yang diadakan oleh kelompok-kelompok seperti Kelompok Tani Hutan, Kompag, Kelompok Tani dan kelompok sosial lainnya. Hubungan eksternal dengan pihak lain juga dibangun baik oleh kelompok. Hubungan yang intensif kelompok dengan TNWK, Dinas terkait, penyuluh, dan mitra TNWK (Alert) merupakan modal kelompok di dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain.

Catatan penting terkait potensi pengembangan kelembagaan kolaborasi di tingkat desa adalah kemampuan pemerintah desa mengkoordinasi masyarakat yang tercermin dalam realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 99,7% dari target pencapaian sebesar Rp 32.411.138,- (Kecamatan Sukadana Dalam Angka 2017). Adanya dukungan dan komitmen pemerintah desa di dalam mengembangkan kolaborasi program juga menjadi catatan penting. Sehingga, hal ini sedikit banyak dapat memberikan jaminan keberhasilan pengembangan model desa konservasi di desa tersebut.

Perencanaan dan pengembangan kelembagaan kolaborasi di Desa Rantau Jaya Udik II diharapkan mengintegrasikan semua rencana pemangku kepentingan yang mengarah pada pengembangan model desa konservasi. Kemitraan dan kerjasama yang pernah terjalin diantara kelompok dan pemerintah desa, setidaknya menjadi modal awal untuk merintis upaya tersebut. Lembaga mitra TGNWK yang pernah bekerjasama di Desa Rantau Udik II tersaji pada **Tabel 11**.

**Tabel 11.** Lembaga mitra TNWK yang pernah bekerjasama di Desa Rantau Udik II

Nama Lembaga	Jenis Kegiatan	Pola Kerjasama	Periode Kegiatan
ALERT	1 Restorasi Kawasan seluas 50 Ha. 2 Bantuan kambing sejumlah 6 ekor.	1 ALERT dengan KOMPAG. 2 Tidak kerjasama dengan Pemerintah Desa (Masyarakat hanya sebagai pekerja). 3 Dukungan KOMPAG untuk kerjasama perawatan.	1 Bantuan ternak mulai bulan Februari 2018 2 Kerjasama dengan KOMPAG dimulai September 2015-sekarang. 3 Kendala selama ini adalah kebakaran yang terjadi di areal restorasi yang mengakibatkan 50 % tanaman mati. Tidak adanya kerjasama dengan pihak Pemerintah Desa
WCS (WRU)	PAM Swakarsa	WRU dgn Pemerintah Desa	
TNWK	1 MMP Gajah 2 MMP Patroli 3 Bantuan sumur bor 4 Bantuan ternak lebah	1 TNWK dgn Pemerintah Desa 2 TNWK dgn Pribadi 3 TNWK dgn Pemerintah Desa 4 TNWK dgn Pemerintah Desa	2009-sekarang 2009-sekarang 2017 2017
Dinas Peternakan	Bantuan ternak	Dinas dengan Desa	2017
Dinas Pertanian	Bantuan tanaman buah	Dinas dengan Desa	2016
PT GGP PG4	Bantuan sumur bor	PT GGP PG4 dengan Pemerintah Desa	2017

Formatted Table



### 2.3.6.3 Analisis Sosial Ekonomi Desa Penyangga

Terdapat 38 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan TNWK yang tersebar di 11 kecamatan yang termasuk ke dalam Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah. Sebagian besar desa-desa tersebut merupakan daerah pemekaran baru.<sup>19</sup>

Tingkat kepadatan penduduk desa yang berbatasan langsung dengan TNWK relatif rendah, hanya di bawah 200 orang/km<sup>2</sup>. Mata pencaharian utama penduduk sekitar TNWK adalah petani/pekebun, hanya sedikit penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan/petambak, yang menonjol adalah di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Desa Cabang. Jenis usaha pertanian yang utama adalah persawahan, pertanian lahan kering, dan perkebunan. Komoditas utama adalah padi, singkong, jagung, kakao, lada, dan tanaman lain seperti pisang dan kelapa. Penggunaan lahan untuk pertanian terjadi di hampir seluruh desa di sekitar TNWK. Rata-rata lahan yang berada disekitar Taman Nasional Way Kambas, yang digunakan sebagai areal pertanian merupakan tanah marginal.

Di sekitar TNWK, terdapat juga sejumlah lahan pertanian yang dikelola oleh perusahaan swasta, yaitu PT Great Giant Pineapple Plantations Group 4 (PT GGP PG5). Luas lahan yang dikelola sekitar 3500 Ha, dengan produk pertanian yaitu nanas, pisang, jambu kristal, buah naga, apel india (uji coba) dan mangga. Wilayah kerja mencakup 2 (dua) kecamatan yaitu Labuhan Ratu dan Sukadana dengan jumlah total pekerja 6.000 orang. Mayoritas pekerja melibatkan masyarakat dari desa Labuhan Ratu VI, Labuhan Ratu VII, Labuhan Ratu VIII, Labuhan Ratu IX, Rantau Jaya Udik I dan Rantau Jaya Udik II. Sisanya merupakan pekerja yang didatangkan dari luar karena kebutuhan ketrampilan dengan kualifikasi khusus.

Secara umum penghasilan rata-rata pekerja harian dalam 1 (satu) bulan (21 hari kerja) sekitar Rp 2-3 juta dengan tambahan jaminan kesehatan dan uang makan. Untuk buruh harian lepas pada kegiatan pemanenan, biasanya di hitung borongan dan setiap jenis buah akan berbeda perhitungannya. Sebagai contoh untuk nenas per buah Rp 217,- dan dalam sehari satu rombongan pekerja (40 orang) dapat memanen 15.000 nenas. Untuk jenis buah yang lain akan berbeda perhitungannya.

Keberadaan PT GGP sedikit banyak telah memberikan peluang pilihan pekerjaan bagi masyarakat desa sekitar walaupun dalam beberapa hal juga terdapat isu-isu eksploitasi pekerja seperti yang diberitakan media *online*. Isu lain yang sering terjadi untuk kasus perkebunan skala besar adalah ekspansi atau perluasan lahan. Kebutuhan lahan yang besar untuk meningkatkan skala produksi, diduga akan berpengaruh kepada tekanan dan gangguan ke kawasan TNWK. Alih tangan kepemilikan lahan masyarakat setempat kepada perusahaan akan mengubah pola mata pencaharian masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, arah pembangunan daerah di kawasan TNWK dikembangkan pada pembangunan pariwisata khususnya ekowisata. Kebijakan ini pun kemudian didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Timur dengan menetapkan TNWK sebagai destinasi wisata

<sup>19</sup> TNWK (2016) Rencana Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas Periode 2016 – 2025

minat khusus dan sebagai kawasan strategis pengembangan ekowisata dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA). Terkait dengan rencana ini, Pemda Lampung Timur melalui Dinas Pariwisata telah menetapkan dan mendampingi 5 (lima) desa wisata di sekitar kawasan TNWK yaitu Desa Labuhan Ratu VI, Labuhan Ratu VII, Labuhan Ratu IX, Braja Yekti, Braja Harjosari. Keberadaan desa wisata ini untuk mendukung pengembangan aktivitas ekowisata di dalam kawasan TNWK. Selain itu, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke TNWK, salah satu kegiatan wisata yang rutin diadakan setiap tahun oleh Pemda Lampung Timur adalah Festival Way Kambas. Pengembangan desa wisata diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pilihan-pilihan mata pencaharian dari aktivitas wisata.

#### 2.3.6.4 Analisis Perkembangan Wilayah Desa Penyangga

Perkembangan wilayah desa dapat diketahui dengan mengukur sejauh mana wilayah desa tersebut berkembang dengan ciri perkembangan perdesaan yang meliputi jumlah dan jenis fasilitas perdesaan yang telah ada. Pada dasarnya, setiap wilayah memiliki kondisi perkembangan dan tingkat pertumbuhan berdasarkan kemampuannya masing-masing, dan setiap wilayah memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lainnya. Untuk mengetahui perkembangan wilayah desa di sekitar TNWK maka dilakukanlah analisis skalogram yang merupakan analisis untuk menentukan hirarki wilayah terhadap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Analisis ini menggunakan data Potensi Desa 2 (dua) titik tahun yaitu 2011 dan 2014 dengan parameter yang diukur meliputi bidang sarana perekonomian, sarana komunikasi dan informasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan terhadap jumlah penduduk yang menghasilkan Indeks Perkembangan Desa.

Tahapan kegiatan pada analisis data dengan metode skalogram adalah: (1). Melakukan pemilihan terhadap data yang bersifat kuantitatif; sehingga hanya data yang relevan saja yang digunakan; (2). Melakukan rasionalisasi data; (3). Melakukan seleksi terhadap data-data hasil rasionalisasi hingga diperoleh variabel untuk analisis skalogram yang mencirikan tingkat perkembangan masing-masing wilayah; (4). Melakukan standarisasi data terhadap variabel tersebut sebelum menentukan Indeks Perkembangan Desa (IPD) di masing-masing desa.

Rustiadi *et al.* (2004) menjelaskan model untuk menentukan nilai indeks perkembangan desa (IP<sub>j</sub>) suatu wilayah atau pusat pelayanan adalah sebagai berikut:

$$IP_j = \sum_i^n I'_{ij}$$
$$I'_{ij} = \frac{I_{ij} - I_{i \min}}{SD_i}$$

Dimana:

$IP_j$  = Indeks Perkembangan desa ke-j

$I_{ij}$  = Nilai indikator perkembangan ke-i desa ke-j  $I'_{ij}$  = Nilai indikator perkembangan ke-i terkoreksi/terstandarisasi desa ke-j

$I_{imin}$  = Nilai indikator perkembangan ke-i terkecil  $SD_i$  = Standar deviasi indikator perkembangan ke-i

Nilai-nilai yang diperoleh berdasarkan hasil penjumlahan tahapan skalogram diatas akan digunakan untuk mengelompokkan unit desa dalam kelas-kelas yang dibutuhkan atau hierarki desa. Diasumsikan bahwa kelompok yang diperoleh berjumlah 3, yaitu kelompok I dengan tingkat perkembangan tinggi, kelompok II dengan tingkat perkembangan sedang dan kelompok III dengan tingkat perkembangan rendah. Selanjutnya ditetapkan suatu konsensus misalnya jika nilainya adalah lebih besar atau sama dengan (2 kali standar deviasi ditambah nilai rata-rata) maka dikategorikan tingkat perkembangan tinggi, jika antara nilai rata-rata sampai (2 kali standar deviasi ditambah nilai rata-rata) maka termasuk tingkat perkembangan sedang, dan jika nilai kurang dari nilai rata-rata maka termasuk dalam tingkat perkembangan rendah.

Secara matematis kelompok tersebut adalah:

$IP_j > X \text{ rata-rata} + 2Stdev$  (tinggi)

$X \text{ rata-rata} < IP_j < + 2 Stdev$  (sedang)

$IP_j < X \text{ rata-rata}$  (rendah)

Dari hasil analisis skalogram perkembangan wilayah desa pada 35 desa di sekitar TNWK pada tahun 2014 terdapat 12 desa dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang rendah dan masuk ke dalam Hirarki III sebagai desa penyangga pusat pertumbuhan. Delapan desa dengan IPD yang tinggi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi desa sekitarnya adalah Desa Meranggi Jaya, Joharan, Kali Pasir, Tanjung Kesuma, Taman Pajar, Labuhan Ratu IX, Braja Sakti dan Desa Braja Harjosari. Pada rentang tahun 2011 sampai 2014 terdapat 5 desa yang mengalami **perkembangan wilayah yang pesat** dengan peningkatan IPD yang signifikan sehingga menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi yaitu Desa Meranggi Jaya, Joharan, Kali Pasir, Tanjung Kesuma dan Desa Braja Sakti.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, desa-desa dengan IPD tinggi (hirarki I) cenderung memiliki tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi, kualitas layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik. Pola mata pencaharian pun bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier yang memberikan peluang pilihan mata pencaharian yang lebih beragam dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar pada

Jika dikaitkan dengan penetapan desa wisata oleh Pemda Lampung Timur maka sebagai sebuah kawasan strategis pengembangan pariwisata di sekitar TNWK, Desa Braja Harjosari dan Desa Labuhan Ratu IX yang merupakan hirarki I menjadi model desa wisata dan pusat pengembangan ekonomi wilayah berbasis wisata. Tiga desa lain yaitu Labuhan Ratu VI (Hirarki III), Labuhan Ratu VII (Hirarki II) dan Braja Yekti (Hirarki III) menjadi penyangga pusat pertumbuhan dan seharusnya memiliki potensi dan daya dukung wisata desa yang berbeda, namun mampu menopang keberadaan desa-desa (Hirarki I) yang menjadi pusat

pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis wisata.

Intinya, dalam pendekatan perencanaan wilayah dan pembangunan, tidak semua desa di sekitar kawasan TNWK harus dipaksakan menjadi desa wisata. Setiap desa memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara ekonomi sesuai potensi dan daya dukung wilayahnya. Harapannya, desa-desa di sekitar kawasan TNWK mampu berkembang sesuai karakteristik wilayah dan ciri khas desa namun dapat selaras dengan pembangunan dan pengelolaan kawasan TNWK.

Selanjutnya, pada desa-desa dengan IPD rendah (Hirarki II & III) umumnya memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah (mayoritas SD atau SMP) dan masih menggantungkan mata pencaharian dari sektor primer yaitu pertanian. Dikarenakan lahan pertanian mayoritas di wilayah tersebut merupakan lahan marginal maka berdampak pada produktivitas yang rendah. Produktivitas pertanian yang rendah kemudian memberi pengaruh pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang rendah pula.

Dalam masyarakat pedesaan, individu yang berbeda memiliki akses potensial yang berbeda terhadap alternatif-alternatif kegiatan mata pencaharian sehingga perbedaan sumber nafkah akan memperlihatkan berbagai dampak pada kemiskinan dan distribusi pendapatan (Ellis 2000). Scoones (1998) menjelaskan salah satu strategi nafkah adalah diversifikasi nafkah (*livelihood diversification*) dilakukan dengan menerapkan keanekaragaman pola nafkah dengan cara berinvestasi pada usaha atau mencari pekerjaan lain di luar sektor pertanian untuk menambah pendapatan dengan melibatkan individu atau anggota keluarga. Diversifikasi nafkah akan melibatkan proses pengembangan secara luas untuk mendapatkan penghasilan agar dapat menangani dan merespon guncangan dan tekanan kehidupan. Analisis skalogram perkembangan wilayah desa di sekitar TNWK tersaji pada **Tabel 12**.

**Tabel 12.** Analisis Skalogram Perkembangan Wilayah Desa di Sekitar TNWK

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	2011			2014		
				IPD	Σ JENIS	HIRARKI	IPD	Σ JENIS	HIRARKI
1	Lampung Tengah	Bandar Surabaya	Cabang	90.96	25	I	48.82	14	II
2	Lampung Timur	Sekampung	Sidodadi	39.33	27	III	30.73	19	III
3	Lampung Tengah	Bandar Surabaya	Surabaya Ilir	39.71	32	III	39.71	32	III
4	Lampung Tengah	Bandar Surabaya	Cempaka Putih	44.05	22	III	44.05	22	III
5	Lampung Tengah	Seputih Surabaya	Rawa Betik	48.94	19	II	52.32	18	II
6	Lampung Tengah	Bandar Surabaya	Raja Wali	49.19	26	II	53.58	26	II
7	Lampung Tengah	Rumbia	Bina Karya Buana	30.48	25	III	32.14	27	III
8	Lampung Tengah	Putra Rumbia	Rantau Jaya Makmur	47.28	19	III	51.43	19	II
9	Lampung Tengah	Putra Rumbia	Rantau Jaya Baru	74.30	23	I	61.29	21	II
10	Lampung Tengah	Putra Rumbia	Rantau Jaya Ilir	41.88	21	III	54.78	25	II
11	Lampung Tengah	Putra Rumbia	Meranggi Jaya	46.12	18	III	86.35	26	I
12	Lampung Tengah	Putra Rumbia	Joharan	55.80	21	II	75.36	26	I
13	Lampung Timur	Way Bungur	Kali Pasir	60.83	23	II	74.60	27	I

Formatted Table

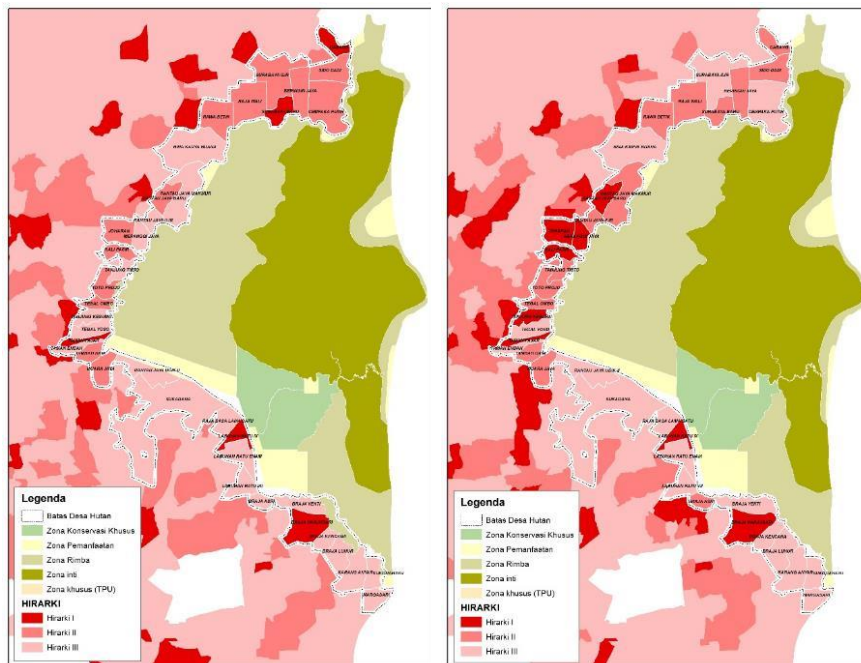
NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	2011			2014		
				IPD	Σ JENIS	HIRARKI	IPD	Σ JENIS	HIRARKI
14	Lampung Timur	Way Bungur	Tanjung Tirta	45.12	24	III	50.44	27	II
15	Lampung Timur	Way Bungur	Toto Projo	65.52	25	II	56.83	24	II
16	Lampung Timur	Way Bungur	Tegal Ombo	51.47	25	II	59.37	27	II
17	Lampung Timur	Purbolinggo	Tanjung Kesuma	42.87	27	III	96.12	41	I
18	Lampung Timur	Purbolinggo	Tegal Yoso	37.40	20	III	40.32	23	III
19	Lampung Timur	Purbolinggo	Taman Pajar	93.08	38	I	96.50	41	I
20	Lampung Timur	Purbolinggo	Taman Endah	42.72	24	III	37.37	22	III
21	Lampung Timur	Purbolinggo	Tambah Dadi	59.22	26	II	58.05	26	II
22	Lampung Timur	Sukadana	Muara Jaya	50.33	30	II	54.24	31	II
23	Lampung Timur	Sukadana	Rantau Jaya Udik li	32.01	24	III	31.61	23	III
24	Lampung Timur	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu Ix	74.25	21	I	83.17	23	I
25	Lampung Timur	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu Vi	41.66	25	III	34.80	23	III
26	Lampung Timur	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu Vii	25.09	21	III	61.04	23	II
27	Lampung Timur	Way Jepara	Braja Asri	43.24	33	III	52.59	31	II
28	Lampung Timur	Way Jepara	Braja Sakti	61.23	43	II	75.88	46	I
29	Lampung Timur	Braja Slebah	Braja Yekti	43.13	25	III	27.46	21	III
30	Lampung Timur	Braja Slebah	Braja Harjosari	80.36	43	I	105.81	49	I
31	Lampung Timur	Braja Slebah	Braja Kencana	35.10	19	III	31.73	18	III
32	Lampung Timur	Braja Slebah	Braja Luhur	30.50	22	III	26.95	19	III
33	Lampung Timur	Labuhan Maringgai	Karang Anyar	16.59	24	III	55.90	25	II
34	Lampung Timur	Labuhan Maringgai	Sukorahayu	40.06	25	III	26.91	21	III
35	Lampung Timur	Labuhan Maringgai	Margasari	35.61	27	III	20.58	22	III

Formatted Table

**Sumber:** Data Primer, diolah dari data Podes 2011 & 2014.

**Keterangan:** IPD= Indeks Perkembangann Desa; Σ JENIS: Fasilitas seperti sarana kesehatan, pendidikan, komunikasi jalan, pasar, bank, dll yang jumlah totalnya mencapai 94 jenis di semua desa di 2 (dua) kabupaten.

Dalam konteks desa-desa di sekitar TNWK, kondisi pendapatan dan kesejahteraan yang rendah serta peluang dan pilihan mata pencaharian yang terbatas, kemudian menjadi **faktor pendorong peningkatan akses** masyarakat ke dalam kawasan TNWK secara ilegal untuk mencari alternatif mata pencaharian lain (*livelihood strategy*) untuk pemenuhan kehidupan rumah tangga.



**Gambar 12.** Peta perbandingan Indeks Pembangunan Desa Tahun 2011 (kiri) dan 2014 (kanan)

#### 2.3.6.5 Potensi Desa yang Layak Dikembangkan untuk Model Kolaborasi

TNWK telah membuat kriteria penetapan desa-desa prioritas untuk pengembangan daerah penyangga sampai tahun 2015<sup>20</sup>. Kriteria-kriteria itu dapat diringkas menjadi:

1. Daerah penyangga yang letaknya bersambungan dengan Kawasan Taman Nasional dengan nilai-nilai keanekaragaman hayati, keaslian ekosistem dan hutan alami yang tinggi.
2. Daerah-daerah dengan kelompok sasaran masyarakat yang menimbulkan terjadinya tekanan yang tinggi terhadap keutuhan keanekaragaman hayati dan ekosistem kawasan Taman Nasional, seperti petani pionir, pemburu/pengumpul tradisional, pemburu komersial setempat.
3. Desa yang dapat difungsikan sebagai perlindungan atau dapat melindungi kawasan konservasi dari berbagai gangguan,
4. Desa yang mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang dapat dikembangkan termasuk peran sertanya pada pengendalian kerusakan yang mengancam kawasan Taman Nasional.

<sup>20</sup> Rencana Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas Periode 2016 – 2025

Kriteria di atas digabungkan dengan hasil dari analisis kewilayahan pada sub-bab sebelumnya. Berikut ini disajikan rekomendasi beberapa desa yang berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut selain kedua desa prioritas yang sudah ditetapkan.

1. Braja Yekti. Menurut analisis indeks pengembangan desa, desa yang terletak di Kabupaten Lampung Timur ini berada pada Hierarki 3. Dalam kerangka pengembangan desa wisata terpadu, desa ini diharapkan menjadi desa pendukung dari Braja Harjosari yang telah terlebih dulu siap menjadi desa wisata.
2. Braja Kencana. Menurut analisis indeks pengembangan desa, desa yang terletak di Kabupaten Lampung Timur ini berada pada Hierarki 3. Seperti halnya Braja Yekti, desa ini diharapkan menjadi desa pendukung dari Braja Harjosari yang telah terlebih dulu siap menjadi desa wisata.
3. Labuhan Ratu 9. Menurut analisis indeks pengembangan desa, desa yang terletak di Kabupaten Lampung Timur ini berada pada Hierarki 1. Desa ini dapat dikembangkan menjadi desa model karena lokasinya yang berdekatan dengan gerbang TNWK, dan Pemda Kabupaten Lampung Timur sudah membangun beberapa sarana pendukung wisata seperti *rest area* dan tempat parkir bagi pengunjung ke PLG dan SRS.
4. Labuhan Ratu 6. Menurut analisis indeks pengembangan desa, desa yang terletak di Kabupaten Lampung Timur ini berada pada Hierarki 3.
5. Rantau Jaya Makmur. Menurut analisis indeks pengembangan desa, desa yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah ini berada pada hierarki 1 dan dekat dengan zona pemanfaatan.
6. Rawa Betik. Menurut analisis indeks pengembangan desa, desa yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah ini turun dari Hierarki 1 (2011) dan berada pada Hierarki 2 (2014). dengan indikasi potensi perburuan liar cukup tinggi, tetapi dekat dengan zona pemanfaatan.
7. Bina Karya Buana. Menurut analisis indeks pengembangan desa, desa yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah ini berada pada hierarki 3. Desa ini dapat dikembangkan karena dekat zona pemanfaatan.

## 2.4. TNWK Dalam Kerangka Pembangunan Wilayah

Secara organisasi dan tata kerja, pelaksanaan konservasi merupakan wewenang penuh pemerintah pusat, termasuk di dalamnya untuk pengelolaan taman nasional.<sup>21</sup> Namun demikian, pelaksanaan program konservasi harus dilakukan secara sinergis dan memberi tiga manfaat utama yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial bagi tujuan pembangunan nasional dan regional baik provinsi maupun kabupaten. Muara dari tujuan pembangunan tersebut yaitu untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

### 2.4.1. Pembangunan Provinsi Lampung

Secara administratif, Taman Nasional Way Kambas termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sesuai dengan arahan dari pihak *National Working Team* dan Balai TNWK, maka dokumen

<sup>21</sup> Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dan UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014



Rencana Pengelolaan Kolaboratif ini difokuskan ke desa-desa penyangga yang terletak di Kabupaten Lampung Timur. Namun demikian, beberapa desa di Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan langsung dengan TNWK dimasukkan ke dalam analisis regional untuk mengetahui potensi pengembangan ke depan.

Provinsi Lampung memiliki kawasan seluas 35.288,35 Km<sup>2</sup> termasuk pulau-pulau di sekitarnya. Jumlah penduduk sekitar 8.205.141 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-ratanya yaitu 234,44 orang per km<sup>2</sup> (2015). Provinsi ini terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota. TNWK secara administratif termasuk ke dalam Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah.

*Ekonomi.* Secara ekonomi masyarakat pesisir Lampung kebanyakan nelayan, dan bercocok tanam. Sedangkan masyarakat tengah kebanyakan berkebun lada, kopi, cengkeh, kayu manis. Lampung fokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu dll. Dan di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan internasional.

*Infrastruktur.* Provinsi Lampung memiliki pelabuhan Bakauheni yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Dari Bakauheni terdapat beberapa jalur darat yang menghubungkan kota-kota sampai ujung utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Jalur darat tersebut yaitu jalan lintas tengah Sumatera, Jalan Lintas Timur Sumatera, Jalan Lintas Barat Sumatera dan Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera. Saat ini sedang dibangun jalan tol Bakauheni (Kabupaten Lampung Selatan) – Bandar Lampung – Terbanggi Besar (Kabupaten Lampung Tengah) sepanjang 139 kilometer yang direncanakan beroperasi penuh pada 2018. Jalur tol ini direncanakan akan terhubung ke Kota Palembang di provinsi tetangga, yaitu Sumatra Selatan.

Melalui jalur udara, Bandara Radin Inten II menghubungkan Kota Bandar Lampung dengan kota-kota lainnya di Indonesia, termasuk mempermudah akses dari Jakarta. Pada 2018, Bandara ini akan ditingkatkan menjadi bandara internasional sehingga memungkinkan penerbangan langsung dari luar negeri.

*Arah Pembangunan.* Provinsi Lampung memperoleh 8 Program Strategis Nasional yang langsung dilihat dan diawasi langsung oleh Presiden. Program ini yaitu pembangunan jalan tol, peningkatan Bandara Radin Inten II, Institut Teknologi Sumatera (ITERA), 2 bendungan, kawasan industri maritim, penambahan pelabuhan eksekutif Bakauheni - Merak, dan pembangunan sumber daya listrik baru. Pembangunan jalan tol dari Bakauheni ke Palembang dan peningkatan bandara dari domestik menjadi internasional diharapkan akan mendukung peningkatan akses para pengunjung ke TNWK.

#### **2.4.2. Pembangunan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah**

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mempunyai luas lebih kurang 5.325,03 km<sup>2</sup>, terdiri dari 24 kecamatan dan 264

desa/kelurahan. Dengan jumlah penduduk yaitu 1.105.990 jiwa (2014), kabupaten ini memiliki berbagai potensi wilayah alam yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Kabupaten ini terletak di wilayah strategis yang didukung oleh jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan kota-kota di Pulau Sumatera. Sektor pertanian merupakan sector unggulan komoditas utama yaitu tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu dan buah seperti rambutan, durian, pisang.

Selain sektor agribisnis, Kabupaten Lampung Timur dalam kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim memberikan prioritas dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengidentifikasi dua lokasi wisata berbasis alam sebagai lokasi wisata strategis, yaitu Taman Nasional Way Kambas dan Taman Wisata Purbakala Pugungraharjo. Namun kewenangan pengelolaan keduanya ada di pemerintah pusat.

Menurut RTRW Kabupaten Lampung Timur Kawasan Taman Nasional Way Kambas merupakan kawasan strategi nasional.<sup>22</sup> Kawasan strategi nasional yang dimaksud merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan ekonomi, yang berupa kawasan strategis pariwisata nasional Taman Nasional Way Kambas. Oleh karena, Pemkab Lampung Timur melakukan:

- pembatasan kegiatan budi daya di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas;
- penegakan hukum yang tegas bagi para pelanggar pemanfaatan lahan di Taman Nasional Way kambas;
- pencegahan kegiatan perburuan liar di kawasan konservasi melalui pengawasan dan monitoring terhadap kawasan tersebut;
- perlindungan terhadap kawasan konservasi penyu hijau; dan
- pengelolaan kawasan penyangga di sekitar Taman Nasional Way Kambas melalui pengembangan budi daya tanaman keras.

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam RTRW Pasal 60 ayat [3] huruf f meliputi:

- a) penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA);
- b) penyusunan rencana induk pengembangan obyek wisata; dan
- c) pengembangan paket paket wisata potensial

Visi pengembangan kepariwisataan Lampung Timur yaitu pembangunan kepariwisataan Lampung Timur yang bertanggung jawab dan berwawasan global. Berdasarkan visi tersebut maka Kabupaten Lampung Timur mempunyai misi dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Timur di antaranya:

1. Pelestarian dan perlindungan terhadap alam dan budaya masyarakat Kabupaten Lampung Timur sebagai jati diri kepariwisataan Lampung Timur.
2. Optimalisasi potensi sumber daya alam Kabupaten Lampung Timur yang khas sebagai pendukung terciptanya pariwisata Kabupaten Lampung Timur yang berwawasan lingkungan

---

<sup>22</sup> BAPPEDA Lampung Timur

3. Peningkatan daya saing pariwisata Kabupaten Lampung Timur di tingkat nasional dan internasional melalui perencanaan dan pengelolaan pariwisata alam dan budaya Lampung Timur yang berkelanjutan untuk menjadi unggulan Indonesia
4. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan social melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Timur yang berkelanjutan dan berawasan lingkungan.

Salah satu strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Timur yaitu dengan memanfaatkan imbas dari adanya TNWK,<sup>23</sup> melalui:

- pembentukan desa wisata di desa-desa penyangga yang potensial dan peningkatan kapasitas pengelolanya. Contohnya menyediakan *homestay* Desa Braja Harjosari bagi para wisatawan ke TNWK.
- wisata desa tematik issues, seperti berbasis agrobisnis di Desa Braja Harjosari, dimana setiap KK diarahkan untuk menanam buah-buahan seperti jambu kristal, jeruk, buah naga, dan lain-lain.
- wisata bahari dan sungai, seperti wisata berbasis hutan mangrove di Desa Marga Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai. Desa Marga Sari berbatasan dengan Resor Kuala Penet di sebelah selatan. Diharapkan bisa menembus Sungai Way Kanan di dalam kawasan TNWK. (Perlu penyiapan infrastruktur seperti trek, speedboat)
- Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan aktif mengadakan event untuk meningkatkan promosi kawasan TNWK dan kawasan desa sekitarnya. Pada TA 2018, Dinas merencanakan sebanyak 101 *event*/festival, yang ditutup dengan Festival Way Kambas tahunan pada 11 November. Di dalamnya termasuk kegiatan yang dilakukan di 56 desa, dengan target peserta 1,000,000 orang. Pada 2017, ada 22 *event* yang diikuti oleh sekitar 500,000 peserta. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengalokasikan Rp 5 juta/desa untuk pendampingan dan promosi. Promosi juga dilakukan oleh Humas Kabupaten terutama melalui media sosial.

---

<sup>23</sup> Wawancara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Lampung Timur

### 3. TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KOLABORATIF DI KAWASAN KONSERVASI

#### 3.1. Konsep Dasar Pengelolaan Kolaboratif

Pendekatan pengelolaan kolaboratif (*co-management*) dalam pengelolaan kawasan konservasi telah lama dipromosikan oleh berbagai pihak. Pendekatan kolaboratif adalah sebuah kerangka kerja yang menggambarkan suatu situasi dengan satu atau lebih aktor sosial menegosiasikan, mendefinisikan dan menyepakati di antara mereka sendiri berkenaan dengan pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan suatu kawasan sumber daya tertentu serta menjamin adanya pembagian manfaat yang adil atas sumber daya tersebut.<sup>24</sup> Di dalamnya, kolaborasi dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik di antara para pemangku kepentingan; membangun modal sosial; memungkinkan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi ditangani bersama-sama; dan menghasilkan keputusan yang lebih baik (Conley dan Moote 2003).

Beberapa alasan substantif berkaitan dengan pentingnya pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi:<sup>25</sup>

- 1) Upaya konservasi membutuhkan kapasitas dan pelibatan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya para ahli konservasi, kaum profesional serta pihak pemerintah;
- 2) Upaya konservasi membutuhkan perhatian dalam mengkaitkan kepentingan keanekaragaman hayati dan kebudayaan yang memberi ruang bagi masyarakat lokal dan adat untuk secara aktif dan terberdayakan selama kolaborasi berlangsung;
- 3) Upaya konservasi membutuhkan perhatian dalam prinsip kesetaraan dan keadilan, baik pembagian biaya dan manfaat yang diterima baik dalam perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam maupun pemanfaatannya.
- 4) konservasi menuntut penghormatan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Prinsip "*do no harm*" dalam pelaksanaan konservasi penting dikedepankan agar tidak memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan. Apabila memungkinkan, diupayakan inisiatif konservasi untuk memberi dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Kelembagaan dalam pengelolaan kolaboratif perlu dilakukan sebagai aturan main (*rule of game*) dan organisasi, yang berperan penting dalam mengatur penggunaan/alokasi sumber daya secara efisien, sumber daya merata dan berkelanjutan (*sustainable*). Terdapat tiga komponen utama yang mencirikan kelembagaan yaitu (1) batas yuridiksi, (2) *property right*, (3) aturan representasi. Batas yuridiksi menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam kelembagaan. *Property right* mengandung pengertian hak dan kewajiban

<sup>24</sup> Borrini-Feyerabend, G, et al. 2007. Co-Management of Natural Resources: Organizing, Negotiating and Learning by Doing.

<sup>25</sup> Borrini-Feyerabend, G. 2015. Governance Diversity, Quality and Vitality: towards Shared Language and more Secure and Lasting Prospects for the Conservation of Nature. Presentasi di Workshop COMACON Bangkok: Oktober, 2015

yang didefinisikan dan diatur oleh hukum, adat dan tradisi atau konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumber daya. Sedangkan aturan representasi menentukan siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sumber daya yang dibicarakan (Rustiadi et al. 2011).

Langkah awal untuk mencapai efisiensi dalam alokasi sumber daya optimal adalah pembagian kerja (*division of labour*), sehingga setiap pekerja dapat bekerja secara profesional dengan produktivitas tinggi. Pembagian kerja selanjutnya mengarah pada spesialisasi ekonomi, sedangkan spesialisasi yang terus berlanjut akan mengarah pada peningkatan efisiensi dengan produktivitas yang semakin tinggi (Rustiadi et al. 2011).

Pendekatan kelembagaan dan prinsip-prinsip dalam membangun kolaborasi pengelolaan sumberdaya hutan (kawasan konservasi) adalah (1) kombinasi pendekatan teknis dan sosial menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kawasan, (2) kekuatan saling percaya (*trust*) dan saling menghormati antar pihak, (3) kesepahaman (*mutual understanding*) dan kesepakatan tujuan yang hendak dicapai bersama, (4) pembagian peran dan tanggung jawab setiap pihak, (5) pemenuhan kepentingan setiap pihak, dan (6) frekuensi komunikasi (Suharjito 2011).

Dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNWK 2017-2026, arahan dari rencana tersebut adalah pengelolaan TNWK yang lebih fokus dan terintegrasi dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sebuah pengelolaan kawasan TNWK yang kolaboratif, melibatkan kerjasama pemangku kepentingan yang berkepentingan terhadap kawasan TNWK termasuk masyarakat.

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Kolaboratif

Secara kerangka hukum, transformasi pengelolaan kolaborasi di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) termasuk taman nasional di Indonesia dari *government-based management* menjadi *collaborative management* telah dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.19/ Menhut-II/2004 tentang kolaborasi dalam pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Peraturan tersebut telah diganti dengan Permenhut No. P.85/Menhut-II/2014, dan direvisi di dalam PermenLHK No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 mengenai tata cara kerjasama penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan perundangan ini melihat pengelolaan kolaboratif sebagai kegiatan bersama pemangku kepentingan yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

Bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka penguatan fungsi kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati yang diatur Permenhut dan PermenLHK di atas, meliputi:

- a. kerja sama penguatan kelembagaan, yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan bantuan teknis serta penelitian dan pengembangan. Hal ini

- mencakup penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang konservasi, penyuluhan, pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat, penempatan tenaga asing yang profesional atau teknologi baru terkait konservasi;
- b. kerja sama perlindungan kawasan, meliputi kerjasama perlindungan dan pengamanan, antara lain dapat berupa kerjasama inventarisasi dan pembuatan peta kerawanan hutan, pencegahan gangguan, identifikasi tanda batas, penguatan tenaga pengamanan termasuk pembentukan pengamanan swakarsa, patroli dan penanggulangan kebakaran;
  - c. kerja sama pengawetan flora dan fauna, seperti kegiatan kerjasama identifikasi, inventarisasi, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan;
  - d. kerja sama pemulihan ekosistem, seperti rehabilitasi dan restorasi kawasan;
  - e. kerja sama pengembangan wisata alam, seperti kerjasama promosi, pembangunan sarana dan prasarana wisata alam, pembangunan pusat informasi dan pembinaan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di luar areal izin perusahaan pariwisata alam;
  - f. kerja sama pemberdayaan masyarakat, yang meliputi pengembangan Desa Konservasi, pemberian akses, fasilitasi kemitraan, pemberian izin perusahaan jasa wisata alam; dan pembangunan pondok wisata;
  - g. kerja sama pemasangan/penanaman pipa instalasi air, pemasangan pipa air yang sumber mata airnya berada di luar KSA dan KPA yang bersifat tidak komersial, namun jalurnya melalui KSA dan KPA; dan
  - h. kerja sama kemitraan konservasi, dapat berupa kerja sama pemulihan ekosistem antara unit pengelola dengan masyarakat, dalam rangka mengembalikan fungsi KSA dan KPA. Saat ini Ditjen KSDAE sedang menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara Kemitraan Konservasi Pada KSA dan KPA.

Mitra kerja sama di dalam pengelolaan KSA dan KPA yaitu pihak-pihak yang memiliki dana dan/atau keahlian teknis yang memiliki nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan pengelola teknis KSA dan KPA untuk mewujudkan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Mitra tersebut dapat berupa badan usaha, lembaga internasional, lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; kelompok masyarakat; lembaga swadaya masyarakat; perorangan; lembaga pendidikan; atau yayasan.

### 3.3. Kerja Sama Pengembangan Wisata Alam

Pelaksanaan pengembangan wisata alam di taman nasional tidak terlepas dari peraturan dan tata cara pelaksanaannya. Pemerintah melalui PP No. 36/2010 mengatur tata cara pelaksanaan perusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. PP 36/2010 ini menyempurnakan PP 18/1994 sebelumnya yang belum mengatur mengenai perusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa.

Pemerintah dalam hal ini telah memfasilitasi pemanfaatan KSA dan KPA dengan perizinan khusus (sesuai PP dan Permenhut) seperti Ijin Usaha Perusahaan Jasa Wisata Alam

(IUPJWA) dan/ atau Ijin Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA). Kemudian, dalam kaitan pelaksanaan di lapangan, Peraturan Pemerintah tersebut telah diturunkan melalui Permenhut P.4-Menhut-II-2012 Perubahan Atas Permenhut No.P.48 Tahun 2010, tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di suaka margasatwa,taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, *Pasal 9 : ayat (1) Pengusahaan pariwisata alam diberikan dalam bentuk IUPJWA dan/atau IUPSWA*. IUPJWA maupun IUPSWA di taman nasional dapat diajukan oleh masyarakat baik perseorangan maupun lembaga berbadan hukum koperasi atau swasta.

### 3.4. Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat

Secara konsep, Christensen dan Robinson (1989) dalam Robinson dan Green (2011) memandang pemberdayaan masyarakat sebagai sekelompok orang bekerja bersama-sama di dalam tatanan masyarakat pada keputusan bersama untuk menginisiasi sebuah proses perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan/aksi kolektif masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik (Batten 1974).

Pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA, menurut peraturan perundangan<sup>26</sup> bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan untuk mendukung kelestarian KSA dan KPA. Kepala KSA dan KPA melakukan penetapan lokasi dan kelompok masyarakat/desa yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan Rencana Pengelolaan KSA/KPA dan rencana pembangunan pembangunan daerah setempat. Setelah itu Kepala harus menyiapkan sebuah dokumen Rencana Pemberdayaan Masyarakat 5 tahunan yang melibatkan pemangku kepentingan.

Pemberdayaan masyarakat didahului oleh pengembangan kapasitas masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penguatan kelembagaan dan perubahan sikap. Kegiatan pengembangan kapasitas bisa melalui kegiatan pelatihan, pendampingan; dan/atau penyuluhan di bidang konservasi maupun ekonomi produktif yang mendukung konservasi, dan tata kelola pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pendampingan dilakukan dalam bentuk fasilitasi kegiatan, seperti:

- 1) pembentukan dan pengembangan kelompok;
- 2) penyusunan aturan kelompok atau AD/ART
- 3) kelompok/desa;
- 4) penyusunan rencana kerja kelompok/desa;
- 5) penyusunan naskah kemitraan;
- 6) proses perizinan;
- 7) pengembangan akses Informasi Pasar; dan/atau
- 8) pengembangan modal dan jenis usaha serta pasar.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan PermenLHK No. P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam



Sedangkan pelatihan tata kelola pemberdayaan masyarakat di antaranya pelatihan pembentukan kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, manajemen dan kegiatan teknis pemberdayaan masyarakat, pelaporan kegiatan, pengelolaan keuangan, dan/atau pemasaran.

Adapun bentuk pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA meliputi:

- a) pengembangan Desa Konservasi. Desa Konservasi yang telah ditetapkan mendapat prioritas untuk dikembangkan sebagai prioritas lokasi program/kegiatan pembangunan kehutanan; dan menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan kegiatan konservasi;
- b) pemberian akses, yang diberikan kepada kelompok masyarakat/desa di dalam zona/blok tradisional KPA. Pemberian akses melalui bentuk kerja sama, yang meliputi a) pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu; b) budi daya tradisional; c) perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; d) pemanfaatan sumber daya perairan terbatas untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi; atau e) wisata alam terbatas.;
- c) fasilitasi kemitraan, yang dilakukan oleh Kepala UPT untuk kelompok masyarakat dengan pihak ketiga. Hal ini dapat berupa pemberian akses permodalan; pemasaran; infrastruktur; kelembagaan; atau teknologi.;
- d) pemberian izin perusahaan jasa wisata alam; dan
- e) pembangunan pondok wisata, yang dilakukan oleh masyarakat di zona khusus dan/atau zona pemanfaatan taman nasional.

### 3.5. Pengembangan Desa Konservasi

Pengembangan desa konservasi merupakan salah satu bentuk konsep dan pelaksanaan pengelolaan kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar KSA atau KPA. Ketentuan pengembangan desa konservasi diatur dengan Peraturan Dirjen KSDAE, [P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018](#). Namun demikian, pemberdayaan masyarakat sekitar KPA telah ada dengan konsep model desa konservasi. Ketentuan pelaksanaan model desa konservasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan dan Keputusan Direktur Jenderal PHKA nomor SK 203/IV-KKBHL/2012 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi, yang digunakan untuk menyusun rencana induk. Selain itu, KLHK melalui Peraturan Dirjen PSKL No. P.23/PSKL/SET/PSL.3/12/2016 mengenai pedoman peran pelaku usaha dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, yang menjelaskan definisi, kriteria, dan ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya desa konservasi.

Desa konservasi yaitu suatu pendekatan model konservasi yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap kawasan konservasi dan berdampak positif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan konservasi. Ruang lingkup desa konservasi:

- 1) Pemberdayaan masyarakat setempat. Kegiatannya yaitu membangun kesepahaman dengan pihak terkait, mengembangkan kelembagaan di tingkat desa, pelatihan dan pelaksanaan PRA untuk perangkat desa, membangun kemitraan dan jejaring usaha produktif;
- 2) Penataan ruang/wilayah pedesaan berbasis konservasi. Penataan ruang diperlukan terkait pengembangan hutan rakyat, penerapan sistem tumpang sari, konservasi tanah, budi daya pakan ternak, lebah madu, tanaman buah, tanaman obat dll. Sementara kegiatan di dalam kawasan dapat disesuaikan dengan fungsi dan batasan yang telah ditentukan, seperti penangkaran satwa, budi daya flora langka, pengembangan jasa lingkungan air, dan pengembangan desa wisata.
- 3) Pengembangan ekonomi pedesaan berbasis konservasi. Contoh kegiatannya yaitu pengembangan variasi usaha berdasarkan potensi lokal, penyediaan produk ramah lingkungan, penguatan jaringan informasi tentang teknis dan sistem produksi antara kelompok Usaha sejenis, jejaring pemasaran, dan kemitraan antara kelompok ekonomi masyarakat dengan pelaku usaha dan pihak yang peduli lingkungan dan kepentingan masyarakat.

**Tabel 13.** Peraturan terkait Pelibatan Berbagai Pihak dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Co-Management	Peraturan	Keterangan
Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA untuk: 1. Penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati 2. Pembangunan strategis.	Permenhut No. P.85/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA	Kerjasama dalam rangka penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati : 1. Kerjasama penguatan kelembagaan; 2. Kerjasama perlindungan kawasan; 3. Kerjasama pengawetan flora dan fauna 4. Kerjasama pemulihan ekosistem; 5. Kerjasama pengembangan wisata alam; 6. Kerjasama pemberdayaan masyarakat. Terbitnya P.85/2014 ini mencabut Permenhut No. 19/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan KSA dan KPA. dimana peran pengelola KSA/KPA diperkuat sebagai pihak pertama dalam melakukan kerjasama pengelolaan, sementara dalam P.19/2004 pihak-pihak lain dapat bertindak sebagai inisiator kolaborasi pengelolaan KSA/KPA
IUPJWA (Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Wisata Alam) dan/ atau IUPSWA (Ijin Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam)	UU No. 5/1990 tentang KSDAHE	Pasal 34 huruf (3) "Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan TN, TAHURA & TWA dengan mengikutsertakan rakyat"
	PP No. 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, TAHURA,	PP 36/2010 ini menggantikan PP 18/1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan TN, TAHURA, dan TWA yang belum mengatur mengenai pengusahaan pariwisata alam di SM

Formatted Table

Co-Management	Peraturan	Keterangan
	Permenhut No. P.48/2010 tentang Pengusahaan Pari-wisata Alam di SM, TN, TAHURA, dan TWA.	Pasal 9 : (1) Pengusahaan pariwisata alam diberikan dalam bentuk IUPJWA dan/atau IUPSWA. Pada wilayah yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan diberikan kepada masyarakat setempat
Pemberdayaan masyarakat meliputi: 1. Pengembangan kapasitas masyarakat; 2. Pemberian akses pemanfaatan KSA atau KPA	Pasal 49 PP No. 28 /2011 jo PP No. 108/2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA	Dalam PP No. 108/2015 pemberdayaan masyarakat melalui: a. Pengembangan desa konservasi; b. Pemberian akses untuk memungut HHBK di zona/blok tradisional atau pemanfaatan tradisional; b. Fasilitasi kemitraan antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat:
	P.6/KSDAE/SET/Kum .1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	

Formatted Table

Pendekatan kolaborasi untuk pengelolaan kawasan konservasi dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan secara substansial menjadi pilihan dalam upaya mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Melaksanakan penilaian (*assessment*) terhadap efektivitas pengelolaan, merupakan amanah yang tercantum dalam *Convention of Biological Diversity (CBD) on Protected Areas*, yang mempunyai target bahwa tahun 2010 sekurang-kurangnya 30% dari Kawasan Konservasi di suatu negara sudah dilakukan penilaian efektivitas pengelolaan.<sup>27</sup> Pemerintah Indonesia, saat ini menggunakan perangkat METT (*Management Effectiveness Tracking Tools*) dalam mengukur tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.<sup>28</sup> Perangkat METT berisi pertanyaan-pertanyaan dan skoring yang menilai berbagai pengelolaan kawasan konservasi secara menyeluruh.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi maka Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadopsi perangkat METT untuk diimplementasikan di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini KLHK juga berkomitmen untuk mewujudkan pencapaian skor METT minimal 70%. Dalam METT tersebut, dari 4 aspek yang dinilai merupakan variabel yang menunjukkan pentingnya pelibatan berbagai pihak dalam peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (**Tabel 14**).<sup>29</sup>

<sup>27</sup> <https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta.../sbstta-14-05-en.pdf>

<sup>28</sup> Stolton, S. and N. Dudley. 2016. METT Handbook: A guide to using the Management Effectiveness Tracking Tool (METT). WWF-UK, Woking

<sup>29</sup> Dirjen KSDAE, KLHK. 2015. Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Jakarta

**Tabel 14.** Point METT terkait Pelibatan Berbagai Pihak dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nomer point METT	Bobot penilaian	Keterangan
Pemerintah dan swasta di sekitar	3	Bobot akan tinggi apabila pengelola kawasan menjalin kerjasama dengan pengguna lahan dan air di sekitar
Masyarakat adat	3	Bobot akan tinggi apabila masyarakat adat dapat secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, contoh <i>co-management</i>
Masyarakat lokal	3	Bobot akan tinggi apabila masyarakat lokal dapat secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, contoh <i>co-management</i> . Ada poin tambahan apabila masyarakat secara aktif mendukung kawasan konservasi (dengan adanya peraturan desa dan upaya lain oleh masyarakat)
Keuntungan ekonomis	3	Bobot akan tinggi apabila kawasan konservasi memberikan keuntungan ekonomi utama kepada masyarakat di sekitar kawasan konservasi

Formatted Table

Sumber: Dirjen KSDAE, KLHK. 2015. Pedoman Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Jakarta

Masyarakat sekitar selain diberdayakan dalam peningkatan ekonominya juga mutlak dijadikan mitra sejajar dalam upaya konservasi yang dilakukan. Mengingat mayoritas masyarakat sangat memahami situasi wilayah dan bahkan banyak pula yang mempunyai pengetahuan dan kearifan tradisional dalam konservasi. Selain itu, mengakomodasi dan mengakui hak-hak masyarakat dalam kawasan konservasi perlu diprioritaskan sebagai dasar penyelesaian konflik tenurial yang ada dan sekaligus menempatkannya sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut.

Pada hakikatnya, pendekatan kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi juga dapat didorong dengan mengikutsertakan lembaga penelitian/perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta perusahaan dan juga donor dalam upaya menghadapi tantangan yang ada. Peningkatan kapasitas sumber daya pengelola kawasan dapat menjadi kegiatan dalam kolaborasi dengan lembaga-lembaga ini, selain mendorong dana konservasi dari publik yang lebih luas.

Dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahun 2017-2026, arahan dari rencana tersebut adalah pengelolaan TNWK yang lebih fokus dan terintegrasi dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sebuah pengelolaan kawasan TNWK yang kolaboratif, melibatkan kerjasama pemangku kepentingan yang berkepentingan terhadap kawasan TNWK termasuk masyarakat.

#### 4. TANTANGAN PENGELOLAAN TNWK

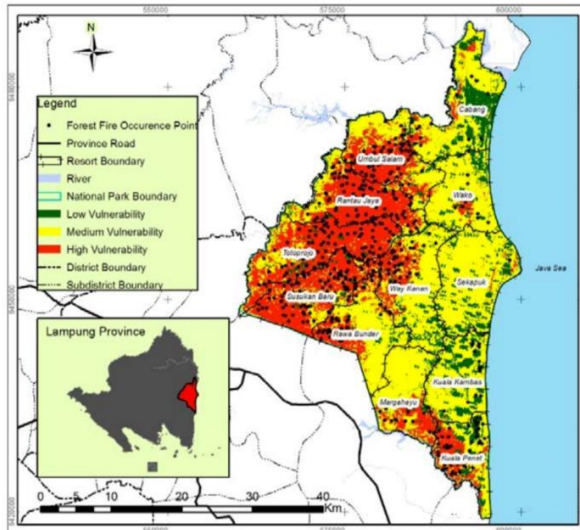
Potensi dan permasalahan di kawasan TNWK diidentifikasi melalui serangkaian wawancara kepada *stakeholder*, diskusi secara terfokus (*focus grup discussion*), dan dilengkapi dengan studi pustaka yang dilakukan pada April – Juni 2018. Keberadaan kawasan TNWK tidak terlepas dari interaksi masyarakat dengan kawasan tersebut. Selain kemudahan akses dan jarak yang sangat dekat, kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan hidup telah mendorong sebagian masyarakat untuk masuk ke dalam TNWK. Berbagai tekanan dan gangguan kawasan dalam skala kecil dan besar pun terjadi.

Secara umum permasalahan utama yang dinilai menjadi ancaman terhadap kawasan TNWK di antaranya:

- 1) **Kebakaran hutan.** Kebakaran hutan rutin terjadi di kawasan TNWK dengan faktor utama penyebab kebakaran adalah ulah manusia melalui kegiatan perambahan dan perburuan. Sampai dengan bulan Mei tahun 2018 telah terjadi 3 (tiga) kali kasus kebakaran di wilayah kerja Resor Pengelolaan Taman Nasional-RPTN Susukan Baru<sup>30</sup>. Penelitian Amalina et al. (2016) menyebutkan dari total wilayah TNWK, 42.711,2 ha wilayah (34%) memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan, 65.323,1 ha (52%) sedang, dan 16.330,8 ha (13%) rendah. Lokasi rawan kebakaran hutan tertinggi antara lain RPTN Susukan Baru (Seksi Pengelolaan Taman Nasional-SPTN I Way Kanan), RPTN Toto Projo, RPTN Umbul Salam dan RPTN Rantau Jaya Makmur (SPTN II Bungur) dan RPTN Margahayu dan RPTN Kuala Penet (SPTN III Kuala Penet). Semua resor dengan kerentanan tinggi terhadap kebakaran hutan didominasi padang alang-alang daratan.

---

<sup>30</sup> Komunikasi pribadi dengan Kepala Resor Susukan Baru.



Gambar 13 Peta Wilayah Rawan Kebakaran Hutan di TNWK (Amalina et al. 2016)

- 2) **Lahan kritis.** Sejak tahun 1996 tutupan hutan di TNWK memiliki proporsi yang tertinggi, namun luasannya berkurang akibat perubahan tutupan lahan yang mencapai 51.657,3 ha pada 2002-2010. Menurunnya luas tutupan hutan diikuti dengan peningkatan luas padang alang-alang yang mencapai 33% dari luas total TNWK. Ketika hutan rusak, alang-alang padang rumput akan tumbuh untuk menggantikannya. Proses suksesi baik buatan atau alami sering mengalami kegagalan karena terjadi kebakaran hutan berulang, aktivitas perambahan hutan (Amalina *et al.* 2016).
  
- 3) **Konflik Gajah.** Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48 /Menhut – II/2008, konflik manusia-satwa liar yang didalamnya termasuk gajah adalah segala interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan sosial manusia, ekonomi, kebudayaan dan pada konservasi gajah dan atau pada lingkungannya. Rusaknya habitat dan menurunnya kualitas ekosistem ditengarai merupakan penyebab penting beberapa satwa liar seperti gajah keluar untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga sering menimbulkan konflik dengan masyarakat. Konflik gajah umumnya terjadi di lahan budi daya, khususnya yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Dari studi yang dilakukan oleh Gunaryadi et al. (2017) pada 16 desa di sekitar TNWK pada Juli 2008-Maret 2009, telah terjadi 203 serangan gajah ke lahan masyarakat. WRU (WCS-TNWK) (2013) memperkirakan ± 314 serangan gajah antara Oktober 2013 - September 2014 dan konflik yang paling sering terjadi pada bulan Desember - Maret, Mei-Juni, dan Agustus. Ada sekitar 200-250 gajah dengan sekitar 75 individu yang terlibat dalam konflik antara satwa liar dan manusia (Rustiati *et al.* 2017).

Upaya untuk menyamakan pemahaman dalam model dan konsep penanganan konflik manusia dengan gajah sebenarnya telah direalisasikan dengan kebijakan dari

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten setempat. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 522/341/B/2008 tanggal 6 Maret 2008 mengenai Tim Kerja Terpadu Penanggulangan Konflik Gajah Manusia. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga menyalurkan bantuan ekonomi bagi masyarakat, serta membangun infrastruktur berupa kanal pada batas kawasan hutan dengan kebun dan permukiman penduduk daerah ini. Selanjutnya untuk meningkatkan upaya penanganan Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Lampung No.G/459/V.23/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung. Kebijakan ini berinisiatif untuk mengkoordinasikan penanganan konflik manusia dan satwa liar secara lintas kabupaten dengan keterpaduan penanganan.

Inisiatif masyarakat desa yang difasilitasi TNWK dan WCS-IP dengan terbentuknya Forum Rembug Desa Penyangga (FRDP) TNWK, yang secara sejarah berdiri tanggal 16 Januari 2007 dengan nama awal Forum Komunikasi Desa Penyangga TNWK. Forum ini dideklarasikan oleh 22 Kepala desa dan 14 kelompok masyarakat perwakilan desa penyangga. Tujuan forum ini sebagai media komunikasi, informasi dan berbagi pengalaman masyarakat desa penyangga terkait penanganan konflik gajah dan juga terkait pembangunan perdesaan.

- 4) **Perburuan liar.** Perburuan liar yang umum terjadi dan melibatkan masyarakat setempat adalah perburuan babi hutan, rusa sambar, kijang, dan burung serta pengambilan ikan air tawar di dalam kawasan TNWK. Sepanjang tahun 2017 staf Polisi Hutan (Polhut) Resor Susukan Baru menemukan dan menyita 97 jerat satwa di wilayah kerjanya<sup>31</sup>. Pada 10 April 2018, anggota Polhut Way Kambas menangkap pelaku perburuan rusa di seksi II, Way Bungur dengan barang bukti kepala dan daging rusa<sup>32</sup>. Selain itu, satwa langka yang dilindungi juga menjadi sasaran pemburuan seperti badak sumatera, harimau sumatera, dan gajah sumatera. Aktivitas ilegal ini melibatkan kelompok yang profesional dari luar dan sindikat perdagangan satwa langka.
- 5) **Pencurian kayu.** Pencurian kayu yang terjadi di TNWK untuk kebutuhan bangunan rumah dan perdagangan kayu ilegal termasuk dalam kategori skala kecil. Yang umum terjadi adalah pencurian kayu untuk pemenuhan **kayu bakar** rumah tangga dan industri skala rumah tangga. Lokasi yang sering terjadi aktivitas pencurian kayu, yaitu RPTN Cabang, RPTN Umbul Salam (SPTN II Bungur), RPTN Kuala Penet (SPTN III Kuala Penet). Penelitian secara khusus tentang kebutuhan kayu bakar dilakukan Rakatama (2016) pada tahun 2013 di desa Labuhan Ratu VI. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata permintaan kayu bakar warga adalah sekitar 487 kg/rumah tangga/bulan atau sekitar 5.840 kg /rumah tangga/ tahun. Kebutuhan kayu bakar terpenuhi terutama dari hutan TNWK dan dalam jumlah kecil ( $\pm$  10%) dari halaman belakang dan kebun masyarakat. Total permintaan kayu bakar dari hutan TNWK di desa Labuhan Ratu VI saja adalah sekitar **2.097,14 ton/tahun** atau sekitar **725,66 ha**.

<sup>31</sup>Komunikasi pribadi dengan Kepala Resor Susukan Baru.

<sup>32</sup><https://lampungpro.com/post/11493/polhut-way-kambas-anggota-rpu-tangkap-tersangka-perburuan-liar>



- 6) **Penggembalaan liar.** TNWK memiliki padang rumput yang cukup banyak, baik yang tumbuh di rawa-rawa ataupun lahan yang lebih kering di atasnya. Jenis ternak yang dilepaskan yaitu kerbau. Lokasi yang dijadikan areal penggembalaan liar di RPTN Bungur dan RPTN Kuala Penet. Jumlah ternak kerbau yang dilepaskan oleh pemiliknya mencapai 3500 ekor. Dengan adanya penggembalaan tersebut telah terjadi kompetisi antara kerbau dengan satwa yang ada di dalamnya, khususnya gajah dan rusa. Demikian juga, kemungkinan menularnya penyakit ke satwa liar (Zoonosis), yang dapat mematikan satwa liar.

Berbagai upaya dilakukan seperti dialog dengan masyarakat pemilik kerbau, aparat desa, kecamatan dan dinas terkait, monitoring dan penjagaan oleh petugas. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, jumlah kerbau yang masih dalam kawasan hutan 280 ekor<sup>33</sup>, sedangkan yang masuk ke PLG tercatat 57 kerbau.



Gambar 14 Kerbau milik masyarakat yang digembalakan di dalam kawasan TNWK

- 7) **Perambahan.** Perambahan besar saat ini relatif tidak terjadi lagi, kecuali di daerah-daerah pinggir pantai untuk berlabuh sementara nelayan. Beberapa kasus perambahan hutan skala besar yang pernah terjadi ketika masyarakat setempat mendirikan pemukiman dengan populasi lebih dari 2.000 jiwa di dalam TNWK. Penduduk membangun rumah dan pertanian untuk membentuk sebuah desa dan pada akhirnya ditranslokasi pada tahun 1984. Setelahnya, pada medio 2000-2008 terjadi lagi kasus perambahan hutan untuk ladang tanaman singkong seluas 6.000 ha yang dilakukan masyarakat di wilayah Resor Susukan Baru berdekatan dengan wilayah Desa Rantau Jaya Udik II. Kasus ini sudah diselesaikan pada 2010 oleh Balai TNWK melibatkan pemerintah desa setempat<sup>34</sup>. Saat ini pada lokasi tersebut dilakukan upaya restorasi secara terfokus.

Isu-isu strategis yang terungkap dari hasil pemetaan SOAR (*Strength, Opportunity, Aspiration and Result*) sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap kawasan meliputi flora, fauna dan ekosistemnya belum terlaksana dengan baik
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya secara in-situ dalam kawasan TNWK untuk mencegah kepunahan jenis, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis serta memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem belum terlaksana dengan baik.
- c. Penggalan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan TNWK untuk pemanfaatan terkendali baik pada tingkat ekosistem, flora dan fauna belum optimal

<sup>33</sup> Data TNWK

<sup>34</sup> Komunikasi pribadi dengan Koordinator PLG dan mantan kepala desa Rantau Jaya Udik II periode 2008-2014.

- d. Fungsi kawasan TNWK secara ekonomi belum seluruhnya terwujud, sehingga belum memberi manfaat nyata bagi kepentingan kemandirian Balai TNWK dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
- e. Pengelolaan kawasan TNWK belum terpadu dan sinergis dengan kegiatan pembangunan wilayah baik pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta kepentingan berbagai pihak dalam dan luar negeri.
- f. Kualitas dan kuantitas SDM pengelola kawasan hingga lingkup resor untuk mendukung implementasi RBM perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dibutuhkan untuk memenuhi distribusi SDM yang belum merata dan kemampuan teknis yang perlu ditingkatkan. Kapasitas organisasi untuk dukungan manajemen
- g. Mandat perlindungan habitat satwa yang dilindungi perlu ditingkatkan. Pengelolaan yang dilakukan saat ini lebih banyak pada pengelolaan satwa di Pusat Latihan Gajah (PLG) saja, sementara pengelolaan habitat alami harimau sumatera sebagai satwa yang menjadi dasar penetapan kawasan TNWK kurang diperhatikan.
- h. Adanya pusat perkembangbiakan satwa badak sumatera (SRS) yang pertama di Indonesia. Sebagai SRS pertama di Indonesia, maka posisi TNWK menjadi sangat strategis sebagai lokasi penelitian dan pengembangan teknologi dalam perkembangbiakan satwa badak. Keberadaan SRS wajib mendapat dukungan baik secara finansial, sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang-bidang yang terkait perkembangbiakan satwa Badak hingga sarana dan prasarana pendukungnya. SRS telah ditetapkan melalui SK Dirjen KSDAE 249/KSDAE-KKH/2015 tanggal 3 November 2015 sebagai salah satu *sanctuary* di TNWK. Mohon untuk lebih dipertajam sehingga terakomodir rencana kedepan untuk *sanctuary*. Demikian pula dengan halnya dengan RS gajah yang dibangun di TNWK.
- i. Peran mitra kerja juga harus terakomodir, termasuk rencana ke depan terhadap kelangsungan kegiatan mitra kerja tersebut. (profil mitra kerja dalam lampiran).

## 5. STRATEGI DAN RENCANA AKSI

Dari proses pemetaan strategi (*strategy mapping*) diperoleh pernyataan **Visi** dan **Visi Praktis (Misi)** dari Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK. Visi Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK berada di antara ranah *stakeholders* dan ranah *shareholders*, yang merupakan hasil (*results*) atau kekurangan (*lag*) dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh ranah *stakeholders*, tetapi juga merupakan pendorong (*drivers*) atau arahan (*lead*) untuk hasil akhir yang dinikmati oleh 'pemilik' (*shareholder*) yang berada di ranah *shareholders*.

### 5.1. Visi dan Misi

#### 5.1.1. Visi Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas

Visi merupakan gambaran sebuah kondisi yang ingin dicapai ke depan dalam jangka waktu tertentu yang menjadi arah pencapaian bagi seluruh stakeholder. Visi adalah cita-cita atau impian terukur yang ingin diwujudkan di masa depan dan merupakan hasil dari upaya yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Visi Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK yaitu:

"Terwujudnya Taman Nasional Way Kambas sebagai habitat ideal bagi satwa liar Sumatera yang dilindungi dan membawa kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar"

#### 5.1.2. Misi Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas

Misi merupakan "upaya-upaya strategis" yang diperlukan untuk mencapai sebuah kondisi ideal yang telah ditetapkan dalam Visi. Misi, setidaknya membantu pelaksana organisasi untuk mempunyai kerangka pikir yang jelas untuk bergerak dan bekerja.

Dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNWK tahun 2017-2026, misi pengelolaan TNWK yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kawasan TNWK secara keseluruhan yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan.
2. Mengawetkan keanekaragaman jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya di dalam kawasan TNWK.
3. Menggali dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang ada di dalam kawasan TNWK terutama untuk pemanfaatan wisata alam.
4. Mendayagunakan secara optimal potensi ekonomi kawasan TNWK pada zona pemanfaatan dan zona lainnya di luar zona inti untuk memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar kawasan.
5. Mensinergikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi kawasan TNWK dengan kepentingan daerah dan pihak-pihak terkait di dalam dan luar negeri.

## 5.2. Sasaran Pokok

Ada dua sasaran strategis yang hendak dicapai melalui perencanaan pengelolaan kolaboratif di TNWK ini, yaitu i) melestarikan sumber daya alam dan ekosistem di dalam kawasan TNWK sebagai sistem penyangga kehidupan, dan ii) memanfaatkan sumber daya alam dan ekosistem kawasan TNWK untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kedua sasaran strategis ini menjadi pilar untuk mencapai Visi TNWK.

1. Pada proses *strategy mapping*, visi praktis dimaknai sebagai sasaran pokok. Sasaran-sasaran pokok tersebut menyangkut lima keadaan ideal yang hendak diwujudkan melalui upaya pengelolaan kolaboratif di TNWK, yaitu:
2. Terbangunnya kapasitas kelembagaan pengelola TNWK yang kuat;
3. Terlindunginya kawasan secara keseluruhan dan keanekaragaman hayati dan ekosistem di dalam kawasan TNWK;
4. Tergali dan termanfaatkan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terutama untuk jasa lingkungan;
5. Terbangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar untuk mendukung kelestarian kawasan TNWK;
6. Sinergisitas manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi kawasan TNWK bagi kepentingan daerah dan pihak-pihak terkait di dalam dan luar negeri.



Gambar 15. Peta strategi (Strategy Map) Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK

### 5.3. Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas

Strategi merupakan cara-cara yang dianggap efisien dan efektif yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan utama (misi) dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhinya secara internal dan eksternal<sup>35</sup>. Strategi juga dipahami sebagai "...strategy is like a road map. It's a plan for getting from where we are to where we want to go"<sup>36</sup>.

Di dalam kerangka pikir perencanaan strategis melalui Pemetaan Strategi, terdapat kerangka logis, bahwa sebuah hasil akan dapat dicapai apabila dilakukan satu atau lebih upaya atau inisiatif tertentu. Alur logikanya adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran pokok yang telah ditetapkan, perlu dilakukan satu atau beberapa program/kegiatan strategis, utama, atau pokok. Di dalam kerangka pikir Pemetaan Strategi, sasaran-sasaran pokok berada pada ranah *stakeholders* dan kegiatan-kegiatan pokok berada pada ranah *operational*. Penyusunan rencana program/kegiatan kolaboratif ini terutama mengacu kepada PermenLHK No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang tata acara kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA.

Penyusunan strategi dan rencana aksi pengelolaan kolaborasi TNWK adalah untuk menjamin terwujudnya Taman Nasional Way Kambas sebagai habitat ideal bagi satwa liar Sumatera yang dilindungi dan membawa kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Upaya memaksimalkan perlindungan kawasan secara keseluruhan dan keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan TNWK menjadi prioritas utama. Selain itu juga perlu untuk memusatkan perhatian pada penguatan kelembagaan TNWK ditingkat tapak (resor) dan keterpaduan perencanaan serta pengembangan kawasan TNWK melalui kemitraan konservasi dalam skema pembagian peran dan manfaat secara berimbang agar pengelolaan kolaborasi TNWK dapat berjalan dengan baik. Pengembangan model desa binaan dan pengembangan model ekowisata terpadu menjadi target capaian penting yang dapat mengakselerasi pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar untuk mendukung kelestarian kawasan TNWK.

Rencana pengelolaan kolaborasi TNWK jangka waktu 2018 – 2023 terbagi 7 strategi utama yaitu:

- 8-1. Strategi penguatan kelembagaan TNWK di tingkat tapak (resor)
- 9-2. Strategi perlindungan kawasan secara keseluruhan dan keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan TNWK
- 10-3. Strategi pengawetan flora dan fauna melalui pembaruan data dan informasi serta pengembangannya
- 11-4. Strategi pembinaan habitat melalui pemulihan ekosistem
- 12-5. Strategi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TWK

**Formatted:** Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,95 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: 0,95 cm, Left

<sup>35</sup> Nawawi, H. 2003. Manajemen Strategis Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hal. 147

<sup>36</sup> Si Khan. 1982. Organizing , A Guide for Grasroots Leaders. McGraw-Hill Book Company. New York USA.

- 13.6. Strategi keterpaduan rencana tata ruang desa melalui pengembangan model desa binaan dan pengembangan model ekowisata terpadu
- 14.7. Strategi keterpaduan perencanaan dan pengembangan kawasan TNWK dengan pihak lain, melalui pengembangan kemitraan konservasi dalam skema peran dan pembagian manfaat dari perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya.

Ketujuh strategi ini mencerminkan paradigma 10 cara baru pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia yang tengah dikembangkan Ditjen KSDAE.<sup>37</sup>

Sesuai dengan tujuan Pengelolaan Rencana Kolaboratif, strategi di atas diterjemahkan ke dalam 2 program besar, dan 9 sub-program, dan beberapa rencana kegiatan yang dapat dilakukan secara kolaboratif oleh pemangku kepentingan. Program dan sub-program tersebut adalah:

- A. Program pelestarian sumber daya alam dan ekosistem di TNWK
  - Sub-program 1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Berbasis Resor (Resort-based Management/RBM)
  - Sub-program 2. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan
  - Sub-program 3. Pengawetan Flora dan Fauna
  - Sub-program 4. Pemulihan Ekosistem
  
- B. Program peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
  - Sub-program 5. Penyadartahuan Masyarakat
  - Sub-program 6. Pengembangan masyarakat berfokus pada komoditi pertanian dan kehutanan
  - Sub-program 7. Pengembangan Model Desa Binaan
  - Sub-program 8. Pengembangan Model Ekowisata Terpadu
  - Sub-program 9. Penguatan kolaborasi pemangku kepentingan di kawasan TNWK (Kemitraan Konservasi)

### 5.3.1. Strategi Penguatan Kelembagaan TNWK di Tingkat Tapak (Resor).

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan kawasan TNWK adalah kelembagaan yang kuat dan handal sampai ke tingkat tapak (resor). Perencanaan sistem pengelolaan berbasis resor (RBM) perlu dibangun di setiap resor agar pengelolaan kawasan TNWK dapat lebih efektif dan efisien. Kualitas dan kuantitas SDM pengelola kawasan hingga lingkup resor untuk mendukung implementasi RBM perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dibutuhkan untuk memenuhi distribusi SDM yang belum merata dan kemampuan teknis yang perlu ditingkatkan. Program dan rencana aksi untuk perwujudan strategi penguatan kelembagaan TNWK di tingkat tapak tersaji pada **Tabel 15**.

<sup>37</sup> Wiratno, 2018. Sepuluh Cara (Baru) Mengelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun "Learning Organization", Ditjen KSDAE, KLHK

**Tabel 15.** Program dan Rencana Aksi untuk Penguatan Kelembagaan TNWK di Tingkat Tapak (Resor)

	DESKRIPSI	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU
Program 1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Berbasis Resor ( <i>Resort-based Management/RBM</i> )					
1	Perencanaan sistem RBM	12 Resor	TNWK, WCS, AleRt, PILI	72,727	2018-2021
2	Penyusunan sistem pengelolaan informasi.	3 SPTN	TNWK, WCS, AleRt, PILI	13,636	2018-2021
3	Peningkatkan kapasitas staf (pelatihan)	12 Resor, 3 SPTN	TNWK, WCS, AleRt, PILI	36,364	2018-2021
4	Perubahan zonasi sesuai dengan tujuan kelola (revisi zonasi)	TNWK	TNWK, Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Timur dan Lampung Tengah, UNILA, WCS, AleRt, PKHS, YABI, PILI, FRD	21,273	2018-2021
5	Kajian dan pengembangan zona pemanfaatan tradisional.	5 resor yang berbatasan dengan desa	TNWK, WCS, AleRt, PILI	13,636	2018-2021

### 5.3.2. Strategi Perlindungan Kawasan Secara Keseluruhan dan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem di Kawasan TNWK.

Upaya perlindungan terhadap kawasan meliputi flora, fauna dan ekosistemnya memerlukan sebuah sistem mitigasi dan penanganan kerawanan kawasan yang baik agar perlindungan kawasan tersebut dapat berjalan efektif. Mandat perlindungan habitat satwa yang dilindungi perlu ditingkatkan. Pengelolaan yang dilakukan saat ini lebih banyak pada pengelolaan satwa di Pusat Latihan Gajah (PLG) saja, sementara pengelolaan habitat alami harimau sumatera sebagai satwa yang menjadi dasar penetapan kawasan TNWK masih kurang diperhatikan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan termasuk penanganan kebakaran, konflik satwa dan Tipihut harus terus dilakukan secara terarah sehingga diperlukan Rencana Mitigasi dan Rancang Tindak serta pengelolaan konflik termasuk *Standard Operational Procedure* penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal.

Kapasitas dan ketrampilan Polhut dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dalam mitigasi, pengelolaan dan penanganan kerawanan kawasan perlu dikembangkan karena Polhut dan MMP merupakan garda terdepan perlindungan kawasan TNWK Program dan rencana aksi untuk perwujudan strategi perlindungan kawasan secara keseluruhan dan keanekaragaman hayati serta ekosistem di kawasan TNWK tersaji pada **Tabel 16**.



**Tabel 16.** Program dan Rencana Aksi untuk Perlindungan Kawasan Secara Keseluruhan dan Keanekaragaman hayati serta Ekosistem di Kawasan TNWK

DESKRIPSI	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU	
<b>Sub-program 2.</b> Perlindungan dan Pengamanan Kawasan					
1	Inventarisasi, pemetaan, sistem kerawanan kawasan, termasuk potensi konflik dan kegiatan tindak pidana kehutanan (tipihut)	12 Resor	TNWK, WCS, AleRt, PILI	9,091	2018
2	Penyusunan rencana mitigasi dan rancang tindak serta pengelolaan konflik termasuk penyusunan sop penegakan hukum.	12 Resor, 3 SPTN	TNWK, WCS, AleRt, PILI	9,091	2018
3	Kegiatan perlindungan dan pengamanan termasuk penanganan kebakaran, konflik satwa dan tipihut	12 Resor	TNWK, WCS, AleRt, PILI	1,030,303	2018-2023
4	Pembangunan pos pemantauan dan pengawasan bersama di perbatasan kawasan TNWK	3 Resor Prioritas	TNWK, WCS, AleRt, KHS, PILI, Pemda Lampung Timur, Pemda Lampung Tengah dan Pemprov Lampung	6,061	2020-2021
5	Pengembangan kapasitas dan ketrampilan polhut dan masyarakat mitra polhut (mmp)	3 SPTN	TNWK, WCS, AleRt, PILI	18,182	2018
6	Pembentukan tim terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten untuk penanganan kegiatan ilegal (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA)	Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur dan Provinsi Lampung	TNWK, Muspida Provinsi Lampung, Muspida Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah	4,545	2018
7	Pengawasan kasus tindak pidana kehutanan.	12 Resor	TNWK, FORKOPIMDA, WCS, AleRt, PILI	60,606	2018-2023

### 5.3.3. Strategi Pengawetan Flora dan Fauna Melalui Pembaruan Data dan Informasi serta Pengembangannya.

Pembaharuan data dan informasi menjadi strategi penting dalam mendukung pengawetan flora dan fauna di TNWK. Data dan informasi yang diperoleh dari serangkaian kegiatan penelitian terarah dan memiliki capaian-capaian terukur akan memberikan informasi kepada pengelola kawasan bagaimana harus melakukan perlindungan dan pelestarian kawasan TNWK. Penelitian dan pemantauan yang terencana dan memiliki *road map* yang jelas perlu dilakukan terhadap jenis satwa kunci dan jenis flora asli di TNWK.

Kajian-kajian terhadap upaya pembinaan habitat dan populasi species kunci dapat menjadi pedoman pengelolaan agar perkembangan populasi jenis satwa kunci dapat meningkat secara dari tahun ke tahun. Hal penting lain di dalam pengawetan flora dan fauna adalah penelitian genetik dan DNA pada jenis satwa kunci dan jenis flora asli yang rentan akan kepunahan.

Pembelajaran pengelolaan dan pembinaan habitat seharusnya dapat dikembangkan dari 2 (dua) jenis satwa yang sudah sejak lama difokuskan pengelolaannya di TNWK yaitu gajah di Pusat Latihan Gajah (PLG) dan badak di Sumatran Rhino Sanctuary (SRS). Program dan rencana aksi untuk perwujudan strategi pengawetan flora dan fauna melalui pembaruan data dan informasi serta pengembangannya tersaji pada **Tabel 17**.

**Tabel 17.** Program dan Rencana Aksi untuk Pengawetan Flora dan Fauna Melalui Pembaruan Data dan Informasi Serta Pengembangannya

DESKRIPSI	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU
<b>Sub-program 3. Pengawetan Flora dan Fauna</b>				
1 Penyusunan <i>road map</i> penelitian flora dan fauna berjangka	12 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, PKHS, Vessweq, PILI	9,091	2018
2 Penelitian dan pemantauan spesies kunci fauna	12 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, PKHS, Vessweq, PILI	212,121	2018-2023
3 Inventarisasi vegetasi spesies asli dan kajian simpanan karbon	12 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, PKHS, Vessweq, PILI	72,727	2020
4 Penelitian dan koleksi DNA spesies kunci	12 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, PKHS, Vessweq, PILI	54,545	2018, 2021, 2023
5 Pembinaan habitat dan populasi spesies kunci, termasuk SOP pemanenan pakan, inventarisasi habitat, pengelolaan sumber pakan badak dan gajah	12 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, PKHS, Vessweq, PILI	75,758	2018-2023
6 Penguatan pengelolaan PLG dan SRS	PLG dan resor Margahayu	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, PKHS, Vessweq, PILI	22,727	2018
7 Pemantauan dan mitigasi dampak limbah cair kotoran sapi terhadap sungai di dalam kawasan	1 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, PILI	12,121	2018-2023

#### 5.3.4. Strategi Pembinaan Habitat melalui Pemulihan Ekosistem.

Kerusakan kawasan TNWK akibat kebakaran hutan maupun aktivitas ilegal lainnya saat ini perlu dipulihkan agar fungsi-fungsi ekosistem kawasan dapat meningkat kembali. Sejak tahun 1996 tutupan hutan di TNWK memiliki proporsi yang tertinggi, namun luasannya berkurang akibat perubahan tutupan lahan yang mencapai 51.657,3 ha pada 2002-2010. Saat ini peningkatan lahan kritis yang didominasi oleh peningkatan luas padang alang-alang telah mencapai 33% dari luas total TNWK. Proses suksesi baik buatan atau alami sering mengalami kegagalan karena terjadi kebakaran hutan berulang, aktivitas perambahan hutan. Oleh karena itu berbagai upaya pemulihan ekosistem perlu dipadukan

dengan upaya lainnya seperti penanganan kebakaran dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal perambahan hutan, agar berbagai upaya tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal. Program dan rencana aksi untuk perwujudan strategi pembinaan habitat melalui pemulihan ekosistem tersaji pada **Tabel 18**.

**Tabel 18.** Program dan Rencana Aksi untuk Pembinaan Habitat Melalui Pemulihan Ekosistem

DESKRIPSI	LOKASI	MITRA	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU	
Program 4. Pemulihan Ekosistem					
1	Revitalisasi rencana pemulihan ekosistem TNWK sesuai perubahan zonasi	12 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, PKHS, PILI, FRD, ORIGA	9,091	2018
2	Pemulihan ekosistem seluas 2.000 ha	2 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, PKHS, PILI, FRD, ORIGA	424,182	2018-2021

### 5.3.5. Strategi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terutama di wilayah desa penyangga merupakan bagian penting dalam mewujudkan cita-cita pengelolaan kolaboratif kawasan TNWK. Salah satunya adalah dengan mengembangkan pusat pendidikan lingkungan dan konservasi di sekitar TNWK. Peningkatan pendidikan konservasi dan penyadartahuan lingkungan harus dilakukan untuk mencapai perubahan perilaku masyarakat terhadap konservasi, khususnya perlindungan kawasan TNWK. Kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya kawasan TNWK bagi hidup dan kehidupan masyarakat di sekitarnya akan menumbuhkan upaya-upaya positif dalam pengelolaan kolaboratif kawasan TNWK. Dengan demikian diharapkan aktivitas ilegal dan merusak didalam kawasan TNWK dapat berkurang signifikan dan mampu menumbuhkan berbagai upaya masyarakat di penyangga kawasan yang mendukung kelestarian kawasan TNWK.

Program dan rencana aksi ini hendaknya dikemas dalam sistem pembelajaran bersama (*shared-learning*) dengan desa-desa penyangga Kawasan TNWK. Proses replikasi ke desa-desa sekitarnya akan lebih cepat tercapai ketika peningkatan kesadaran dan pengembangan pengetahuan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat desa lainnya.

Program dan rencana aksi untuk perwujudan strategi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK tersaji pada **Tabel 19**.

**Tabel 19.** Program dan Rencana Aksi untuk Peningkatan Kesadaran Kritis Masyarakat Terhadap Kelestarian Kawasan TNWK.

	DESKRIPSI	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU
<b>Sub-program 5. Penyardartahuan Masyarakat</b>					
1	Pembangunan fasilitas pusat edukasi lingkungan	Desa Rantau Jaya Udik II	TNWK, WCS, AleRt, PILI, UNILA, FRD	21,212	2020
2	Penyardartahuan dan edukasi lingkungan kepada masyarakat, pelajar dan anak-anak ( <i>school visit</i> , pendidikan konservasi, dll)	Desa Penyangga	TNWK, WCS, AleRt, PILI, UNILA, FRD	36,364	2018-2023

### 5.3.6. Strategi Keterpaduan Rencana Tata Ruang Desa Melalui Pengembangan Model Desa Binaan dan Pengembangan Model Ekowisata Terpadu.

Keberadaan desa-desa penyangga di kawasan Taman Nasional Way Kambas memerlukan sinergisitas dan kolaborasi didalam pengelolaan wilayahnya. Sebagai bagian dalam bentang alam Way Kambas, pengelolaan wilayah dan penataan ruang desa-desa penyangga seharusnya memiliki keterpaduan dengan rencana kelola TNWK. Dalam hal ini, peran dan nilai-nilai penting TNWK bagi desa penyangga harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan desa dan tata ruang desa penyangga sehingga meminimalkan berbagai kegiatan ekstraktif yang dapat menimbulkan degradasi fungsi kawasan TNWK.

Inisiatif-inisitif pengembangan model dan percontohan aktivitas masyarakat yang ramah lingkungan terutama sebagai alternatif mata pencaharian perlu terus didorong dan dikembangkan agar masyarakat dapat memahami dan memiliki keinginan untuk mereplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Manfaat kawasan TNWK baik secara langsung maupun tidak langsung perlu direalisasikan secara nyata dalam bentuk manfaat ekonomi melalui berbagai kegiatan ekowisata maupun aktivitas pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta aktivitas usaha ramah lingkungan lainnya agar "rasa memiliki" masyarakat terhadap kawasan TNWK terus meningkat.

Pengembangan model desa binaan dan model pengembangan ekowisata terpadu menjadi titik awal yang kuat bagi peningkatan dan pengembangan pengetahuan serta kinerja aparatur pemerintahan desa. Upaya-upaya kaji ulang dan sinkronisasi RPJMDesa dengan Rencana Kolaboratif Kawasan TNWK, penguatan kelembagaan BUMDes, inisiasi peraturan desa terkait aktivitas ilegal kehutanan, pengembangan desa asuh menjadi prioritas bagi pengembangan kapasitas kelembagaan desa terutama di desa-desa prioritas aksi pengelolaan kolaborasi kawasan TNWK.

Program dan rencana aksi untuk perwujudan strategi keterpaduan tata ruang melalui pengembangan model desa binaan dan pengembangan model ekowisata terpadu tersaji pada **Tabel 20**.

**Tabel 20.** Program dan Rencana Aksi untuk Keterpaduan Tata Ruang Desa Melalui Pengembangan Model Desa Binaan dan Pengembangan Model Ekowisata Terpadu

DESKRIPSI	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU	
<b>Sub-program 6.</b> Pengembangan masyarakat berfokus pada komoditi pertanian dan kehutanan					
1	Fasilitasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pertanian organik	5 desa	TNWK, WCS, AleRt, PILI	10,909	2018-2022
2	Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha masyarakat (seri pelatihan bersama dengan desa asuh di penyangga TNWK)	5 desa	TNWK, WCS, AleRt, PILI, FRD	9,091	2018-2020
3	Akses legal kerjasama (MoU) dan pemberdayaan kelompok unit usaha masyarakat pengembang hasil hutan bukan kayu, seperti pembibitan gaharu, anggrek dan madu	5 desa	TNWK, WCS, AleRt, PILI	3,030	2018-2020
<b>Sub-program 7.</b> Pengembangan Model Desa Binaan					
1	Fasilitasi rencana detil tata ruang desa binaan di penyangga kawasan termasuk penyusunan peraturan desa yang mengatur sanksi pelanggarannya (perburuan/penebangan).	Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II	TNWK, UNILA, WCS, AleRt, PILI	24,242	2018-2020
2	Kaji ulang dan sinkronisasi RPJMDes dan RKP di tingkat Desa Binaan	Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II	TNWK, WCS, AleRt, PILI	3,030	2018-2020
3	Pendampingan dan optimalisasi BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa yang memperkuat bisnis kelompok-kelompok masyarakat.	Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II	TNWK, WCS, AleRt, PILI, UNILA	7,273	2018-2021
4	Kegiatan pengembang hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti penangkaran satwa, pembibitan gaharu, anggrek dan madu (5 unit kelompok usaha masyarakat telah melakukan kerjasama dengan TNWK).	Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II	TNWK, WCS, AleRt, PILI	9,091	2018-2020
5	Pendampingan dan Pembuatan kebun bibit untuk penyediaan pemulihan ekosistem, pakan gajah dan badak, kayu komersial ( <i>community logging</i> ) di lahan masyarakat.	Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II	TNWK, WCS, AleRt, PILI	15,152	2018-2020
6	Instalasi biogas sebagai demplot substitusi kayu bakar	Rantau Jaya Udik II	TNWK, WCS, AleRt, PILI, Yapeka	12,121	2018-2020
7	Pembuatan kolam pemancingan ikan sebagai DTW	Braja Harjosari	TNWK, WCS, AleRt, PILI	5,455	2020
8	Penanganan kebakaran lahan	Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II	TNWK, WCS, Yapeka, AleRt	22,727	2018-2023
<b>Sub-program 8.</b> Pengembangan Model Ekowisata Terpadu					
1	Pengembangan model bisnis ekowisata terpadu dan penyusunan rencana tapak dan DED ekowisata terpadu pada 5 desa binaan	5 desa	TNWK, WCS, AleRt, PILI, YABI, Yapeka	10,606	2018-2020

DESKRIPSI	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU
2 Pengembangan program ekowisata berbasis masyarakat dan potensi jasa lingkungan lainnya	5 desa	TNWK, WCS, AleRt, PILI, YABI, Yapeka	27,273	2018-2021
3 Pelatihan kapasitas pengembangan ekowisata	5 desa	TNWK, WCS, AleRt, PILI, YABI, Yapeka	9,091	2018-2020
4 Pendampingan dan pengembangan Promosi dan Pemasaran	5 desa	TNWK, WCS, AleRt, PILI, YABI, Yapeka	27,273	2018-2021
5 Kajian dampak pengembangan ekowisata terpadu	5 desa	TNWK, WCS, AleRt, PILI, YABI, Yapeka	3,030	2021

### 5.3.7. Strategi Keterpaduan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan TNWK Melalui Kemitraan Konservasi Dalam Skema Peran dan Pembagian Manfaat Dari Sumber Daya Alam dan Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem.

Pengelolaan kawasan TNWK dengan pemangku kepentingan yang cukup beragam membutuhkan tata kelola yang adaptif. Dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahun 2017-2026, arahan dari rencana tersebut adalah pengelolaan TNWK yang lebih fokus dan terintegrasi dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sebuah pengelolaan kawasan TNWK yang kolaboratif, melibatkan kerjasama pemangku kepentingan yang berkepentingan terhadap kawasan TNWK termasuk masyarakat. Pengelolaan kolaboratif saat ini telah menjadi pilihan dalam pengelolaan kemitraan dalam jangka panjang di kawasan TNWK. Keterlibatan pemangku kepentingan, diharapkan mampu menangani berbagai persoalan di dalam pengelolaan kawasan TNWK.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pengelolaan kolaborasi di KSA dan KPA termasuk taman nasional di Indonesia telah diakomodir sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.19/ Menhut-II/ 2004 tentang kolaborasi dalam pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kebijakan terbaru tentang pengelolaan kolaborasi di kawasan konservasi diterbitkan melalui PermenLHK No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 mengenai tata cara kerjasama penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kunci keberhasilan pengelolaan kolaborasi di kawasan konservasi adalah komunikasi, komitmen dan berbagi peran. Berbagai upaya pengembangan komunikasi untuk membangun hubungan kerjasama yang kuat dan erat harus terus didorong melalui program komunikasi yang terstruktur dan sistematis dengan pembagian peran serta manfaat yang proporsional. Dalam skema kemitraan konservasi perlu untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha. Program dan rencana aksi untuk perwujudan strategi keterpaduan perencanaan dan pengembangan Kawasan TNWK melalui program kemitraan konservasi dalam skema peran dan pembagian manfaat dari sumber daya alam dan perlindungan serta pemanfaatan ekosistem tersaji pada **Tabel 21**.

**Tabel 21.** Program dan Rencana Aksi untuk Keterpaduan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan TNWK Melalui Kemitraan Konservasi Dalam Skema Peran dan Pembagian Manfaat Dari Sumber Daya Alam dan Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem

	DESKRIPSI	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU
<b>Sub-program 9.</b> Penguatan kolaborasi pemangku kepentingan di kawasan TNWK (Kemitraan Konservasi)					
1	Pertemuan konsultasi dan koordinasi forum dan dialog multipihak	Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur	TNWK, Pemprov, Pemkab, UNILA, WCS, AleRt, PKHS, YABI, PILI, FRD	36,364	2018-2023
2	Penguatan kelembagaan pada tingkat desa, termasuk Forum Rembug Desa penyangga kawasan TNWK	Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur	TNWK, Pemprov, Pemkab, UNILA, WCS, AleRt, PKHS, YABI, PILI, FRD	36,364	2018-2023
3	Penyusunan SOP bersama tentang perlindungan, konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem termasuk mekanisme pembagian peran dan manfaat bagi pemangku kepentingan	Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur	TNWK, Pemprov, Pemkab, UNILA, WCS, AleRt, PKHS, YABI, PILI, FRD	4,545	2018
4	Sinkronisasi rencana program dan penganggaran bersama pemangku kepentingan untuk optimalisasi Rencana Kolaborasi Kawasan TNWK.	Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur dan Provinsi Lampung	TNWK, Pempov, Pemkab, UNILA, WCS, AleRt, PKHS, YABI, PILI, FRD	36,364	2018
5.	Pengembangan <i>business process</i> terkait tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha dalam skema kemitraan konservasi	5 desa	TNWK, Pempov, Pemkab, UNILA, WCS, AleRt, PKHS, YABI, PILI, FRD	36,364	2018

#### 5.4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK

Program dan kegiatan dari pelaksanaan rencana pengelolaan kolaboratif TNWK Taman memerlukan pemantauan dan evaluasi secara sistematis dan terukur. Beberapa hal yang menjadi perhatian dan arahan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan rencana pengelolaan kolaboratif tersebut dapat efisien dan efektif adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan *knowlegment management tool* (dokumentasi proses), media SITROOM.
2. Monitoring/pemantauan dilakukan bersama oleh semua pemangku kepentingan terkait.
3. Monitoring/pemantauan dilakukan secara berkala setiap empat bulan (kwartalan).
4. Evaluasi dilakukan setiap tahun lewat pertemuan tahunan yang dilakukan bersama pemangku kepentingan.
5. Evaluasi tahunan harus mampu memberikan umpan balik kepada pengelola kawasan TNWK dan perbaikan serta revisi rencana kerja ke depan.

Untuk itu, di dalam melakukan pemantauan dan evaluasi memerlukan data dasar (*baseline data*) yang merujuk pada informasi yang menggambarkan berbagai aspek terkait kawasan TNWK dan desa-desa penyangga kawasan. Situasi atau kondisi kawasan TNWK sebelum berbagai aktivitas proyek di mulai, perlu dikumpulkan sebagai acuan pencapaian perubahan yang diinginkan melalui pengelolaan kolaboratif TNWK. Ketika proyek pengelolaan kolaboratif TNWK selesai (5 tahun), pengelola dapat mengumpulkan informasi kawasan yang sama dan membandingkannya “sebelum” dan “sesudah” kegiatan dilakukan serta melihat perubahan terjadi dan tingkat pencapaian target-target rencana pengelolaan kolaboratif TNWK yang telah ditetapkan. Program dan rencana aksi untuk perwujudan strategi pemantauan dan evaluasi rencana pengelolaan kolaboratif TNWK tersaji pada **Tabel 22**.

**Tabel 22.** Program Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK

DESKRIPSI	LOKASI	MITRA	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU
Program 10. Penguatan kolaborasi pemangku kepentingan di kawasan TNWK (Kemitraan Konservasi)				
1 Penyusunan <i>road map</i> masing-masing program dan basis data ( <i>baseline</i> ) Monev	Provinsi Lampung	TNWK, Pemrprov, Pemkab, UNILA, WCS, AleRt, PKHS, YABI, PILI, Yapeka, FRD	1,212	2018
2 Pemantauan Kwartalan dan evaluasi tahunan.	Provinsi Lampung	TNWK, Pemrprov, Pemkab, UNILA, WCS, AleRt, PKHS, YABI, PILI, FRD	9,091	2018-2023

Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan mendasarkan pada indikator keberhasilannya.

#### 5.4.1. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi Penguatan Kelembagaan TNWK di Tingkat Tapak (Resor)

Uraian indikator keberhasilan dari pelaksanaan strategi penguatan kelembagaan TNWK di tingkat tapak yang akan menjadi target pemantauan dan evaluasi tersaji pada **Tabel 23**.

**Tabel 23.** Indikator Program dan Rencana Aksi Penguatan Kelembagaan TNWK di Tingkat Tapak (Resor).

DESKRIPSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TATA WAKTU
Program 1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Berbasis Resor ( <i>Resort-based Management/RBM</i> )		
1 Perencanaan sistem RBM	Dua belas (12) paket dokumen perencanaan resor.	2018-2021
2 Penyusunan sistem pengelolaan informasi.	Tiga (3) paket perangkat dan sistemnya.	2018-2021
3 Peningkatkan kapasitas staf (pelatihan)	Sembilan (9) paket pelatihan untuk 60 staf): GPS, GIS, SIM SMART, pengenalan species, interpreter, fasilitator masyarakat, analisa bisnis, valuasi lingkungan, pemantauan kualitas air;	2018-2021
4 Perubahan zonasi sesuai dengan tujuan kelola (revisi zonasi)	Satu (1) paket dokumen revisi zonasi.	2018-2021
5 Kajian dan pengembangan zona pemanfaatan tradisional.	Lima (5) paket kajian dan pengembangan zona pemanfaatan tradisional di lima resor yang berbatasan dengan desa.	2018-2021



### 5.4.2. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi Perlindungan Kawasan Secara Keseluruhan dan Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem di Kawasan TNWK

Uraian indikator keberhasilan dari pelaksanaan strategi perlindungan secara keseluruhan dari keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan TNWK yang akan menjadi target pemantauan dan evaluasi tersaji pada **Tabel 24**.

**Tabel 24.** Indikator Program dan Rencana Aksi Perlindungan Kawasan Secara Keseluruhan dan Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem di Kawasan TNWK.

	DESKRIPSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TATA WAKTU
<b>Program 2. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan.</b>			
1	Inventarisasi, pemetaan, sistem kerawanan kawasan, termasuk potensi konflik dan kegiatan tindak pidana kehutanan (tipihut).	Satu (1) paket dokumen lengkap peta kerawanan dan sistem informasinya.	2018
2	Penyusunan rencana mitigasi dan rancang tindak serta pengelolaan konflik termasuk penyusunan SOP penegakan hukum.	Satu (1) paket rencana tindak dan mitigasi kerawanan dan pengelolaan konflik dan satu paket <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) penegakan hukum.	2018
3	Kegiatan perlindungan dan pengamanan termasuk penanganan kebakaran, konflik satwa dan tipihut.	Dua belas (12) paket laporan kegiatan (12 resor) perlindungan dan pengamanan termasuk penanganan kebakaran, konflik satwa dan tipihut.	2018-2023
4	Pembangunan Pos Pemantauan dan Pengawasan Bersama di perbatasan kawasan TNWK	Tujuh (7) paket pembangunan pos pemantauan dan pengawasan bersama di resor prioritas.	2020-2021
5	Pengembangan kapasitas dan ketrampilan polhut dan masyarakat mitra polhut (MMP).	Tiga (3) paket pelatihan di tingkat SPTN yang melibatkan 220 MMP gajah dan 64 MMP Pamhut, staf.	2018
6	Pembentukan tim terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten untuk penanganan kegiatan ilegal (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA)	Tiga (3) paket Dokumen berita acara pembentukan Tim Terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten untuk penanganan kegiatan ilegal (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA)	2018
7	Pengawasan kasus tindak pidana kehutanan.	Lima (5) sampai tujuh belas (17) kasus dikawal sampai pemberkasan P21.	2018-2023

### 5.4.3. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi Pengawetan Flora dan Fauna Melalui Pembaruan Data dan Informasi serta Pengembangannya

Uraian indikator keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengawetan flora dan fauna melalui pembaruan data dan informasi serta pengembangannya yang akan menjadi target pemantauan dan evaluasi tersaji pada **Tabel 25**.

**Tabel 25.** Indikator Program dan Rencana Aksi Pengawetan Flora dan Fauna Melalui Pembaruan Data dan Informasi serta Pengembangannya

	DESKRIPSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TATA WAKTU
<b>Program 3. Pengawetan Flora dan Fauna</b>			
1	Penyusunan <i>road map</i> penelitian flora dan fauna berjangka	Satu (1) paket dokumen <i>road map</i> penelitian.	2018
2	Penelitian dan pemantauan spesies kunci fauna	Tujuh (7) paket dokumen penelitian dan pemantauan spesies kunci (harimau sumatera, gajah, badak sumatera, beruang madu, tapir, mentok rimba, bangau storni).	2018-2023
3	inventarisasi vegetasi spesies asli dan kajian	Inventarisasi vegetasi spesies asli dan kajian	2020

	DESKRIPSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TATA WAKTU
	simpanan karbon	simpanan karbon.	
4	Penelitian dan koleksi DNA spesies kunci	Lima (5) dokumen penelitian dan lima spesies kunci.	2018, 2021, 2023
5	Pembinaan habitat dan populasi spesies kunci, termasuk SOP pemanenan pakan, inventarisasi habitat, pengelolaan sumber pakan badak dan gajah	Tujuh (7) dokumen pengelolaan habitat, termasuk kondisi, populasi spesies kunci.	2018-2023
6	Penguatan pengelolaan PLG dan SRS	Dua (2) paket dokumen perencanaan dan praktek terbaik pengelolaan PLG dan SRS.	2018
7	Pemantauan dan mitigasi dampak limbah cair kotoran sapi terhadap sungai di dalam kawasan	Empat (4) kali pemantauan dalam setahun.	2018-2023

#### 5.4.4. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi Pembinaan Habitat melalui Pemulihan Ekosistem

Uraian indikator keberhasilan dari pelaksanaan strategi pembinaan habitat melalui pemilihan ekosistem yang akan menjadi target pemantauan dan evaluasi tersaji pada **Tabel 26**.

**Tabel 26.** Indikator Program dan Rencana Aksi Pembinaan Habitat melalui Pemulihan Ekosistem.

	DESKRIPSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TATA WAKTU
<b>Program 4. Pengawetan Flora dan Fauna</b>			
1	Revitalisasi rencana pemulihan ekosistem TNWK sesuai perubahan zonasi	Satu (1) paket dokumen revitalisasi rencana pemulihan ekosistem TNWK sesuai perubahan zonasi.	2018
2	Pemulihan ekosistem seluas 2.000 ha	Satu (1) paket program/kegiatan teknis pemulihan ekosistem seluas 2.000 ha.	2018-2021

#### 5.4.5. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK

Uraian indikator keberhasilan dari pelaksanaan strategi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian Kawasan TNWK yang akan menjadi target pemantauan dan evaluasi tersaji pada **Tabel 27**.

**Tabel 27.** Indikator Program dan Rencana Aksi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK.

	DESKRIPSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TATA WAKTU
<b>Program 5. Pusat Edukasi Lingkungan dan Penyadartahuan Masyarakat</b>			
1	Pembangunan fasilitas pusat edukasi lingkungan	Satu (1) paket desain tapak dan pembangunan fasilitas pusat pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi.	2020
2	Penyadartahuan dan edukasi lingkungan kepada masyarakat, pelajar dan anak-anak ( <i>school visit</i> , pendidikan konservasi, dll)	Sedikitnya 40 -50 ribu orang terlibat dalam proses penyadartahuan dan edukasi lingkungan hidup dan konservasi.	2018-2023

#### 5.4.6. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK

Uraian indikator keberhasilan dari pelaksanaan strategi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian Kawasan TNWK yang akan menjadi target pemantauan dan evaluasi tersaji pada **Tabel 28**.

**Tabel 28.** Indikator Program dan Rencana Aksi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK.

	DESKRIPSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TATA WAKTU
<b>Program 6. Pengembangan masyarakat berfokus pada komoditi pertanian dan kehutanan</b>			
1	Fasilitasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pertanian organik	Satu (1) paket kegiatan Pertanian organik untuk 6 kelompok di 6 desa.	2018-2022
2	Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha masyarakat (seri pelatihan bersama dengan desa asuh di penyangga TNWK)	Satu (1) paket seri pelatihan manajemen usaha kelompok untuk 5 unit kelompok usaha di 5 desa prioritas.	2018-2020
3	Akses legal kerjasama (MoU) dan pemberdayaan kelompok unit usaha masyarakat pengembang hasil hutan bukan kayu, seperti pembibitan gaharu, anggrek dan madu	Satu (1) paket dokumen MoU dan perjanjian kerjasama TNWK dan Kelompok masyarakat untuk tiap-tiap kegiatan HHBK (pembibitan gaharu, budi daya anggrek alam, budi daya lebah madu)	2018-2020
<b>Program 7. Pengembangan Model Desa Binaan</b>			
1	Fasilitasi rencana detail tata ruang desa binaan di penyangga kawasan termasuk penyusunan peraturan desa yang mengatur sanksi pelanggarannya (perburuan/penebangan).	Lima (5) paket dokumen rencana detail tata ruang dan peraturan desa pada 5 desa binaan. [NOTE Di desa tua Labuhan ratu induk terdapat konflik tenurial]	2018-2020
2	Kaji ulang dan sinkronisasi RPJMDes dan RKP di tingkat Desa Binaan	Lima (5) paket dokumen sinkronisasi tentang rencana tata kelola wilayah dan pembangunan desa dan mekanisme kelembagaan di desa binaan.	2018-2020
3	Pendampingan dan optimalisasi BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa yang memperkuat bisnis kelompok-kelompok masyarakat.	Lima (5) paket dokumen asistensi perencanaan bisnis, pemasaran dan pengembangan usaha	2018-2021
4	Kegiatan pengembang hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti penangkaran satwa, pembibitan gaharu, anggrek dan madu.	Lima (5) unit kelompok usaha masyarakat telah melakukan kerjasama dengan TNWK dan usaha HHBK tersebut telah berjalan.	2018-2020
5	Pendampingan dan Pembuatan kebun bibit untuk penyediaan pemulihan ekosistem, pakan gajah dan badak, kayu komersial ( <i>community logging</i> ) di lahan masyarakat	.Satu (1) paket kegiatan pendampingan dan pembuatan kebun bibit untuk penyediaan pemulihan ekosistem, pakan gajah dan badak, kayu komersial ( <i>community logging</i> ) seluas ....	2018-2020
6	Instalasi biogas sebagai demplot substitusi kayu bakar	Dua (2) paket instalasi biogas pada 2 desa binaan	2018-2020
7	Pembuatan kolam pemancingan ikan sebagai DTW	Satu (1) paket kegiatan pembuatan kolam pancing di 1 desa binaan.	2020
8	Penanganan kebakaran lahan	Satu (1) paket kegiatan penanganan kebakaran di lokasi-lokasi prioritas.	2018-2023
<b>Program 8. Pengembangan Model Ekowisata Terpadu</b>			
1	Pengembangan model bisnis ekowisata terpadu dan penyusunan rencana tapak dan DED ekowisata terpadu pada 5 desa binaan	Lima (5) paket dokumen model pengembangan bisnis ekowisata terpadu beserta rencana tapaknya di 5 desa binaan.	2018-2020
2	Pengembangan program ekowisata berbasis masyarakat dan potensi jasa lingkungan lainnya	Lima (5) paket kegiatan pendampingan Pengembangan program ekowisata di 5 desa binaan	2018-2021
3	Pelatihan kapasitas pengembangan ekowisata	Lima (5) paket seri pelatihan ekowisata, meliputi sapta pesona, kampanye digital, perencanaan promosi dan pemasaran, pengembangan <i>homestay</i> di 5 desa binaan.	2018-2020
4	Pendampingan dan pengembangan Promosi dan Pemasaran	Lima (5) paket kegiatan pendampingan dan pengembangan promosi dan jaringan pemasaran di 5 desa binaan	2018-2021
5	Kajian dampak pengelolaan ekowisata terpadu	Satu (1) paket dokumen kajian dampak pengelolaan ekowisata terpadu di kawasan TNWK	2021

#### 5.4.7. Indikator Monitoring dan Evaluasi Strategi Keterpaduan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan TNWK Melalui Kemitraan Konservasi Dalam Skema Peran dan Pembagian Manfaat Dari Sumber Daya Alam dan Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem

Uraian indikator keberhasilan dari pelaksanaan strategi keterpaduan perencanaan dan pengembangan Kawasan TNWK yang akan menjadi target pemantauan dan evaluasi tersaji pada **Tabel 29**.

**Tabel 29.** Indikator Program dan Rencana Aksi Keterpaduan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan TNWK Melalui Kemitraan Konservasi Dalam Skema Peran dan Pembagian Manfaat Dari Sumber Daya Alam dan Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem.

	DESKRIPSI	INDIKATOR KEBERHASILAN	TATA WAKTU
<b>Program 9.</b> Penguatan kolaborasi pemangku kepentingan di kawasan TNWK (Kemitraan Konservasi)			
1	Pertemuan konsultasi dan koordinasi forum dan dialog multipihak	Satu (1) paket pertemuan rutin forum dialog multi pihak untuk konsultasi dan koordinasi setiap tahunnya.	2018-2023
2	Penguatan kelembagaan pada tingkat desa, termasuk Forum Rembug Desa penyangga kawasan TNWK	Enam (6) paket fasilitasi penguatan kelembagaan pada tingkat desa termasuk FRDP.	2018-2023
3	Penyusunan SOP bersama tentang perlindungan, konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem termasuk mekanisme pembagian peran dan manfaat bagi pemangku kepentingan	Satu (1) paket dokumen SOP dan mekanisme pembagian peran dan manfaat bagi pemangku kepentingan.	2018
4	Sinkronisasi rencana program dan penganggaran bersama pemangku kepentingan untuk optimalisasi Rencana Kolaborasi Kawasan TNWK.	Satu (1) paket kegiatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran bersama pemangku kepentingan untuk optimalisasi Rencana Kolaborasi Kawasan TNWK	2018
5	Pengembangan <i>business process</i> terkait tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha dalam skema kemitraan konservasi	Satu (1) paket dokumen <i>business process</i> kemitraan konservasi terkait tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, tata kelola usaha.	2018

Uraian seluruh matrik analisis kerangka logis dari strategi, program dan kegiatan serta indikator rencana pengelolaan kolaborasi di TNWk tersaji pada **Tabel 30**.

**Tabel 30.** Matrik LFA, Strategi, Program, kegiatan dan Indikator Pengelolaan Kolaboratif di TNWK, tahun 2018-2023

DESKRIPSI	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR
<b>VISI :</b> "Terwujudnya Taman Nasional Way Kambas sebagai habitat ideal bagi satwa liar Sumatera yang dilindungi dan membawa kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar".			
<b>TUJUAN 1:</b> melestarikan sumber daya alam dan ekosistem di TNWK sebagai sistem penyangga kehidupan			
<b>A. Program pelestarian sumber daya alam dan ekosistem di TNWK</b>			
<b>Luaran 1:</b> terbangun kapasitas kelembagaan yang dapat memenuhi pencapaian target pengelolaan kawasan TNWK	Penguatan kelembagaan TNWK di tingkat tapak (Resor)	<b>Sub-program 1: Pengembangan Sistem RBM</b>	
		<u>Arahan Kegiatan</u>	
		1. Perencanaan sistem RBM di 12 Resor.	Dua belas (12) paket dokumen perencanaan resor.
		2. Penyusunan sistem pengelolaan informasi di 3 SPTN.	Tiga (3) paket perangkat dan sistemnya.
		3. Peningkatkan kapasitas staf;	Sembilan (9) paket pelatihan untuk 60 staf): GPS, GIS, SIM SMART, pengenalan species, interpreter, fasilitator masyarakat, analisa bisnis, valuasi lingkungan, pemantauan kualitas air;
4. Perubahan zonasi sesuai dengan tujuan kelola.	Satu paket dokumen revisi zonasi.		
	5. Kajian dan pengembangan zona pemanfaatan tradisional.	Lima (5) paket kajian dan pengembangan zona pemanfaatan tradisional di lima resor yang berbatasan dengan desa.	
<b>Luaran 2:</b> terlindungi dan dikelola dengan baik keanekaragaman hayati dan ekosistem	Perlindungan kawasan secara keseluruhan dan keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan TNWK	<b>Sub-program 2: Pelindungan dan pengamanan kawasan</b>	
		<u>Arahan Kegiatan</u>	
		1. Inventarisasi dan pembuatan peta dan sistem kerawanan kawasan, termasuk potensi konflik dan kegiatan tindak pidana kehutan (tipihut).	Satu paket dokumen lengkap peta kerawanan dan sistem informasinya).
	2. Penyusunan rencana tindak dan mitigasi kerawanan dan pengelolaan konflik termasuk penyusunan SOP penegakan hukum.	Satu paket rencana tindak dan mitigasi kerawanan dan pengelolaan konflik dan satu paket <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) penegakan hukum).	
	3. Kegiatan perlindungan dan pengamanan, termasuk penanganan kebakaran, konflik satwa, tipihut di 12 resor.	Dua belas (12) paket laporan kegiatan (12 resor) perlindungan dan pengamanan termasuk penanganan kebakaran, konflik satwa dan tipihut.	

DESKRIPSI	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR
		4. Pembangunan pos pemantauan dan pengawasan bersama di perbatasan kawasan TNWK	Tujuh (7) paket pembangunan pos pemantauan dan pengawasan bersama di resor prioritas.
		5. Pengembangan kapasitas dan keterampilan Polhut dan MMP (pamswakarsa).	Tiga (3) paket pelatihan di tingkat SPTN yang melibatkan 220 MMP gajah dan 64 MMP Pamhut, staf.
		6. Pembentukan tim terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten untuk penanganan kegiatan ilegal (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA)	Tiga (3) paket dokumen berita acara pembentukan Tim Terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten untuk penanganan kegiatan ilegal (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA)
		7. Pengawalan kasus tipihut.	Lima (5) sampai tujuh belas (17) kasus dikawal sampai pemberkasan P21.
Luaran 3: Tersedia data ilmiah flora dan fauna serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	Pengawetan flora dan fauna melalui pembaruan data dan informasi serta pengembangannya	<b>Sub-program 3: Pengawetan flora dan fauna</b>	
		<i>Arahan Kegiatan</i>	
		1. Penyusunan <i>road map</i> penelitian flora dan fauna berjangka	Satu (1) paket dokumen <i>road map</i> penelitian.
		2. Penelitian dan pemantauan spesies kunci fauna	Tujuh (7) paket dokumen penelitian dan pemantauan spesies kunci (harimau sumatera, gajah, badak sumatera, beruang madu, tapir, mentok rimba, bangau stormi).
		3. Inventarisasi vegetasi spesies asli dan kajian simpanan karbon	Inventarisasi vegetasi spesies asli dan kajian simpanan karbon.
		4. Penelitian dan koleksi DNA spesies kunci	Lima (5) dokumen penelitian dan lima spesies kunci.
		5. Pembinaan habitat dan populasi spesies kunci, termasuk SOP pemanenan pakan, inventarisasi habitat, pengelolaan sumber pakan badak dan gajah	Tujuh (7) dokumen pengelolaan habitat, termasuk kondisi, populasi spesies kunci.
		6. Penguatan pengelolaan PLG dan SRS	Dua (2) paket dokumen perencanaan dan praktek terbaik pengelolaan PLG dan SRS.
		7. Pemantauan dan mitigasi dampak potensi zoonosis, limbah cair kotoran sapi terhadap sungai di dalam kawasan	Empat (4) kali pemantauan dalam setahun.
		<b>Sub-program 4: Pemulihan ekosistem</b>	
<i>Arahan Kegiatan</i>			

DESKRIPSI	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR
	Pembinaan habitat melalui Sub-program pemulihan ekosistem	1.Revitalisasi rencana pemulihan ekosistem TNWK sesuai perubahan zonasi. 2.Pemulihan ekosistem seluas 2.000 ha.	Satu (1) paket dokumen revitalisasi rencana pemulihan ekosistem TNWK sesuai perubahan zonasi. Satu (1) paket program /kegiatan teknis pemulihan ekosistem seluas 2.000 ha.
<b>TUJUAN 2:</b> Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa penyangga melalui pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam dan ekosistem di TNWK			
<b>B. Program peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat</b>			
Luaran 4: Terbangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar untuk mendukung kelestarian kawasan TNWK	Peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TWK	<b>Sub-program 5: Penyiapan masyarakat</b>	
		<u>Arahan Kegiatan</u>	
		1.Pembangunan fasilitas pusat edukasi lingkungan	Satu (1) paket desain tapak dan pembangunan fasilitas pusat pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi.
		2.Penyadartahuan dan edukasi lingkungan kepada masyarakat, pelajar dan anak-anak ( <i>school visit</i> , pendidikan konservasi, dll)	Sedikitnya 40 -50 ribu orang terlibat dalam proses penyadartahuan dan edukasi lingkungan hidup dan konservasi.
Keterpaduan rencana tata ruang desa melalui pengembangan model desa binaan dan pengembangan model ekowisata terpadu		<b>Sub-program 6: Pengembangan masyarakat berfokus pada komoditi pertanian dan kehutanan</b>	
		<u>Arahan Kegiatan</u>	
		1.Fasilitasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pertanian organik	Satu (1) paket kegiatan pertanian organik untuk 6 kelompok di 6 desa.
		2.Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha masyarakat ( seri pelatihan bersama dengan desa asuh di penyangga TNWK)	Satu (1) paket seri pelatihan manajemen usaha kelompok untuk 5 unit kelompok usaha di 5 desa prioritas.
		3.Pendampingan akses legal kerjasama (MoU) dan pemberdayaan kelompok unit usaha masyarakat pengembang hasil hutan bukan kayu, seperti pembibitan gaharu, anggrek dan madu	Satu (1) paket dokumen MoU dan perjanjian kerjasama TNWK dan Kelompok masyarakat untuk tiap-tiap kegiatan HHBK (pembibitan gaharu, budi daya anggrek alam, budi daya lebah madu)
		<b>Sub-program 7: Pengembangan Model Desa Binaan</b>	
		<u>Arahan Kegiatan</u>	
		1.Fasilitasi rencana detil tata ruang desa binaan di penyangga kawasan termasuk penyusunan peraturan desa yang mengatur sanksi pelanggarannya (perburuan/penebangan).	Lima (5) paket dokumen rencana detil tata ruang pada 5 desa binaan. [NOTE Di desa tua Labuhan ratu induk terdapat konflik tenurial]

DESKRIPSI	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR
		2.Kaji ulang dan sinkronisasi RPJMDes dan RKP di tingkat Desa Binaan	Lima (5) paket dokumen sinkronisasi tentang rencana tata kelola wilayah dan pembangunan desa dan mekanisme kelembagaan di desa binaan.
		3.Pendampingan dan optimalisasi BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa yang memperkuat bisnis kelompok-kelompok masyarakat.	Lima (5) paket dokumen asistensi perencanaan bisnis, pemasaran dan pengembangan usaha
		4.Kegiatan pengembang hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti penangkaran satwa, pembibitan gaharu, anggrek dan madu.	Lima (5) unit kelompok usaha masyarakat telah melakukan kerjasama dengan TNWK dan usaha HHBK tersebut telah berjalan.
		5.Pendampingan dan Pembuatan kebun bibit untuk penyediaan pemulihan ekosistem, pakan gajah dan badak, kayu komersial ( <i>community logging</i> ) di lahan masyarakat	.Satu (1) paket kegiatan pendampingan dan pembuatan kebun bibit untuk penyediaan pemulihan ekosistem, pakan gajah dan badak, kayu komersial ( <i>community logging</i> ) seluas ....
		6.Pemanfaatan kotoran gajah utk briket dan biogas sebagai demplot substitusi kayu bakar	Dua (2) paket instalasi biogas pada 2 desa binaan
		7.Pembuatan kolam pemancingan ikan sebagai DTW	Satu (1) paket kegiatan pembuatan kolam pancing di 1 desa binaan.
		8.Penanganan kebakaran lahan	Satu (1) paket kegiatan penanganan kebakaran di lokasi-lokasi prioritas.
<b>Sub-program 8: Pengembangan model ekowisata terpadu</b>			
<i>Arahan Kegiatan</i>			
		1.Pengembangan model bisnis ekowisata terpadu dan penyusunan rencana tapak dan DED ekowisata terpadu pada 5 desa binaan	Lima (5) paket dokumen model pengembangan bisnis ekowisata terpadu beserta rencana tapaknya di 5 desa binaan.
		2.Pengembangan program ekowisata berbasis masyarakat dan potensi jasa lingkungan lainnya	Lima (5) paket kegiatan pendampingan Pengembangan program ekowisata di 5 desa binaan
		3.Pelatihan kapasitas pengembangan ekowisata	Lima (5) paket seri pelatihan ekowisata, meliputi sapta pesona, kampanye digital, perencanaan promosi dan pemasaran, pengembangan <i>homestay</i> di 5 desa binaan.
		4.Pendampingan dan pengembangan promosi dan pemasaran	Lima (5) paket kegiatan pendampingan dan pengembangan promosi dan jaringan pemasaran di 5 desa binaan
		5.Kajian dampak pengembangan ekowisata terpadu	Satu (1) paket dokumen kajian dampak pengelolaan ekowisata terpadu di kawasan TNWK
<b>Luaran 5: Sinergi manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi</b>	Keterpaduan perencanaan dan pengembangan	<b>Sub-program 9: Penguatan kolaborasi pemangku kepentingan di kawasan TNWK</b>	
<i>Arahan Kegiatan</i>			



DESKRIPSI	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR
dari kawasan TNWK untuk kepentingan daerah dan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan internasional	kawasan TNWK melalui Kemitraan Konservasi dalam skema peran dan pembagian manfaat dari sumber daya alam dan perlindungan dan pemanfaatan ekosistem	1. Pertemuan konsultasi dan koordinasi forum dan dialog multipihak	Satu (1) paket pertemuan rutin forum dialog multi pihak untuk konsultasi dan koordinasi setiap tahunnya.
		2. Penguatan kelembagaan pada tingkat desa, termasuk Forum Rembug Desa penyangga kawasan TNWK	Enam (6) paket fasilitasi penguatan kelembagaan pada tingkat desa termasuk FRDP.
		3. Penyusunan SOP bersama tentang perlindungan, konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem termasuk mekanisme pembagian peran dan manfaat bagi pemangku kepentingan	Satu (1) paket dokumen SOP dan mekanisme pembagian peran dan manfaat bagi pemangku kepentingan.
		4. Sinkronisasi rencana program dan penganggaran bersama pemangku kepentingan untuk optimalisasi Rencana Kolaborasi Kawasan TNWK.	Satu (1) paket kegiatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran bersama pemangku kepentingan untuk optimalisasi Rencana Kolaborasi Kawasan TNWK
		5. Pengembangan <i>business process</i> terkait tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha dalam skema kemitraan konservasi	Satu (1) paket dokumen <i>business process</i> kemitraan konservasi terkait tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, tata kelola usaha.
<b>C. Pemantauan dan Evaluasi</b>			
Menyiapkan Rencana Tindak MONEV yang dilakukan dengan melibatkan para penerima manfaat		<b>Program Pengembangan pemantauan dan evaluasi</b>	
		<u>Arahan Kegiatan</u>	
		1. Penyusunan basis data ( <i>baseline</i> ) Monev	Satu paket dokumen pengembangan basis data Monev
		2. Pemantauan kwartalan dan evaluasi tahunan.	Lima belas (15) paket dokumentasi pemantauan dan satu paket evaluasi.

Rekapitulasi pagu indikatif dari pelaksanaan strategi, program dan kegiatan serta indikator rencana pengelolaan kolaborasi di TNWK Tahun 2018-2023 tersaji pada **Tabel 31**. Adapun detail alokasi kebutuhan anggaran untuk tersaji pada **Tabel 32**.

**Tabel 31.** Rekapitulasi pagu indikatif pelaksanaan program dan sub program rencana pengelolaan kolaborasi TNWK tahun 2018-2023.

STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU					PENDANAAN	
			2018	2019	2020	2021	2022	SGP	Sumber Lain
<b>A. Program pelestarian sumber daya alam dan ekosistem di TNWK</b>		<b>2,187,879</b>	<b>572,121</b>	<b>547,879</b>	<b>493,333</b>	<b>278,182</b>	<b>296,364</b>	<b>277,085</b>	<b>1,910,794</b>
1. Penguatan kelembagaan TNWK di tingkat tapak (Resor)	Sub-program 1: Pengembangan Sistem RBM	157,636	52,545	52,545	52,545	-	-	77,600	80,036
2. Perlindungan kawasan secara keseluruhan dan keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan TNWK	Sub-program 2: Pelindungan dan pengamanan kawasan	1,137,879	259,091	221,212	221,212	218,182	218,182	32,576	1,105,303
3. Pengawetan flora dan fauna melalui pembaruan data dan informasi serta pengembangannya	Sub-program 3: Pengawetan flora dan fauna	459,091	110,000	132,727	78,182	60,000	78,182	91,667	367,424
4. Pembinaan habitat melalui Sub-program pemulihan ekosistem	Sub-program 4: Pemulihan ekosistem	433,273	150,485	141,394	141,394	-	-	75,242	358,030
<b>B. Program peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat</b>		<b>356,667</b>	<b>114,545</b>	<b>128,485</b>	<b>54,545</b>	<b>30,909</b>	<b>28,182</b>	<b>124,394</b>	<b>232,273</b>
5. Peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK	Sub-program 5: Penyadartahuan masyarakat	57,576	7,273	28,485	7,273	7,273	7,273	28,788	28,788
6. Keterpaduan rencana tata ruang desa melalui pengembangan model desa binaan dan pengembangan model ekowisata terpadu	Sub-program 6: Pengembangan masyarakat berfokus pada komoditi pertanian dan kehutanan	23,030	8,788	8,788	2,727	2,727	-	11,515	11,515
	Sub-program 7: Pengembangan Model Desa Binaan	99,091	35,455	47,576	6,970	4,545	4,545	30,909	68,182
	Sub-program 8: Pengembangan model ekowisata terpadu	77,273	28,788	27,273	21,212	-	-	22,273	55,000
7. Keterpaduan perencanaan dan pengembangan kawasan TNWK melalui Kemitraan Konservasi dalam skema peran dan pembagian manfaat dari sumber daya alam dan perlindungan dan pemanfaatan ekosistem	Sub-program 9: Penguatan kolaborasi pemangku kepentingan di kawasan TNWK	89,394	31,212	14,545	14,545	14,545	14,545	25,758	63,636
Menyiapkan Rencana Tindak MONEV yang dilakukan dengan melibatkan para penerima manfaat	Pemantauan dan Evaluasi	10,303	3,030	1,818	1,818	1,818	1,818	5,152	5,152
<b>Total</b>		<b>2,544,545</b>	<b>686,667</b>	<b>676,364</b>	<b>547,879</b>	<b>309,091</b>	<b>324,545</b>	<b>401,479</b>	<b>2,143,067</b>

**Tabel 32.** Alokasi anggaran untuk pelaksanaan strategi, program dan kegiatan Program Pengelolaan Kolaboratif di TNWK, Tahun 2018-2023

STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU					PENDANAAN	
					2018	2019	2020	2021	2022	SGP	Sumber Lain
A. Program pelestarian sumber daya alam dan ekosistem di TNWK			<b>TOTAL</b>	<b>2,187,879</b>	<b>572,121</b>	<b>547,879</b>	<b>493,333</b>	<b>278,182</b>	<b>296,364</b>	<b>277,085</b>	<b>1,910,794</b>
<b>Sub-program 1: Pengembangan Sistem RBM</b>				<b>157,636</b>	<b>52,545</b>	<b>52,545</b>	<b>52,545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,600</b>	<b>80,036</b>
<i>Arahan Kegiatan</i>											
Penguatan kelembagaan TNWK di tingkat tapak (Resor)	1. Perencanaan sistem RBM di 12 Resor.	12 Resor	TNWK, WCS, YABI, PILI	72,727	24,242	24,242	24,242			36,364	36,364
	2. Penyusunan sistem pengelolaan informasi di 3 SPTN.	3 SPTN	TNWK, WCS, YABI	13,636	4,545	4,545	4,545			9,091	4,545
	3. Peningkatkan kapasitas staf	12 Resor, 3 SPTN	TNWK, WCS, YABI	36,364	12,121	12,121	12,121			14,545	21,818
	4. Perubahan zonasi sesuai dengan tujuan kelola.	TNWK	TNWK, Pemprov, Pemkab, UNILA, WCS, AleRt, PKHS, YABI, PILI, FRDP	21,273	7,091	7,091	7,091			8,509	12,764
	5. Kajian dan pengembangan zona pemanfaatan tradisional.	5 resor	TNWK, WCS, YABI, PILI	13,636	4,545	4,545	4,545			9,091	4,545
<b>Sub-program 2: Pelindungan dan pengamanan kawasan</b>				<b>1,137,879</b>	<b>259,091</b>	<b>221,212</b>	<b>221,212</b>	<b>218,182</b>	<b>218,182</b>	<b>32,576</b>	<b>1,105,303</b>
<i>Arahan Kegiatan</i>											
Pelindungan kawasan secara keseluruhan dan keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan TNWK	1. Inventarisasi dan pembuatan peta dan sistem kerawanan kawasan, termasuk potensi konflik dan kegiatan tipihut.	12 Resor	TNWK, WCS, YABI, KHS, PKHS, AleRt	9,091	9,091					4,545	4,545
	2. Penyusunan rencana tindak dan mitigasi kerawanan dan pengelolaan konflik termasuk penyusunan SOP penegakan hukum.	12 Resor, 3 SPTN	TNWK, WCS, YABI, KHS, PKHS, AleRt	9,091	9,091					4,545	4,545

STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU					PENDANAAN	
					2018	2019	2020	2021	2022	SGP	Sumber Lain
	3. Kegiatan perlindungan dan pengamanan, termasuk penanganan kebakaran, konflik satwa, tipihut di 12 resor (12 paket laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan)	12 Resor	TNWK, WCS, YABI, KHS, PKHS, AleRt	1,030,303	206,061	206,061	206,061	206,061	206,061		1,030,303
	4. Pembangunan Pos Pemantauan dan Pengawasan Bersama di perbatasan kawasan TNWK	3 Resor Prioritas	TNWK, WCS, AleRt, KHS, PILI, Pemda Lampung Timur, Pemda Lampung Tengah dan Pemprov Lampung	6,061		3,030	3,030				6,061
	5. Pengembangan kapasitas dan keterampilan Polhut dan MMP (pamswakarsa).	3 SPTN	TNWK, WCS, YABI, KHS, PKHS, AleRt	18,182	18,182					9,091	9,091
	6. Pembentukan tim terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten untuk penanganan kegiatan ilegal (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA)	-	TNWK, Muspida Provinsi Lampung, Muspida Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah	4,545	4,545					2,273	2,273
	7. Pengawasan tindak pidana kehutanan.	12 Resor	TNWK, FORKOPIMDA, PKHS, WCS, AleRt, PILI	60,606	12,121	12,121	12,121	12,121	12,121	12,121.21	48,485
	<b>Sub-program 3: Pengawetan flora dan fauna</b>			<b>459,091</b>	<b>110,000</b>	<b>132,727</b>	<b>78,182</b>	<b>60,000</b>	<b>78,182</b>	<b>91,667</b>	<b>367,424</b>
	<u>Arahan Kegiatan</u>										
Pengawetan flora dan fauna melalui pembaruan data dan informasi serta pengembangannya	1. Penyusunan <i>road map</i> penelitian flora dan fauna berjangka	12 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, KHS, PKHS, Vesswic, PILI	9,091	9,091					4,545	4,545

STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU					PENDANAAN	
					2018	2019	2020	2021	2022	SGP	Sumber Lain
	2. Penelitian dan pemantauan spesies kunci fauna	12 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, KHS, PKHS, Vesswic, PILI	212,121	42,424	42,424	42,424	42,424	42,424	26,515	185,606
	3. Inventarisasi vegetasi spesies asli dan kajian simpanan karbon	12 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, KHS, PKHS, Vesswic, PILI	72,727		72,727				12,121	60,606
	4. Penelitian dan koleksi DNA spesies kunci		TNWK, UNILA, YABI, WCS, Vesswic	54,545	18,182		18,182		18,182	27,273	27,273
	5. Pembinaan habitat dan populasi spesies kunci, termasuk SOP pemanenan pakan, inventarisasi habitat, pengelolaan sumber pakan badak dan gajah	12 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, KHS, PKHS, Vesswic	75,758	15,152	15,152	15,152	15,152	15,152	9,470	66,288
	6. Penguatan pengelolaan PLG dan SRS	PLG dan resor Margahayu	TNWK, YABI, WCS, KHS, PKHS, Vesswic,	22,727	22,727					5,682	17,045
	7. Pemantauan dan mitigasi dampak limbah cair kotoran sapi terhadap sungai di dalam kawasan		TNWK, UNILA, WCS, Vesswic, YABI	12,121	2,424	2,424	2,424	2,424	2,424	6,061	6,061
	<b>Sub-program 4: Pemulihan ekosistem</b>			<b>433,273</b>	<b>150,485</b>	<b>141,394</b>	<b>141,394</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,242</b>	<b>358,030</b>
	<i>Arahan Kegiatan</i>										
Pembinaan habitat melalui Sub-program pemulihan ekosistem	1. Revitalisasi rencana pemuliharaan ekosistem TNWK sesuai perubahan zonasi (satu paket dokumen).	12 Resor	TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, PKHS, PILI, FRDP	9,091	9,091					4,545	4,545
	2. Pemulihan ekosistem seluas 2.000 ha (satu paket rencana teknis pemulihan ekosistem per kegiatan).		TNWK, UNILA, YABI, WCS, AleRt, PKHS, PILI, FRDP	424,182	141,394	141,394	141,394			70,697	353,485

STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU					PENDANAAN	
					2018	2019	2020	2021	2022	SGP	Sumber Lain
B. Program peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat				321,818							
Peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNWK	<b>Sub-program 5: Penysadartahuan masyarakat</b>			57,576	7,273	28,485	7,273	7,273	7,273	28,788	28,788
	<i>Arahan Kegiatan</i>										
	1. Pembangunan fasilitas pusat edukasi lingkungan	Rantau Jaya Udik II	TNWK, WCS, AleRt, PILI, UNILA, FRD, Yapeka, YABI	21,212		21,212				10,606	10,606
	2. Penysadartahuan dan edukasi lingkungan kepada masyarakat, pelajar dan anak-anak ( <i>school visit</i> , pendidikan konservasi, dll)	Desa Penyangga	TNWK, WCS, AleRt, PILI, UNILA, FRD, Yapeka, YABI	36,364	7,273	7,273	7,273	7,273	7,273	18,182	18,182
Keterpaduan rencana tata ruang desa melalui pengembangan model desa binaan dan pengembangan model ekowisata terpadu	<b>Sub-program 6: Pengembangan masyarakat berfokus pada komoditi pertanian dan kehutanan</b>			23,030	8,788	8,788	2,727	2,727	-	11,515	11,515
	<i>Arahan Kegiatan</i>										
	1. Fasilitasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pertanian organik		TNWK, Alert, FRDP, Yapeka, PILI	10,909	2,727	2,727	2,727	2,727		5,455	5,455
	2. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha masyarakat (seri pelatihan bersama dengan desa asuh di penyangga TNWK)		TNWK, WCS, AleRt, Yapeka, PILI, FRD	9,091	4,545	4,545				4,545	4,545
3. Pendampingan akses legal kerjasama (MoU) dan pemberdayaan kelompok unit usaha masyarakat pengembang hasil hutan bukan kayu, seperti pembibitan gaharu, anggrek dan madu, penangkaran satwa (mamalia, burung)		TNWK, Alert, FRDP, Yapeka, PILI	3,030	1,515	1,515				1,515	1,515	

STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU					PENDANAAN		
					2018	2019	2020	2021	2022	SGP	Sumber Lain	
	<b>Sub-program 7: Pengembangan Model Desa Binaan</b>			<b>76,364</b>	<b>30,909</b>	<b>43,030</b>	<b>2,424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,909</b>	<b>45,455</b>	
	<i>Arahan Kegiatan</i>											
	1. Fasilitasi rencana detil tata ruang desa binaan di penyangga kawasan termasuk penyusunan peraturan desa yang mengatur sanksi pelanggarannya (perburuan/penebangan).	Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II	TNWK, UNILA, WCS, AleRt, PILI	24,242	12,121	12,121					4,848	19,394
	2. Kaji ulang dan sinkronisasi RPJMDes dan RKP di tingkat Desa Binaan	Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II	TNWK, WCS, AleRt, PILI, Yapeka	3,030	1,515	1,515					1,515	1,515
	3. Pendampingan dan optimalisasi BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa yang memperkuat bisnis kelompok-kelompok masyarakat.	Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II	TNWK, WCS, AleRt, PILI, UNILA, Yapeka	7,273	2,424	2,424	2,424				3,636	3,636
	4. Kegiatan pengembang hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti penangkaran satwa, pembibitan gaharu, anggrek dan madu.	Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II	TNWK, UNILA, WCS, KHS, Yapeka, AleRt, PILI	9,091	4,545	4,545					4,545	4,545
	5. Pendampingan dan Pembuatan kebun bibit untuk penyediaan pemulihan ekosistem, pakan gajah dan badak, kayu komersial ( <i>community logging</i> ) di lahan masyarakat	Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II	TNWK, UNILA, WCS, KHS, Yapeka, AleRt, PILI	15,152	7,576	7,576					7,576	7,576

STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU					PENDANAAN		
					2018	2019	2020	2021	2022	SGP	Sumber Lain	
	6. Pemanfaatan kotoran gajah utk briket dan biogas sebagai demplot substitusi kayu bakar	Rantau Jaya Udik II	TNWK, UNILA,	12,121		12,121					6,061	6,061
	7. Pembuatan kolam pemancingan ikan sebagai DTW	Braja Harjosari	TNWK, WCS, Yapeka, AleRt	5,455	2,727	2,727					2,727	2,727
	8. Penanganan kebakaran lahan	Braja Harjosari dan Rantau Jaya Udik II	TNWK, WCS, Yapeka, AleRt	22,727	4,545	4,545	4,545	4,545	4,545	-		22,727
<b>Sub-program 8: Pengembangan model ekowisata terpadu</b>				<b>77,273</b>	<b>28,788</b>	<b>27,273</b>	<b>21,212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,273</b>	<b>55,000</b>	
<i>Arahan Kegiatan</i>												
	1. Pengembangan model bisnis ekowisata terpadu dan penyusunan rencana tapak dan DED ekowisata terpadu pada 5 desa binaan		TNWK, Pemprov, Pemkab, WCS, AleRt, PILI, YABI, Yapeka	10,606	6,061	4,545					5,303	5,303
	2. Pengembangan program ekowisata berbasis masyarakat dan potensi jasa lingkungan lainnya		TNWK, Pemprov, Pemkab, WCS, AleRt, PILI, YABI, Yapeka	27,273	9,091	9,091	9,091				5,455	21,818
	3. Pelatihan kapasitas pengembangan ekowisata		TNWK, Pemprov, Pemkab, WCS, AleRt, PILI, YABI, Yapeka	9,091	4,545	4,545					4,545	4,545
	4. Pendampingan dan pengembangan promosi dan pemasaran		TNWK, Pemprov, Pemkab, WCS, AleRt, PILI, YABI, Yapeka	27,273	9,091	9,091	9,091				5,455	21,818
	5. Kajian dampak pengelolaan ekowisata terpadu		TNWK, Pemprov, Pemkab, WCS, AleRt, PILI, YABI, Yapeka	3,030			3,030				1,515	1,515



STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU					PENDANAAN	
					2018	2019	2020	2021	2022	SGP	Sumber Lain
	<b>Sub-program 9: Penguatan kolaborasi pemangku kepentingan di kawasan TNWk</b>			<b>77,273</b>	<b>19,091</b>	<b>14,545</b>	<b>14,545</b>	<b>14,545</b>	<b>14,545</b>	<b>25,758</b>	<b>51,515</b>
	<i>Arahan Kegiatan</i>										
Keterpaduan perencanaan dan pengembangan kawasan TNWk melalui Kemitraan Konservasi dalam skema peran dan pembagian manfaat dari sumber daya alam dan perlindungan dan pemanfaatan ekosistem	1. Pertemuan konsultasi dan koordinasi forum dan dialog multipihak		TNWK, Pemprov, Pemkab, WCS, YABI, UNILA, PKHS, Vesswis, AleRt, FRDP, PILI,	36,364	7,273	7,273	7,273	7,273	7,273	12,121	24,242
	2. Penguatan kelembagaan pada tingkat desa, termasuk Forum Rembug Desa penyangga kawasan TNWk		TNWK, Pemprov, Pemkab, WCS, AleRt, PILI	36,364	7,273	7,273	7,273	7,273	7,273	12,121	24,242
	3. Penyusunan SOP bersama tentang perlindungan, konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem termasuk mekanisme pembagian peran dan manfaat bagi pemangku kepentingan		TNWK, WCS, AleRt, PILI	4,545	4,545					1,515	3,030
	4. Sinkronisasi rencana program dan penganggaran bersama pemangku kepentingan untuk optimalisasi Rencana Kolaborasi Kawasan TNWk.	Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur dan Provinsi Lampung	TNWK, WCS, AleRt, PILI, Pemprov, Pemkab	9,091	9,091					-	9,091
	5. Pengembangan <i>business process</i> terkait tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha dalam skema kemitraan konservasi	5 des	TNWK, WCS, AleRt, PILI	3,030	3,030					-	3,030

STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	PEMANGKU KEPENTINGAN	PAGU INDIKATIF (Euro)	TATA WAKTU					PENDANAAN	
					2018	2019	2020	2021	2022	SGP	Sumber Lain
Menyiapkan Rencana Tindak MONEV yang dilakukan dengan melibatkan para penerima manfaat	Pemantauan dan Evaluasi			10,303	3,030	1,818	1,818	1,818	1,818	5,152	5,152
	<i>Arahan Kegiatan</i>										
	1. Penyusunan basis data ( <i>baseline</i> ) Monev		TNWK, Pemprov, Pemkab, UNILA, WCS, AleRt, PKHS, YABI, PILI, FRDP	1,212	1,212					606	606
	2. Pemantauan kwartalan dan evaluasi tahunan.		TNWK, Pemprov, Pemkab, UNILA, WCS, AleRt, PKHS, YABI, PILI, FRDP	9,091	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	4,545	4,545
<b>Total</b>				<b>2,544,545</b>	<b>686,667</b>	<b>676,364</b>	<b>547,879</b>	<b>309,091</b>	<b>324,545</b>	<b>401,479</b>	<b>2,143,067</b>

## PENUTUP

Penyusunan rencana pengelolaan kolaboratif TNWK merupakan rencana pengelolaan TNWK yang melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan untuk memperkuat sistem manajemen yang efektif dan efisien di TNWK. Rencana pengelolaan kolaboratif ini telah mengintegrasikan rencana pengelolaan taman nasional yang ada dan berbagai komitmen dan kontribusi dari pemangku kepentingan.

Kegiatan penyusunan rencana pengelolaan kolaboratif TNWK alam berguna untuk terbangunnya pemahaman bersama di antara pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan pengelolaan kolaboratif yang efektif dan efisien serta kesadaran dan pemahaman akan pentingnya nilai-nilai konservasi keanekaragaman hayati di TNWK dan meningkatnya kelompok-kelompok masyarakat prioritas di desa penyangga TNWK.

Pembelajaran penting dari proses penyusunan dokumen ini bahwa TNWK telah menjadi organisasi pembelajar yang mengubah eksklusivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan taman nasional menjadi inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut menjadi cerminan paradigma sepuluh cara (baru) mengelola kawasan konservasi di Indonesia yang dikembangkan oleh Ditjen KSDAE, KLHK. Pembelajaran lainnya adalah pentingnya konsistensi dalam mengawal seluruh proses dan tahapan penyusunan sehingga pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan merupakan cerminan komitmen bersama pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pengelolaan kawasan TNWK.

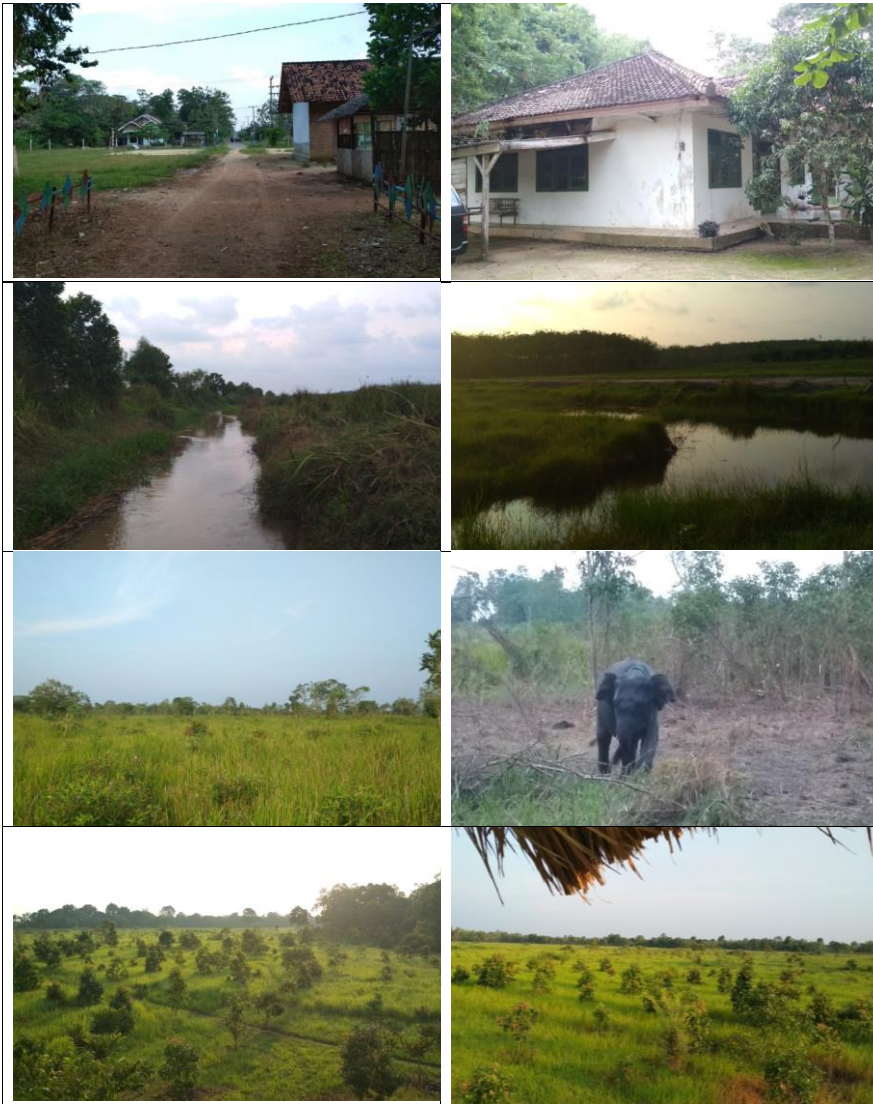
## DAFTAR PUSTAKA

- Akamani K, Hall TE. 2015. Determinants of The Process and Outcomes of Household Participation in Collaborative Forest Management in Ghana: A Quantitative Test of a Community Resilience Model. *Journal of Environmental Management*. 147: 1-11. Doi: 10.1016/j.jenvman.2014.09.007
- Batten TR. 1974. The major issues and future direction of *community development*. *Community Development Journal*. 9(2): 96–103.
- Borrini-Feyerabend, G, et al. 2007. Co-Management of Natural Resources: Organizing, Negotiating and Learning by Doing.
- Borrini-Feyerabend, G. 2015. Governance Diversity, Quality and Vitality: to- wards Shared Language and more Secure and Lasting Prospects for the Conserva- tion of Nature. Presentasi di Workshop COMACON Bangkok: Oktober, 2015
- Campfens, Hubert (Eds). 1997. *Community Development Around The World: Practice, Theory, Research, Training*. University of Toronto Press. Toronto, Canada.
- Chambers, Robert. 1992. *Rural Appraisal: Rapid, Relaxed, and Participatory*. Institute of Development Studies Discussion Paper 311. Sussex: HELP.
- Conley A, Moote MA. 2003. Evaluating Collaborative Natural ResourceManagement. *Society and Natural Resources* 16(5):371-386. DOI: 10.1080/08941920309181
- Ellis F. 2000. *Rural Livelihoods and Diversity In Developing Countries*. New York (US): Oxford University Press.
- Frank, Flo and Anne Smith. 1999. *The Community Development Handbook: A Tool To Build Community Capacity*. Canada. Minister of Public Works and Government Services Canada.
- Grimble, Robin dan Kate Wellard. 1997. Stakeholders Methodologies in Natural Resource Management: a Review of Principles, Experiences and Opportunities Agricultural System. Vol. 55, No. 2, pp. 173-193.
- Holmes, D.A. 1996. Sumatra Bird Report. *Kukila* 8: 9-56.
- Lawrence A dan Gillett S. 2004. Joint and Collaborative Forest Management. Di dalam Evans J, Youngquist JA, editor. *Encyclopedia of Forest Sciences*. Reading (GB): Academic Press. p 1143
- Moeliono I, Fisher L, Wodicka S, Suporahardjo. 2003. Memadukan Kepentingan, Memenangkan Kehidupan: Buku Acuan Metodologi Pengelolaan Sengketa Sumberdaya Alam. Bandung (ID): Studi Driya Media/World Neighbors/Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara/Ford Foundation.
- Nawawi, H. 2003. *Manajemen Strategis Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hal. 147
- Ozaki, Kenichi; Isono, Masahiro; Kawahara, Takayuki; Iida, Shigeo; Kudo, Takuma; Fukuyama, Kenji. 2006. "A Mechanistic Approach to Evaluation of Umbrella Species as Conservation Surrogates". *Conservation Biology*. 20 (5): 1507–1515. doi:10.1111/j.1523-1739.2006.00444.x
- Parrot, S. and Andrew, P. 1996. An annotated checklist of the birds of Way Kambas National Park, Sumatra. *Kukila* 8: 57-85.
- Robinson, Jerry W dan Gary Paul Green. 2011. *Introduction to Community Development: Theory, Practice, and Service-Learning*. SAGE Publication Inc. USA

- Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. 2011 (edisi kedua). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta (ID). Yayasan Obor Indonesia.
- Scoones I. 1998. Sustainable Rural Livelihoods: A Framework For Analysis. IDS Working Paper 72. Brighton (GB): Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton.
- Si Khan. 1982. Organizing , A Guide for Grasroots Leaders. McGraw-Hill Book Company. New York USA.
- Stolton, S. and N. Dudley. 2016. METT Handbook: A guide to using the Management Effectiveness Tracking Tool (METT), WWF-UK, Woking
- Suharjito D. 2014. Devolusi Pengelolaan Hutan Dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Orasi Ilmiah Guru Besar. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor.
- Svendsen, Gert Tinggaard dan Gunnar Lind Haase Svendsen. 2009. *Handbook of Social Capital: The Troika of Sociology, Political Science and Economics*. Edward Elgar Publishing Limited. UK.
- Swanepoel, Henni dan Frik De Beer. 2006. *Community Development: Breaking The Cycle Of Poverty*. Fourth Edition. Juta and Co Ltd. Lansdowne, South Africa.
- Tiwari, Reena, Marina Lommerse, Dianne Smith. 2014. *M2 Models and Methodologies for Community Engagement*. Springer Science – Business Media Singapore. Singapore.
- Tony Djogo Dkk, 2003 Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri. ICRAF
- Wiratno. 2018. Sepuluh cara baru kelola kawasan konservasi di Indonesia: Membangun 'Organisasi Pembelajar'. Ditjen KSDAE, KLHK.
- Wollenberg, Eva, Edmunds, David, Buck Louise. 2001. Mengantisipasi Perubahan: Skenario Sebagai Sarana Pengelolaan Hutan Secara Adatif. Suatu Panduan. Bogor (ID). Center For International Forestry Research
- Yustika, Ahmad Erani. 2013. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Yudistira, Pandji. 2014. Sang Pelopor. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

## LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Kegiatan survey lapangan Tim CMP Taman Nasional Way Kambas













**Lampiran 2.** Kegiatan Diskusi dan Input dokumen penyusunan dokumen CMP Taman Nasional Way Kambas









**Lampiran 3.** Konsultasi publik penyusunan dokumen CMP Taman Nasional Way Kambas



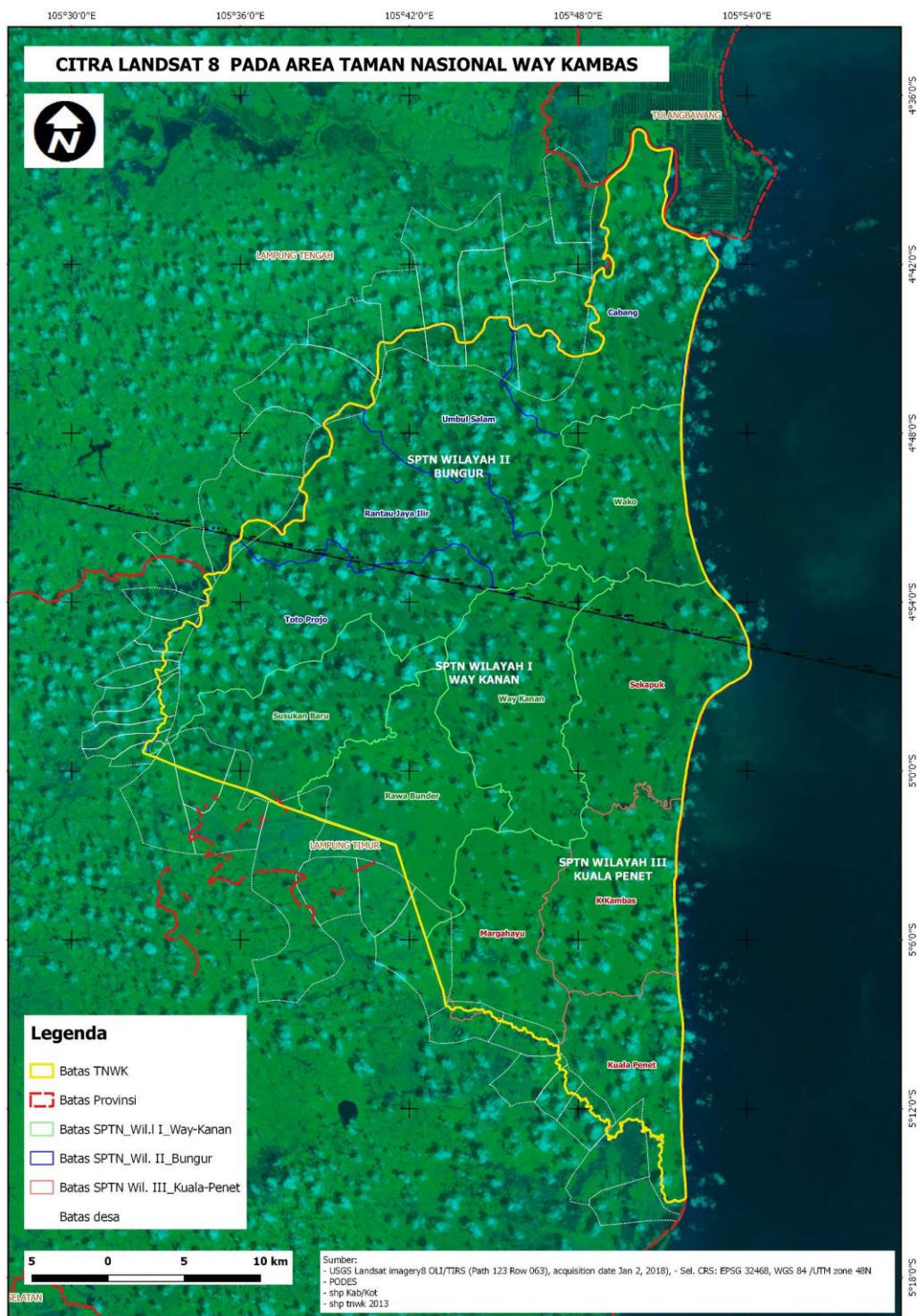






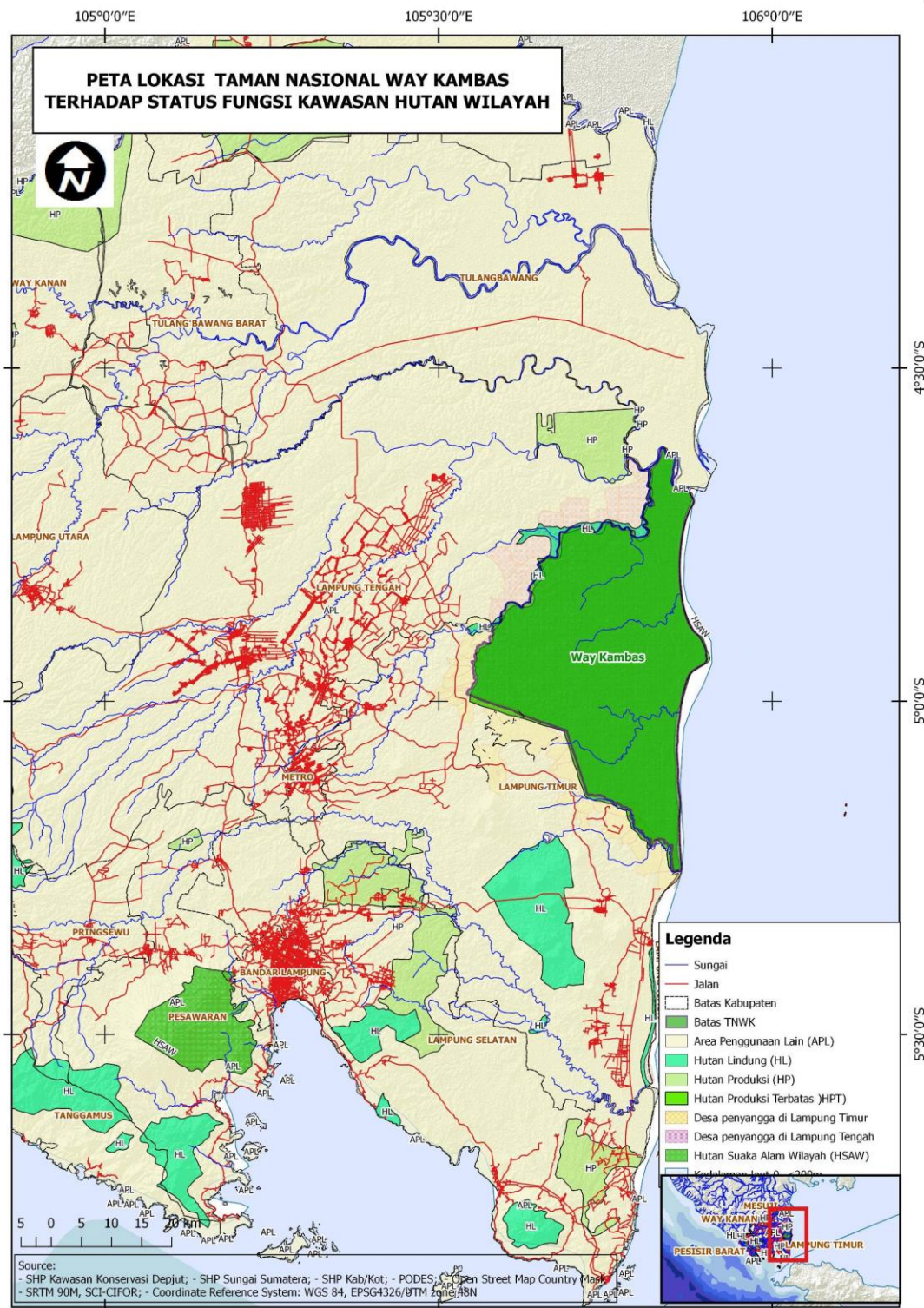


Lampiran 4. Citra Landsat 8 pada Kawasan Taman Nasional Way Kambas

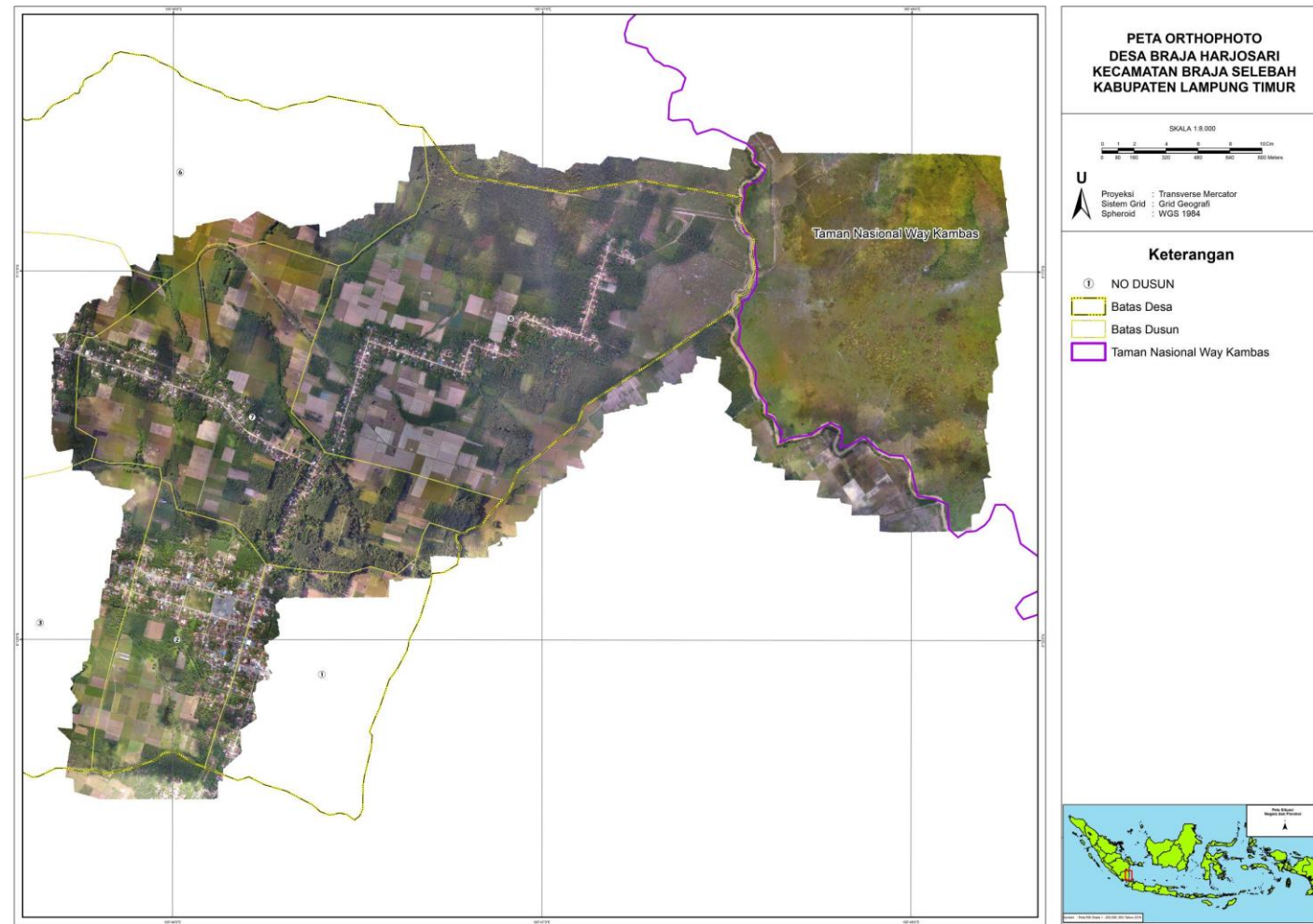




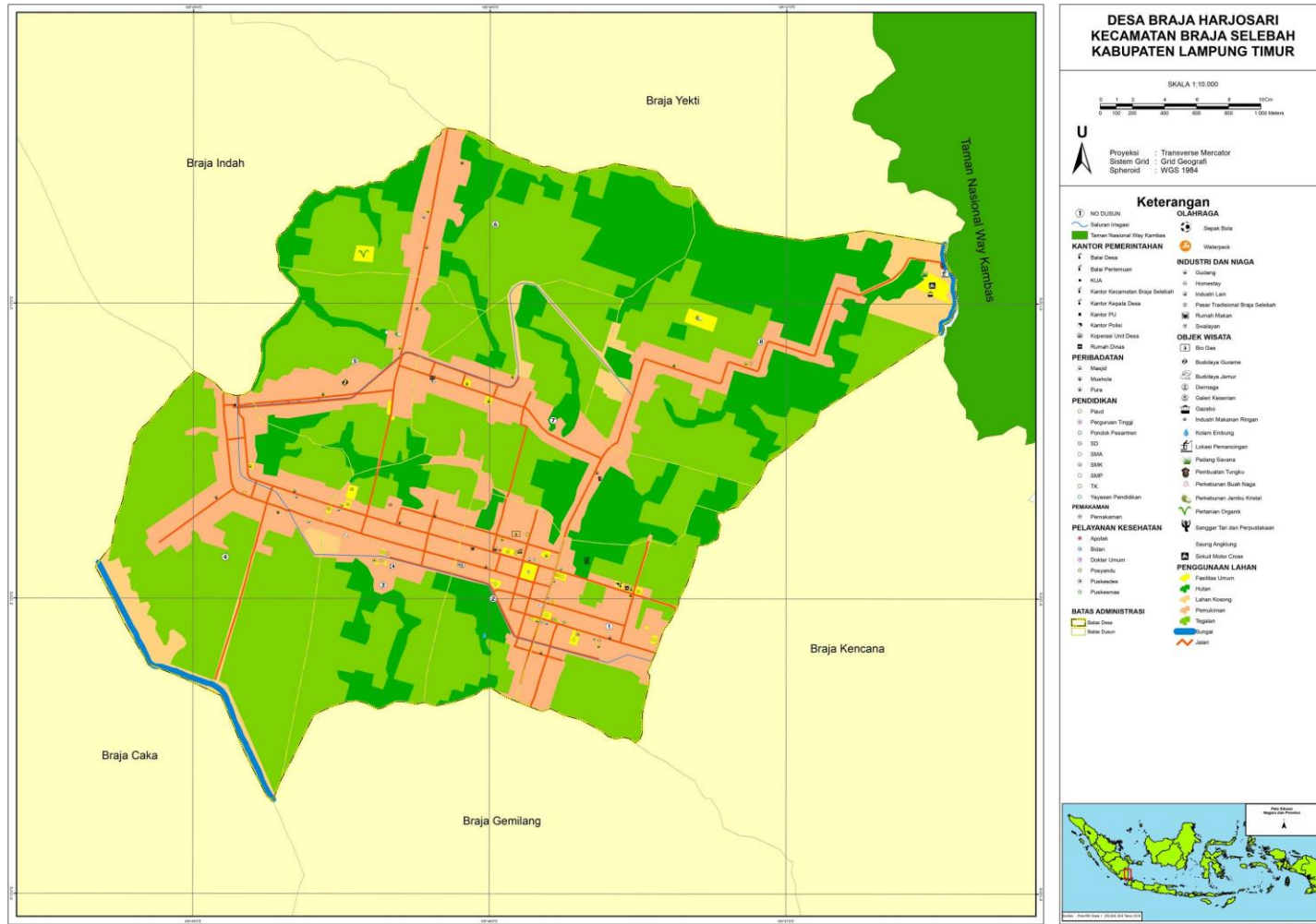
Lampiran 5. Peta Lokasi Taman Nasional Way Kambas terhadap Status Fungsi Kawasan Hutan



Lampiran 6. Peta Orthophoto Desa Braja Harjosari



Lampiran 7. Peta Tata Ruang Desa Braja Harjosari

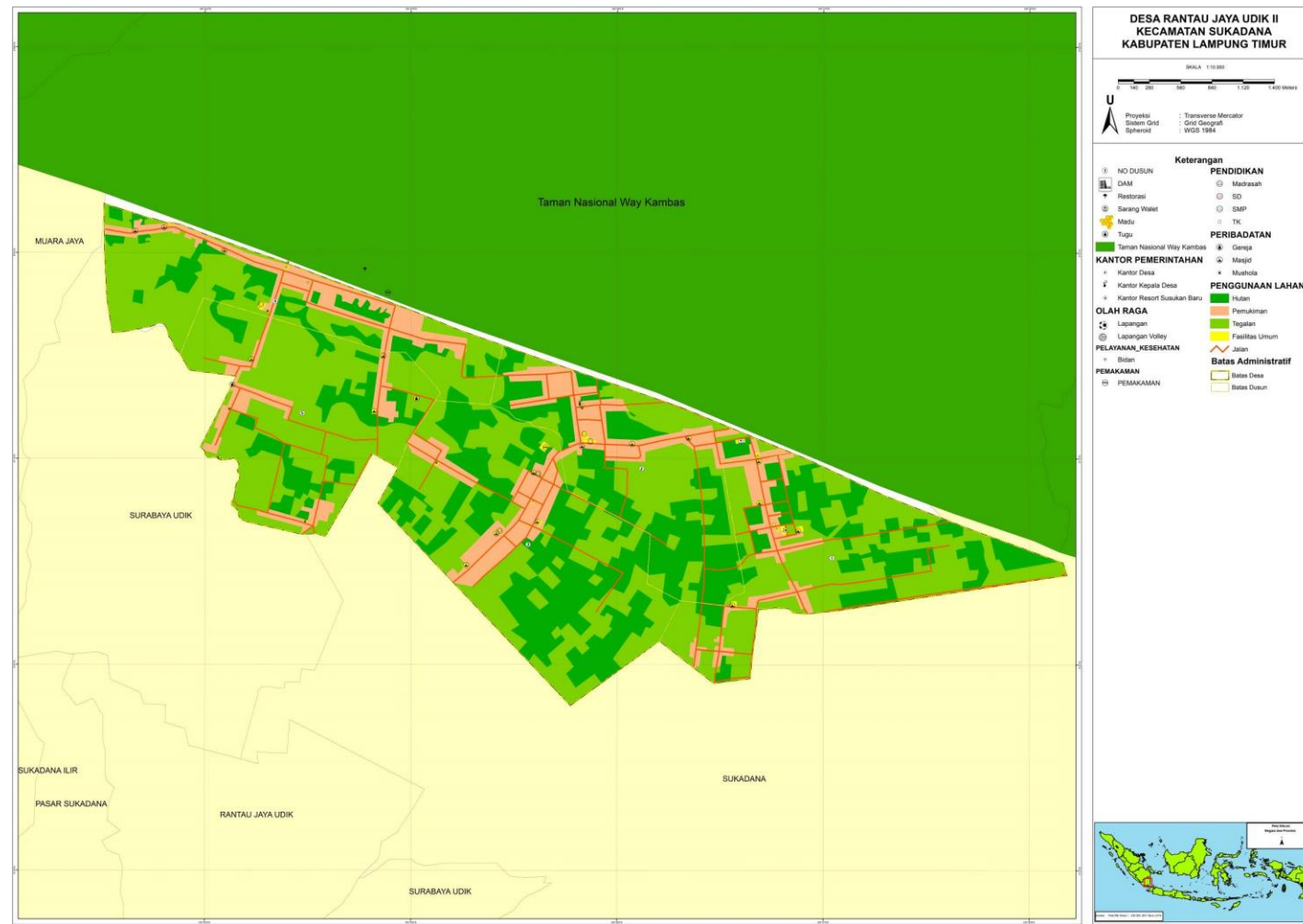




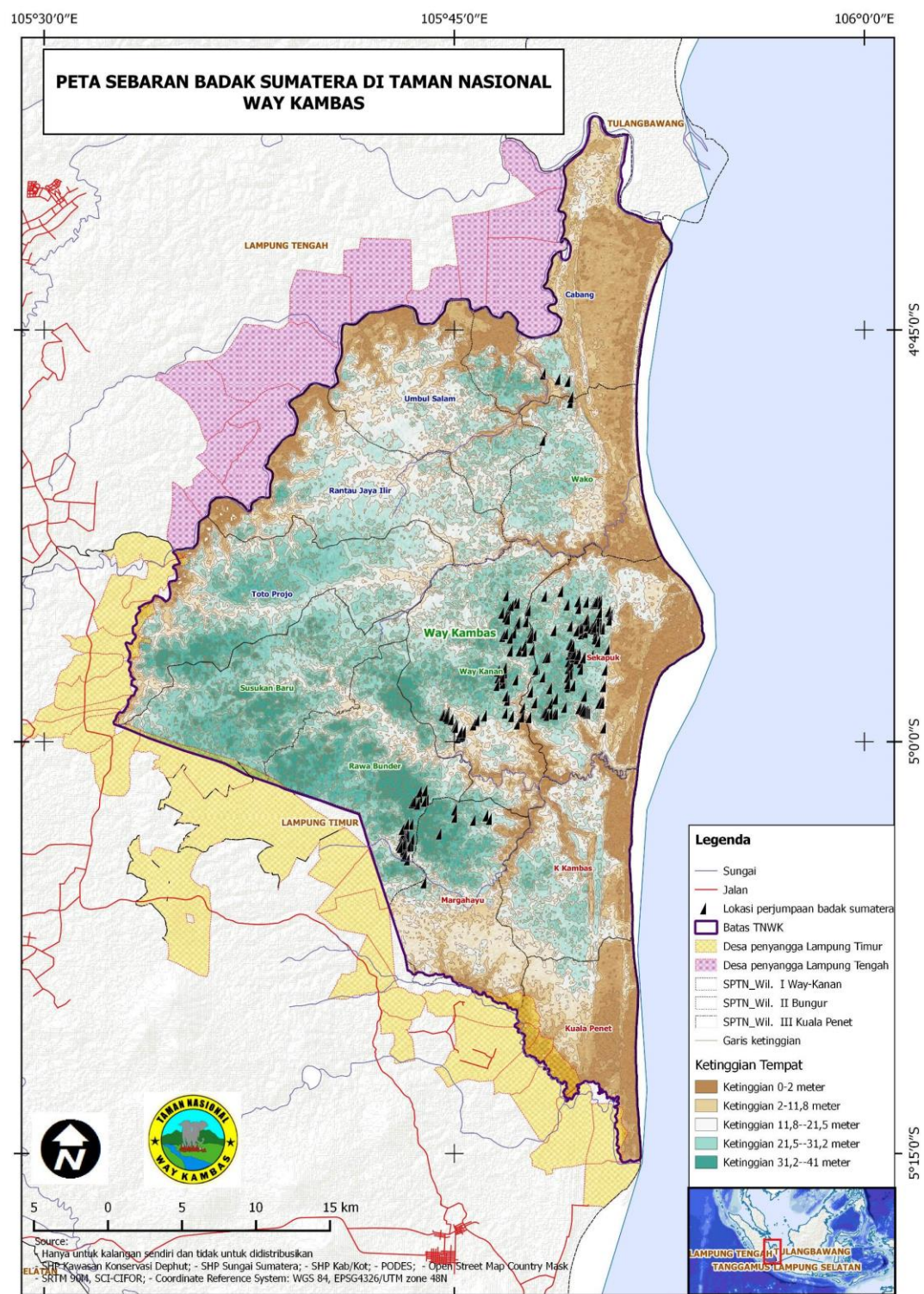
Lampiran 8. Peta Orthophoto Desa Rantau Jaya Udik II



Lampiran 9. Peta tata Ruang Desa Rantau Jaya Udik II

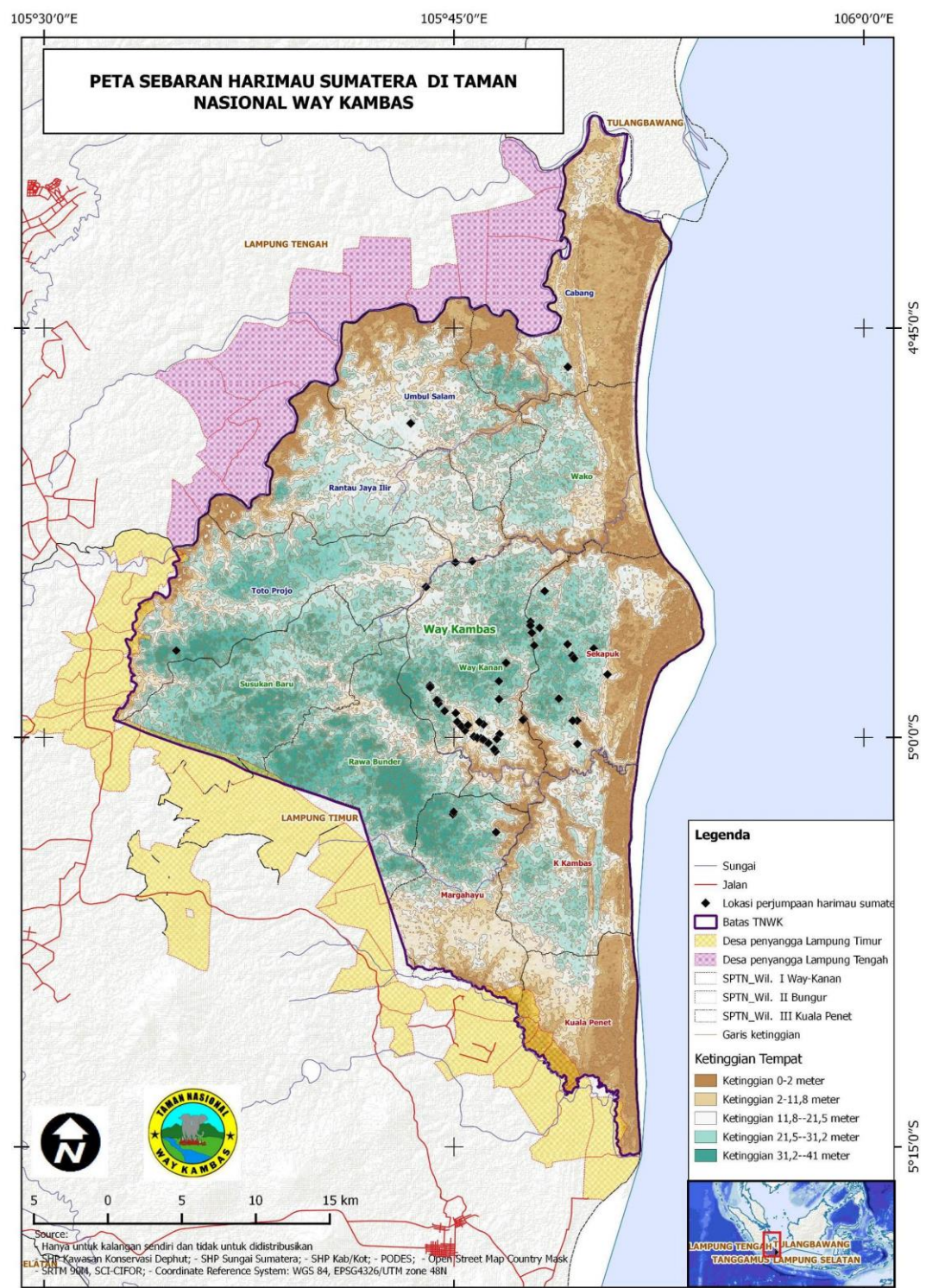


Lampiran 10. Peta sebaran badak Sumatera di TNWK



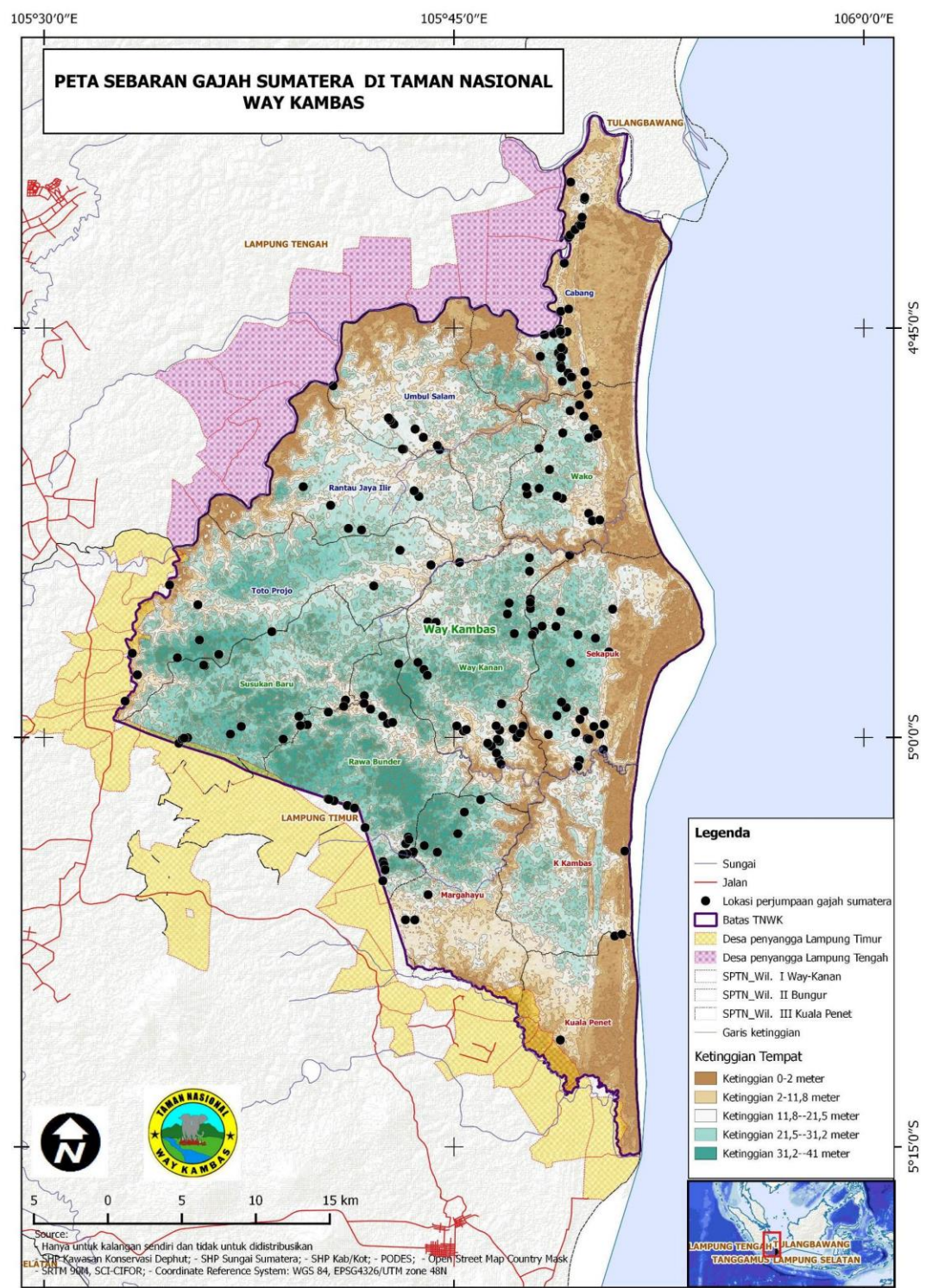


Lampiran 11. Peta sebaran harimau sumatera di TNWK



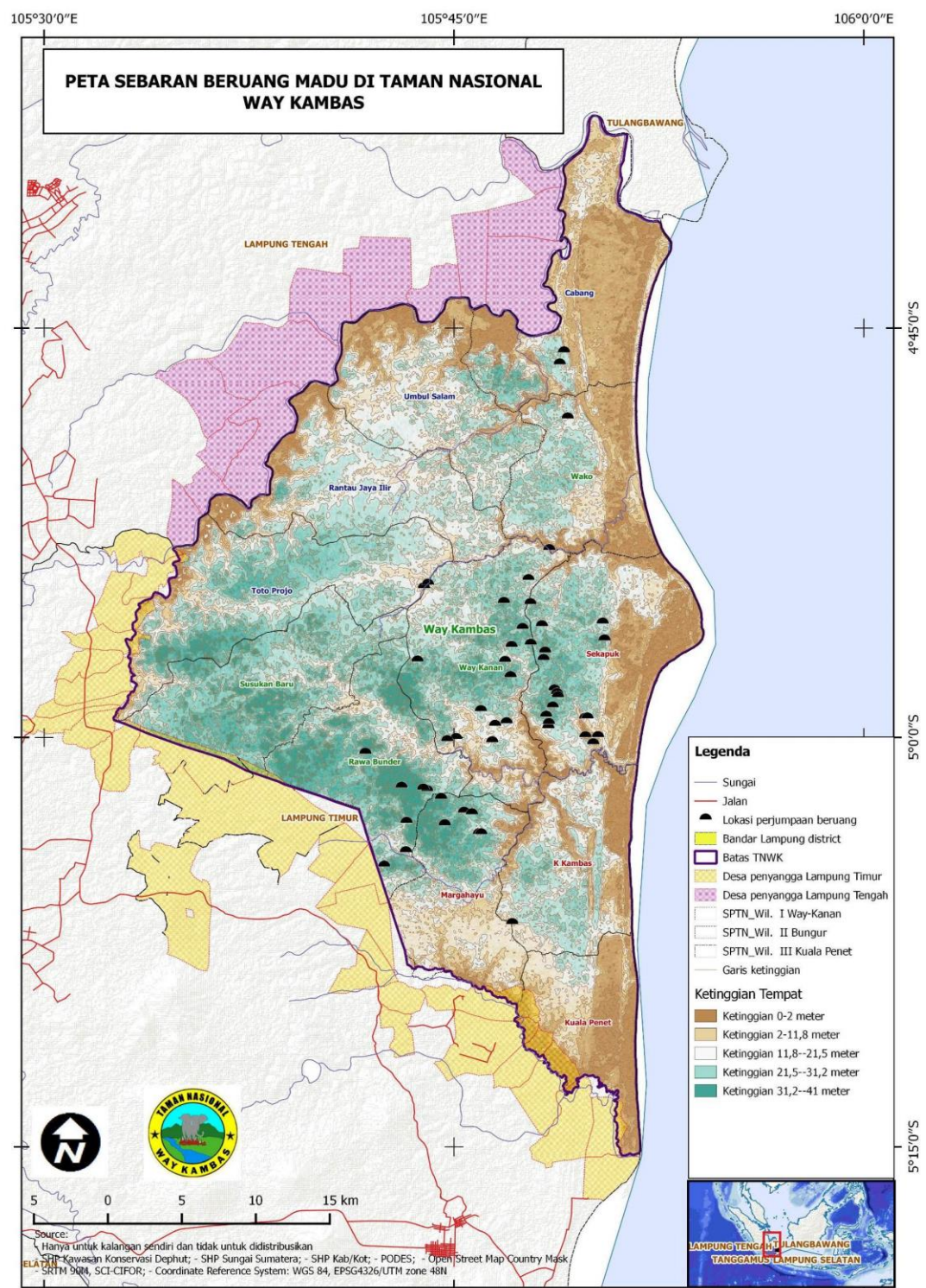


Lampiran 12. Peta sebaran gajah Sumatera di TNWK



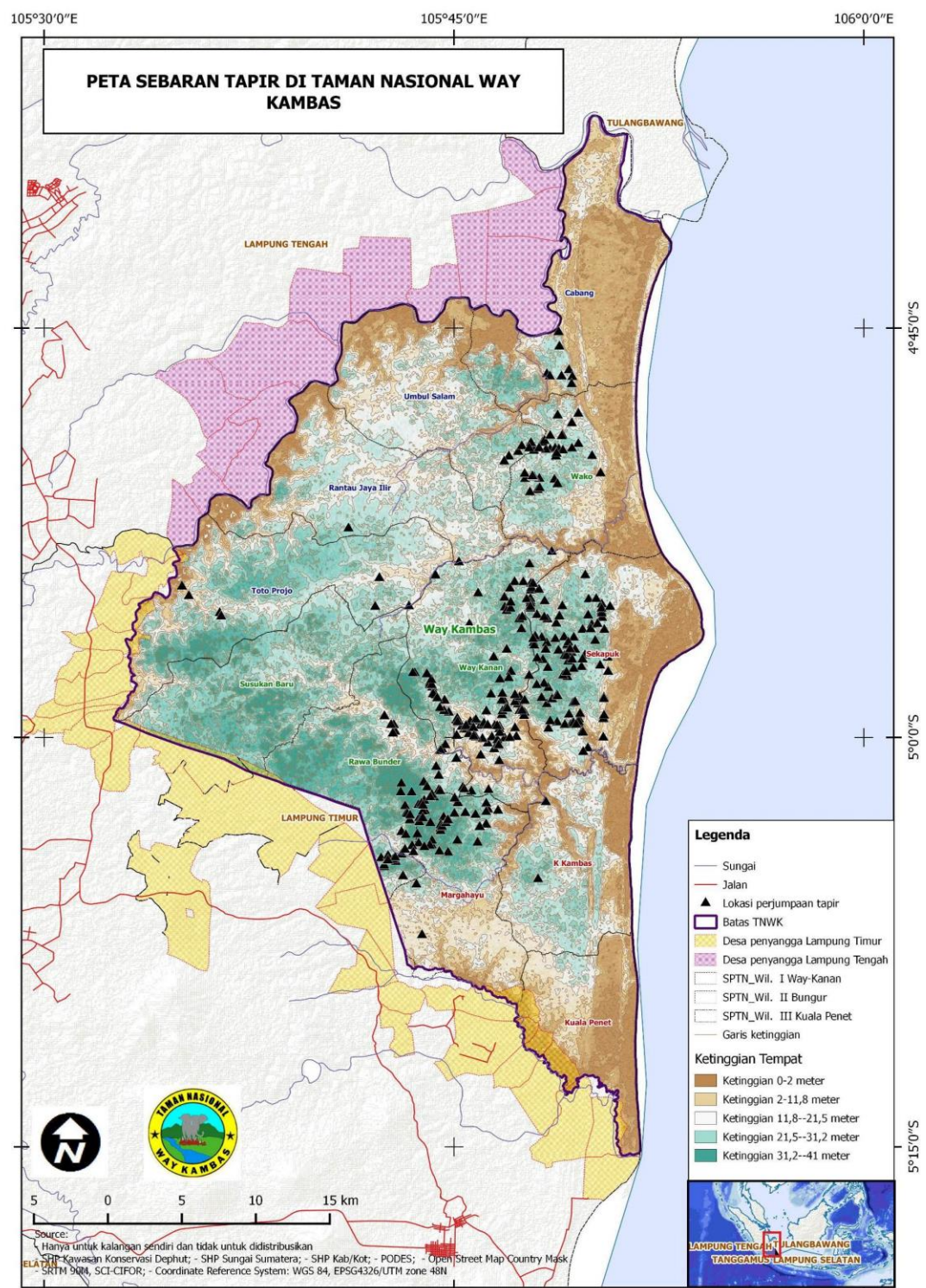


Lampiran 13. Peta sebaran beruang madu di TNWK





Lampiran 14. Peta sebaran tapir di TNWK



Lampiran 15. Peta sebaran satwa kunci di TNWK

